GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 827 TAHUN 2026

TENTANG

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan setelah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 745);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 Hal : Implementasi SIPD;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025.

KEDUA : Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Data sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan hasil pemeriksaan data statistik sektoral daerah Provinsi Kepulauan Riau dan telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, dan dapat dilakukan penyebarluasan data.

KEEMPAT : Data sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juli 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan
Nomor. : 827 TAHUN 2026
Tanggal : 22 Juli 2026

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.01.000006	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dokumen	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	-
2	1.01.000010	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terkonservasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terkonservasi	-
3	1.01.000011	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terevitalisasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terevitalisasi	-
4	1.01.000012	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Provinsi yang terkaji Vitalitasnya	-
5	1.01.000016	Bengkel/Unit Produksi	Unit	Jumlah bengkel/unit produksi yang tersedia	-
6	1.01.000017	Bengkel/Unit Produksi yang layak	Unit	jumlah bengkel/unit produksi yang tersedia serta layak	-
7	1.01.000018	Bengkel/Unit Produksi yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah bengkel/unit produksi yang rusak sedang/berat	-
8	1.01.000019	Buku	Buah	jumlah buku yang tersedia	-
9	1.01.000021	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang tersedia dan terdistribusi	Buku	Jumlah keseluruhan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang tersedia dan terdistribusi	-
10	1.01.000025	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan khusus yang tersedia	Buah	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan khusus yang tersedia	-
11	1.01.000026	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang dibutuhkan	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang dibutuhkan	-
12	1.01.000027	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang tersedia	Buah	Jumlah Buku Teks Peljaaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang tersedia	-
13	1.01.000038	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1
14	1.01.000039	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah keseluruhan Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1
15	1.01.000041	Dokumen hasil pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1
16	1.01.000044	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1
17	1.01.000045	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2
18	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	-
19	1.01.000076	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan khusus	-
20	1.01.000077	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	jumlah Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	-
21	1.01.000085	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dokumen	Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	-
22	1.01.000087	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	Laporan	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	50
23	1.01.000088	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100
24	1.01.000091	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3758
25	1.01.000092	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	3728

26	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	-
27	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	-
28	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	-
29	1.01.000104	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	-
30	1.01.000118	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	3485
31	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	25
32	1.01.000131	Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	-
33	1.01.000134	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	-
34	1.01.000135	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	3826
35	1.01.000159	Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi	Jumlah Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	-
36	1.01.000160	Rasio Pendidik pada pendidikan khusus	%	Jumlah Rasio Pendidik pada pendidikan khusus	-
37	1.01.000161	Rasio Pendidik pada pendidikan menengah	%	Jumlah Rasio Pendidik pada pendidikan menengah	603,49
38	1.01.000164	Ruang Bina Diri	Ruang	Jumlah ruang bina diri yang tersedia	0
39	1.01.000165	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak	Ruang	jumlah ruang bina diri dan bina gerak yang tersedia	0
40	1.01.000166	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	0
41	1.01.000167	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang rusak sedang/berat	0
42	1.01.000168	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang telah direhabilitasi	0
43	1.01.000169	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)) yang layak	Ruang	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)) yang layak	0
44	1.01.000170	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)yang perlu direhabilitasi	0
45	1.01.000171	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	0
46	1.01.000172	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang rusak sedang/berat	0
47	1.01.000173	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang telah direhabilitasi	0
48	1.01.000174	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang layak	Ruang	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang layak	0
49	1.01.000175	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang perlu direhabilitasi	0
50	1.01.000176	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	JUmlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	0
51	1.01.000177	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang perlu direhabilitasi	0
52	1.01.000178	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang rusak sedang/berat	0
53	1.01.000179	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang telah direhabilitasi	0

54	1.01.000180	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang layak	Ruang	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang layak	0
55	1.01.000181	Ruang Bina PersepsiBunyi dan Irama	Ruang	Jumlah Bina Persepsi Bunyi dan Irama	0
56	1.01.000182	Ruang Bina Pribadi dan Sosial	Ruang	Jumlah Bina Pribadi dan Sosial yang tersedia	0
57	1.01.000183	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	Jumlah Ruang Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	0
58	1.01.000184	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang layak	Ruang	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang layak	0
59	1.01.000185	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang rusak sedang/berat	0
60	1.01.000186	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang telah direhabilitasi	0
61	1.01.000187	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)yang perlu direhabilitasi	Unit	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)yang perlu direhabilitasi	0
62	1.01.000188	Ruang Bina Wicara	Ruang	Jumlah Ruang Bina Wicara yang tersedia	0
63	1.01.000189	Ruang BKPBI	Ruang	Jumlah Ruang BKPBI yang tersedia	0
64	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	0
65	1.01.000214	Ruang keterampilan	Ruang	jumlah ruang keerampilan yang tersedia	0
66	1.01.000217	Ruang konseling	Ruang	jumlah ruang konseling yang tersedia	0
67	1.01.000219	Ruang laboratorium bahasa yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang layak	57
68	1.01.000220	Ruang laboratorium bahasa yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa rusak sedang/berat	15
69	1.01.000221	Ruang laboratorium IPA yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang layak	58
70	1.01.000222	Ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	7
71	1.01.000223	Ruang laboratorium komputer yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium komputer yang layak	252
72	1.01.000224	Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	31
73	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang layak	504
74	1.01.000227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang tersedia	72
75	1.01.000228	Ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	1
76	1.01.000229	Ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	0
77	1.01.000230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia	96
78	1.01.000231	Ruang laboratorium biologi yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium biologi yang layak	79
79	1.01.000232	Ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang pwelu direhabilitasi	0
80	1.01.000233	Ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	17
81	1.01.000234	Ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	0
82	1.01.000235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika	65
83	1.01.000236	Ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	0
84	1.01.000237	Ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	0
85	1.01.000239	Ruang laboratorium fisika yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang layak	58
86	1.01.000240	Ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	7
87	1.01.000242	Ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	0
88	1.01.000243	Ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	0
89	1.01.000244	Ruang laboratorium kimia	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia	89
90	1.01.000245	Ruang laboratorium kimia yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang layak	89
91	1.01.000246	Ruang laboratorium kimia yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang perlu direhabilitasi	0
92	1.01.000247	Ruang laboratorium kimia yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang rusak sedang/berat	0
93	1.01.000248	Ruang laboratorium kimia yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang telah direhabilitasi	0
94	1.01.000249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer	341
95	1.01.000250	Ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	0
96	1.01.000251	Ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	0

97	1.01.000253	Ruang Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang perlu direhabilitasi	0
98	1.01.000254	Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang telah direhabilitasi	0
99	1.01.000255	Ruang OM	Ruang	Jumlah ruang OM yang tersedia	0
100	1.01.000256	Ruang organisasi kesiswaan	Ruang	Jumlah ruang organisasi kesiswaan yang tersedia	0
101	1.01.000257	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang orientasi dan mobilitas yang perlu direhabilitasi	0
102	1.01.000258	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang orientasi dan mobilitas yang telah direhabilitasi	0
103	1.01.000273	Ruang praktik gambar teknik	Ruang	Jumlah ruang praktik gambar teknik yang tersedia	0
104	1.01.000274	Ruang Praktik yang layak	Ruang	Jumlah ruang praktik yang layak	0
105	1.01.000275	Ruang Praktik yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang praktik yang rusak sedang/berat	0
106	1.01.000276	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang pusat sumber anak berkebutuhan khusus yang perlu direhabilitasi	0
107	1.01.000277	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang pusat sumber anak berkebutuhan khusus yang telah direhabilitasi	0
108	1.01.000278	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	Jumlah ruang orientasi dan mobilitas yang tersedia	0
109	1.01.000279	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas yang layak	Ruang	Jumlah ruang orientasi dan mobilitas yang layak	0
110	1.01.000280	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang orientasi dan mobilitas yang rusak sedang/berat	0
111	1.01.000287	Ruang tata usaha	Ruang	Jumlah ruang tata usaha yang tersedia	232
112	1.01.000290	Ruang TU yang layak	Ruang	Jumlah ruang TU yang layak	232
113	1.01.000305	Ruang/Sudut Baca	Ruang	Ruang/Sudut Baca merupakan ruang atau area yang dilengkapi koleksi buku dan/atau karya peserta didik yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca peserta didik	0
114	1.01.000306	Ruang/sudut baca yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang/sudut baca yang perlu direhabilitasi	0
115	1.01.000362	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang melaksanakan rekomendasi	0
116	1.01.000377	Satuan pendidikan yang belum memliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang belum memliki Sarana Mobilitas Sekolah	0
117	1.01.000381	Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	0
118	1.01.000382	Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0
119	1.01.000385	Satuan pendidikan yang memliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memilki sarana mobilitas sekolah	0
120	1.01.000397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang sudah memiliki alat praktik dan peraga peserta didik	16
121	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah atas yang mengelola dana bos	97
122	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang mengelola dana bos	39
123	1.01.000411	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly	Satuan Pendidikan Tinggi	Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly	0
124	1.01.000412	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly yang terakrditasi A	Satuan Pendidikan Tinggi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly yang terakrditasi A	0
125	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	0
126	1.01.000419	Silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	0
127	1.01.000420	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	0
128	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah	0
129	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	0
130	1.01.000442	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	0

131	1.01.000454	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas	1159
132	1.01.000455	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	287
133	1.01.000464	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS pendidikan khusus	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS pendidikan khusus	0
134	1.01.000466	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0
135	1.01.000467	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0
136	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	Jumlah Unit Pendidikan Khusus yang tersedia	25
137	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	jumlah unit pendidikan khusus yang layak	25
138	1.01.000473	Unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	0
139	1.01.000477	Unit SMK	Unit	jumlah unit SMK yang tersedia	106
140	1.01.000478	Unit SMK yang layak	Unit	jumlah unit smk yang layak	106
141	1.01.000479	Unit SMK yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit smk yang rusak sedang/berat	0
142	1.01.000482	Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru	Dokumen	jumlah Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru	0
143	1.01.000589	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	0
144	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri	97
145	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Swasta	84
146	1.01.000691	jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas	181
147	1.01.000692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri	50675
148	1.01.000693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Swasta	8585
149	1.01.000694	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	59260
150	1.01.000695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	22370
151	1.01.000696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	4110
152	1.01.000697	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	26480
153	1.01.000698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin permpuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	28305
154	1.01.000699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	4475
155	1.01.000700	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	32780
156	1.01.000701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	16553
157	1.01.000702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	2842
158	1.01.000703	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 atau kelas 10	19395
159	1.01.000704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	17158
160	1.01.000705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	2940
161	1.01.000706	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 atau kelas 11	20098
162	1.01.000707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	16964
163	1.01.000708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	2789
164	1.01.000709	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 atau kelas 12	19753
165	1.01.000710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0
166	1.01.000711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	0
167	1.01.000712	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS	0

168	1.01.000713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0
169	1.01.000714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0
170	1.01.000715	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Tingkat	0
171	1.01.000716	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan negeri	0
172	1.01.000717	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0
173	1.01.000725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri	-
174	1.01.000726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Swasta	-
175	1.01.000727	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas	-
176	1.01.000728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0
177	1.01.000729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0
178	1.01.000730	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas	0
179	1.01.000731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri	9
180	1.01.000732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0
181	1.01.000733	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas	9
182	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri	3096
183	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Swasta	808
184	1.01.000736	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Atas	3904
185	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	1032
186	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	259
187	1.01.000739	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	1291
188	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	2064
189	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	549
190	1.01.000742	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	2613
191	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	37
192	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	75
193	1.01.000745	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas	112
194	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	3092
195	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	733
196	1.01.000748	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas	3792
197	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	569
198	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	82

199	1.01.000751	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	651
200	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	423
201	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	85
202	1.01.000754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	508
203	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	589
204	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah SMA	94
205	1.01.000757	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	673
206	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah diatas SMA	308
207	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah diatas SMA	53
208	1.01.000760	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berijazah diatas SMA	361
209	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri	1430
210	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	364
211	1.01.000763	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	1794
212	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	1430
213	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	462
214	1.01.000766	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	Keseluruhan jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	1892
215	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Negeri	958
216	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Swasta	406
217	1.01.000769	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	1364
218	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	207
219	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	42
220	1.01.000772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	249
221	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	152
222	1.01.000774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	13
223	1.01.000775	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	165
224	1.01.000776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Negeri	113
225	1.01.000777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Swasta	1
226	1.01.000778	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	114
227	1.01.000779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0

228	1.01.000780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0
229	1.01.000781	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL	0
230	1.01.000782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah S1	252
231	1.01.000783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah S1	35
232	1.01.000784	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas yang memiliki ijazah strata satu	287
233	1.01.000785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	39
234	1.01.000786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	67
235	1.01.000787	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	Jumlah tersedianya Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia	106
236	1.01.000788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	34783
237	1.01.000790	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	42946
238	1.01.000791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	20903
239	1.01.000792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	4723
240	1.01.000793	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan	25626
241	1.01.000794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	13880
242	1.01.000795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	3440
243	1.01.000796	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	keseluruhan jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	17320
244	1.01.000797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	13583
245	1.01.000798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah siswa yang berada pada tingkat 10 di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	2412
246	1.01.000800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	11202
247	1.01.000801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	2880
248	1.01.000803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	9998
249	1.01.000804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	2871
250	1.01.000806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 13 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	35
251	1.01.000807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	Jumlah siswa yang berada pada tingkat 13 di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0
252	1.01.000809	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Jumlah peserta didik atau siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0
253	1.01.000810	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah siswa seluruh tingkatan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0
254	1.01.000812	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0
255	1.01.000813	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0
256	1.01.000814	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	0
257	1.01.000821	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa yang berusia 12 tahun keatas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	34783
258	1.01.000822	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa yang berusia 12 tahun keatas pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	8163
259	1.01.000823	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah keseluruhan siswa atau peserta didik yang berusia 12 tahun keatas pada Sekolah Menengah Kejuruan	42946
260	1.01.000824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	130
261	1.01.000825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	10

262	1.01.000826	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	140
263	1.01.000827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	Jumlah Siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	8
264	1.01.000828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	Jumlah peserta didik yang putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	19
265	1.01.000829	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	jumlah siswa putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	27
266	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	Jumlah tenaga pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1790
267	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	789
268	1.01.000832	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	2579
269	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru atau tenaga pendidik yang berjenis kelamin laki-laki di Sekolah Menengah Kejuruan	784
270	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	319
271	1.01.000835	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	1103
272	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1006
273	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	470
274	1.01.000838	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	1475
275	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Sumlah kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang memiliki ijazah tingkat strata satu atau S1	16
276	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah dibawah S1	102
277	1.01.000841	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah keseluruhan kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah strata satu atau S1 pada Sekolah Menengah Kejuruan	118
278	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah S1 keatas	1762
279	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas	687
280	1.01.000844	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah keseluruhan kepala sekolah dan guru yang berijazah strata satu atau S1 keatas pada Sekolah Menengah Kejuruan	2449
281	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	329
282	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swastai	95
283	1.01.000847	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	424
284	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan di sekolah menengah kejuruan negeri	233
285	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan di sekolah menengah kejuruan swasta	83
286	1.01.000850	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	316
287	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berijazah sma pada sekolah menengah kejuruan negeri	343

288	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berijazah atau sma pada sekolah menengah kejuruan swasta	95
289	1.01.000853	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	438
290	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diatas SMA	170
291	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	53
292	1.01.000856	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	jumlah keseluruhan tenaga kependiidikan yang berijazah diatas sma pada sekolah menengah kejuruan	223
293	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1046
294	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	jumlah rombongan belajar pada sekolah menengah kejuruan swasta	477
295	1.01.000859	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	1523
296	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan negeri	711
297	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	jumlah ruang kelas pada sekolah menengah kejuruan swasta	594
298	1.01.000862	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	jumlah keseluruhan ruang kelas pada sekolah menengah kejuruan	1305
299	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	440
300	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	465
301	1.01.000865	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	jumlah keseluruhan ruang kelas dalam kondisi baik pada sekolah menengah kejuruan	905
302	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada sekolah menengah kejuruan negeri	174
303	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada skeolah menengah kejuruan swasta	105
304	1.01.000868	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	jumlah keseluruhan ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada sekolah menengah kejuruan	279
305	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada sekolah menengah kejuruan negeri	79
306	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada sekolah menengah kejuruan swasta	21
307	1.01.000871	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	jumlah keseluruhan ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada sekolah menengah kejuruan	100
308	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada sekolah menengah kejuruan negeri	18
309	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada sekolah menengah kejuruan swasta	0
310	1.01.000874	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada sekolah menengah kejuruan	18
311	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak total pada sekolah menengah kejuruan negeri	0
312	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	jumlah ruang kelas yang mengalami rusak total pada sekolah menengah kejuruan swasta	3
313	1.01.000877	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	jumlah keseluruhan ruang kelas yang mengalami rusak total	3
314	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berijazah strata 1 atau s1 pada sekolah menengah kejuruan negeri	126
315	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang berijazah strata 1 atau s1 pada sekolah menengah kejuruan swasta	40
316	1.01.000880	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang berijazah s1 pada sekolah menengah kejuruan	166

317	1.01.000883	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
318	1.01.000885	profesi pelaku perbukuan daerah	Orang	jumlah profesi pelaku perbukuan daerah	-
319	1.01.000886	profesi pelaku perbukuan daerah	Orang	jumlah profesi pelaku perbukuan daerah	-
320	1.01.000887	Profesi pelaku perbukuan	Orang	Jumlah pofesi pelaku perbukuan	-
321	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	-
322	1.01.000889	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0
323	1.01.000890	Akademi Komunitas	Unit	akedemi komunitas adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu (D1) dan/atau diploma dua (D2) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat	0
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	3
3	1.02.000003	Alat-Alat kesehatan/peralatan	Unit	Alat kesehatan dan peralatan	3123
4	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang	3974
5	1.02.000007	Alkes/alat penunjang medik	Unit	Alat Penunjang medis, sering disebut juga	3974
6	1.02.000013	Bahan habis pakai lainnya	Paket	Bahan habis pakai lainnya adalah	15
7	1.02.000015	Barang penunjang operasional	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah	13
8	1.02.000017	BMHP yang didistrbusikan ke	Paket	Bahan medis habis pakai adalah bahan	1
9	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat	Sarana	Jumlah Cabang Penyalur Alat Kesehatan	16
10	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil	Kuantitas	Jumlah Data laporan kegiatan hasil	0
11	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional	455
12	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis	51
13	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal	43
14	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal	47
15	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter	14
16	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	57
17	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	14
18	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan	24
19	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	25
20	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	15
21	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	57
22	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	21
23	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	16
24	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	7
25	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	1675

26	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Vaksin adalah suatu bentuk perlindungan atau imunisasi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu. Jumlah Dokumen distribusi alkes, obat, Vaksin, makanan, dan minuman ke faskes lainnya	1
27	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	-
28	1.02.000042	Dokumen hasil Investigasi	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Investigasi	1
29	1.02.000043	Dokumen hasil Koordinasi dan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan	1
30	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan	1
31	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan	1
32	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data	1
33	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	1
34	1.02.000051	Dokumen hasil pengelolaan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1
35	1.02.000052	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dokumen	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1
36	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1
37	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	1
38	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga	1
39	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0
40	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	3
41	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	2
42	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1
43	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1
44	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1
45	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	3
46	1.02.000063	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	& Penelitian Kesehatan adalah proses	1
47	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	-
48	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	1
49	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	-

50	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-
51	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan	-
52	1.02.000069	Dokumen hasil	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil	-
53	1.02.000070	Dokumen hasil	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan	1
54	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan	-
55	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Upaya	1
56	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan	1
57	1.02.000074	Dokumen Operasional	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	-
58	1.02.000075	Dokumen Operasional	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	-
59	1.02.000076	Dokumen Operasional	Dokumen	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1
60	1.02.000077	Dokumen Pendampingan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas	-
61	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang	155
62	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1045
63	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1
64	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0
65	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48
66	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1045
67	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48
68	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
69	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	-
70	1.02.000089	Fasyankes yang melayani	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani	-
71	1.02.000090	Fasyankes yang melayani	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui	-
72	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	0
73	1.02.000092	Handuk	Paket	Jumlah Handuk	0
74	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	1
75	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan	1
76	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	1
77	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	1
78	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	35863
79	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	36677
80	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	1
81	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	10
82	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah	4235
83	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan	12
84	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan,	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan,	1
85	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi	1
86	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis	0
87	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan	1
88	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan	-
89	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal	1
90	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah	Layanan	Jumlah layanan kesehatan di Daerah	1
91	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	4
92	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3
93	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan	Paket	Jumlah obat. Vaksin, makanan dan	4
94	1.02.000116	Orang dengan Masalah	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	2943
95	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	43
96	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	63
97	1.02.000119	orang terduga menderita	Orang	Jumlah orang terduga menderita	61740
98	1.02.000120	orang yang Mendapatkan	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan	2699
99	1.02.000121	Orang yang menerima layanan	Orang	Jumlah Orang yang menerima layanan	695
100	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang	Organisasi	Jumlah Organisasi masyarakat bidang	-
101	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit	0
102	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	5
103	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	Jumlah penyalahguna NAPZA	43
104	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi	kualtitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan	1
105	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry	15
106	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD	15
107	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi	618
108	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	745
109	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	224

110	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif	306
111	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan	2379
112	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	117
113	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi	370
114	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	Ruang Radiologi adalah area khusus di	32
115	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap	333
116	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	106
117	1.02.000155	Peralatan penanggulangan	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan	8
118	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih,	6
119	1.02.000157	Perizinan Industri Rumah	Unit	Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga	-
120	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	2
121	1.02.000159	Prasarana di Fasyankes	Unit	jumlah Prasarana di Fasyankes	-
122	1.02.000160	Prasarana Fasyankes	Unit	Jumlah Prasarana Fasyankes	-
123	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman	-
124	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	0
125	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	96
126	1.02.000165	RICU	Unit	Jumlah RICU	-
127	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	Jumlah Ruang administrasi	5
128	1.02.000167	Ruang Administrasi dan	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan	9
129	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah Ruang ASI	2
130	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	2
131	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	4
132	1.02.000171	Ruang dinas Nakes	Unit	Jumlah Ruang dinas Nakes	3
133	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	4
134	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	3
135	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	2
136	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Jumlah Ruang jaga petugas	8
137	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	2
138	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	21
139	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	-
140	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan	-
141	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	-
142	1.02.000181	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	-
143	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	Jumlah Ruang KIE	-
144	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah Ruang Laboraturium	4
145	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	Jumlah Ruang Loundry	3
146	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	10
147	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	6
148	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	5
149	1.02.000188	Ruang pemeriksanaan khusus	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus	1
150	1.02.000189	Ruang pemeriksanaan umum	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan umum	-
151	1.02.000190	Ruang Penaggulangan	Unit	Jumlah Ruang Penanggulangan	-
152	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam	4
153	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	3
154	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih,	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih,	5
155	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan	Unit	Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan	2
156	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	3
157	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	5
158	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	6
159	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	52
160	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	5
161	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	20
162	1.02.000201	Ruang rawat pascaa persalinan	Unit	Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan	4
163	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	2
164	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	4
165	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	2
166	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat	8
167	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	Jumlah Ruang tunggu	11
168	1.02.000207	Rumah dinas Nakes	Unit	Jumlah Rumah dinas Nakes	3
169	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	39
170	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	7
171	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang	7
172	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah	7
173	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum	0
174	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum	0
175	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	21
176	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	30
177	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang	30
178	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang	30
179	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang	0
180	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang	0
181	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	9
182	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	-
183	1.02.000222	sarana Fasyankes	Unit	Jumlah sarana Fasyankes	-
184	1.02.000223	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Sarana Fasyankes eksisting	-
185	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial	0
186	1.02.000226	Sprei	Paket	Jumlah Sprei	0

187	1.02.000227	Telemedicine	Unit	Jumlah Telemedicine	-
188	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	332
189	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	1572
190	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	233
191	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	2951
192	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang	3
193	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	Tenaga Keperawatan adalah istilah yang	5262
194	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut Perawat Spesialis. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga	1
195	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan	0
196	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang	Orang	Tenaga Kesehatan lainnya yang	33
197	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah	309
198	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM)	498
199	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT)	2
200	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	Tenaga Keteknisan Medis adalah	519
201	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	Tenaga Keterapian Fisik adalah	142
202	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	Tenaga Teknik Biomedika adalah	786
203	1.02.000243	Unit pemeliharaan Fasilitas	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	0
204	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah	1
205	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah	0
206	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah	1
207	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4	Unit	Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4	-
208	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah	16
209	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0
210	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	16
211	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis	Layanan	Pelayanan Kesehatan Berbasis	-
212	1.02.000262	Pembinaan dan Pengawasan	Orang	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	915
213	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	31653
214	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Jumlah Penderita Hipertensi	264611
215	1.02.000265	penduduk mendapatkan	Dokumen	Dokumen laporan penduduk	1
216	1.02.000266	Penduduk mendapatkan	Orang	Jumlah Penduduk mendapatkan	1034
217	1.02.000267	Penduduk terdampak dan	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada	636
218	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan	350
219	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan	350
220	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	111223
221	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif	1561740
222	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	5
223	1.02.000274	Jumlah Unit Pemeliharaan	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	0
224	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	Alat kesehatan	3974

225	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	0
226	1.02.000277	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
227	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
228	1.02.000282	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
229	1.02.000285	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
230	1.02.000289	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
231	1.02.000290	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
232	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan	1
233	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi	2
234	1.02.000294	Dokumen Hasil	Dokumen	Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit	1
235	1.02.000298	Rumah Sakit yang memenuhi	Unit	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi	1
236	1.02.000299	Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang	-
237	1.02.000300	Beasiswa Ikatan Dinas Yang	Orang	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang	0
238	1.02.000301	Staf pengajar dengan keahlian	Orang	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian	-
239	1.02.000302	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	Jumlah tenaga pengajar ilmu kesehatan	-
240	1.02.000303	pembiayaan akreditasi dan	Unit	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya	1
241	1.02.000304	Balai pelatihan kesehatan	Unit	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai	-
242	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	1
243	1.02.000306	Penduduk yang mendapatkan	Orang	Jumlah Penduduk yang mendapatkan	2258678
244	1.02.000308	Tenaga kesehatan yang terjamin	Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin	15000
245	1.02.000309	Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai	Orang	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	327
246	1.02.000310	Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	3
247	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang	39
248	1.02.000314	Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1
249	1.02.000315	Dokumen Hasil	Dokumen	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit	1
250	1.02.000316	Dokumen Hasil	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan	1
251	1.02.000318	Keluarga yang Mengikuti	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.03.000006	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
2	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0
3	1.03.000008	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0
4	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	6
5	1.03.000012	Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
6	1.03.000014	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
7	1.03.000016	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
8	1.03.000017	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pe	0
9	1.03.000020	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0

10	1.03.000022	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0
11	1.03.000025	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Bantuan Teknis	Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.	0
12	1.03.000027	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bantuan Teknis	Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.	0
13	1.03.000034	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan antar provinsi berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	0

14	1.03.000039	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi.	0
15	1.03.000041	Berita Acara konsultasi publik I	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik I yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0
16	1.03.000042	Berita Acara konsultasi publik II	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik II yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0
17	1.03.000045	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	0
18	1.03.000046	Berita Acara rapat koordinasi/surat kesepkatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil rapat koordinasi antar provinsi yang berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	0
19	1.03.000056	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi.	0
20	1.03.000066	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	0

21	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	0
22	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	0
23	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	0
24	1.03.000073	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah terkait drainase perkotaan yang disusun	0
25	1.03.000074	Dokumen kebijakan PERDA/PERGUB selain RTRW Provinsi	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Provinsi.	0
26	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	0
27	1.03.000082	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR/RDTR Provinsi dikhususkan untuk Daerah Khusus Jakarta	0
28	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	0

29	1.03.000085	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0
30	1.03.000086	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0
31	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	3
32	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0
33	1.03.000090	Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0
34	1.03.000099	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Dokumen	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.	0

35	1.03.000100	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Dokumen	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.	0
36	1.03.000101	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.	0

37	1.03.000102	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Dokumen	&Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.&	0
38	1.03.000105	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	dihapus sesuai PP 21/2021	0
39	1.03.000106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Provinsi adalah penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur (PP	0
40	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	1

41	1.03.000108	Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
42	1.03.000113	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Raja-Raja Mataram di Imogiri yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
43	1.03.000118	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
44	1.03.000122	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
45	1.03.000123	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Manoreh yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
46	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0

47	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0
48	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0
49	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
50	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0
51	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
52	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0

53	1.03.000142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air - Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air	1
54	1.03.000144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	1
55	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	1
56	1.03.000148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	0
57	1.03.000149	Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen rencana induk pada ruang strategis kasultanan dan kadipaten adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan ruang pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis terkait dengan kasultanan dan kadipaten di daerah istimewa yogyakarta (diy).	0
58	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	0
59	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	1

60	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	1
61	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0
62	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0
63	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	8
64	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
65	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
66	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	0
67	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
68	1.03.000184	Dokumen tentang pengelolaan kawasan khusus	Dokumen	Laporan/Naskah Dinas/Catatan Resmi/Hasil kajian terkait pengelolaan kawasan khusus	0

69	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	0
70	1.03.000192	Flyover	Flyover	Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll	0
71	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	1
72	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0
73	1.03.000222	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkaiat Penetapan Kawasan Hutan	Dokumen	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan.	1
74	1.03.000223	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkaiat Penetapan Kawasan Hutan dalam RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan.	1

75	1.03.000224	Keterangan Kesesuaian Substansi	Dokumen	Surat keterangan kesesuaian substansi berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Raperda/Raperkada tentang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota/RDTR Kabupaten/Kota dari Kementerian ATR/BPN yang telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses Persub. Surat dimaksud ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat pada Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I/II.	0
76	1.03.000229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	0
77	1.03.000230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	0
78	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0
79	1.03.000233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0
80	1.03.000238	Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Kab/Kota dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	0
81	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0.2543
82	1.03.000247	Panjang Breakwater	KM	Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam/memecah daya rusak gelombang/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang breakwater yang dibangun	0.0265

83	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	0.41
84	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0
85	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi.	0
86	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.	0
87	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.	0
88	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	16,465
89	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0
90	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	0

91	1.03.000262	Pemberian Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Rekomendasi pemberian disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	0
92	1.03.000263	Pemberian Insentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Rekomendasi pemberian insentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	0
93	1.03.000273	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Orang	Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	0
94	1.03.000277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi hasil penyempurnaan oleh Pemda Provinsi dengan DPRD Provinsi yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi.	0
95	1.03.000282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Provinsi.	0
96	1.03.000283	Persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan	Dokumen	Surat persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan.	1
97	1.03.000284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	Peta digital dalam bentuk format shapefile (shp) yang diunggah dalam bentuk link google drive.	0
98	1.03.000291	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah mencakup muatan pengaturan perairan pesisir beserta lampiran (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy	Dokumen	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah mencakup muatan pengaturan perairan pesisir beserta lampiran (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy	1
99	1.03.000295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	Notulensi Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	0

100	1.03.000297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	0
101	1.03.000302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Provinsi	0
102	1.03.000305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	0
103	1.03.000308	Rumah Negara	Rumah Negara	Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri.	0
104	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.	0
105	1.03.000310	Rumah Tangga yang disediakan Prasarana Cubluk	Rumah Tangga	Rumah tangga yang dilengkapi dengan prasarana cubluk adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik berupa cubluk. Cubluk merupakan lubang galian sederhana yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengolahan awal air limbah.	0
106	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun	0
107	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0
108	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	0
109	1.03.000339	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota	0

110	1.03.000340	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi	Dokumen	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi	0
111	1.03.000343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan di tanda tangani oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	0
112	1.03.000344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur, dan surat permohonan fasilitasi Ranperkada RDTR yang ditujukan kepada Gubenur.	0
113	1.03.000346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Provinsi ditandatangani oleh Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri	0
114	1.03.000348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	0
115	1.03.000349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan substansi di tanda tangani Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	0
116	1.03.000353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di tandatangani oleh Gubernur	0
117	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan /Tunnel	Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan b. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan	0

118	1.03.000364	Underpass	Underpass	jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll	0
119	1.03.000376	Fasilitas Penunjang SPA	Paket	Fasilitas penunjang SPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di SPA	0
120	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS	0
121	1.03.000380	Fasilitas Penunjang TPS-3R	Paket	Fasilitas penunjang TPS 3R adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS 3R	0
122	1.03.000381	Fasilitas Penunjang TPST	Paket	Fasilitas penunjang TPST adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPST	0
123	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	0
124	1.03.000385	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi ahli.	10
125	1.03.000389	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau bekerja pada kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0
126	1.03.000390	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud)) 2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya	0
127	1.03.000391	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya	0

128	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011	0
129	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0
130	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan	0
131	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0
132	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)	0
133	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0
134	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB.	0
135	1.03.000402	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan adalah kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, serta pemanfaatan.	0

136	1.03.000403	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	0
137	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah	0
138	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0
139	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0
140	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0
141	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0
142	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	5
143	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	0

144	1.03.000416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau produk konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0
145	1.03.000420	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0
146	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.	0
147	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	0
148	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	0
149	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	Skema KPDBU mencakup Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.	0
150	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	0

151	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	0
152	1.03.000432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli.	1
153	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	0
154	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	1
155	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	1
156	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	1
157	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	1
158	1.03.000440	Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi	Dokumen	Diubah menjadi &Jakstrada Persampahan Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan	1
159	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	0

160	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Kajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013	0
161	1.03.000445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	5
162	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	0
163	1.03.000450	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung	0
164	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	0
165	1.03.000453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pembokaran Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya diantaranya adalah dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dan dokumen pelaksanaan pembongkaran	0

166	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.	0
167	1.03.000456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pegawasan Pembangunan Gedung adalah terkait Laporan pengawasan dari konsultan MK/ supervisi yang dilaporkan setiap bulan	11
168	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau	6

169	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0
170	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0
171	1.03.000461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	11
172	1.03.000465	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi kebijakan khusus, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.	1
173	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi yang disusun	0
174	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	0
175	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0

176	1.03.000471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0
177	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur	0
178	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	1
179	1.03.000476	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan adalah salah satu perencanaan umum penyelenggaraan PSP yang memuat rencana: a. daerah b. kebutuhan dan tingkat c. penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta dan d. tahapan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013	0
180	1.03.000477	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0

181	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak	0
182	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen yang berisi tentang kapasitas air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum	1
183	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.	6
184	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	0
185	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	Dokumen roadmap sanitasi Provinsi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.	1
186	1.03.000487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.	0
187	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi	0

188	1.03.000491	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	0
189	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Ahli paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	0
190	1.03.000496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	9
191	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	0
192	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/ Kota	1. Bimbingan Teknis Dan Pengawasan & Evaluasi PP 16/2021 2. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara 3. Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara	0
193	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik	0
194	1.03.000503	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	Dokumen kajian naskah akademis penyusunan regulasi persampahan merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan persampahan	0
195	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	0
196	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	1

197	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	1
198	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	1
199	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan	0
200	1.03.000511	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan	Lembaga	Lembaga sistem pengelolaan persampahan adalah penyelenggara pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah/pokja/pengelola pihak ketiga yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	0
201	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0
202	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0

203	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	0
204	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	1
205	1.03.000522	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.	0
206	1.03.000523	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Insentif	Orang	Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.	0
207	1.03.000524	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi khusus.	0
208	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	1
209	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	4
210	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	0

211	1.03.000532	Jumlah Prasarana dan Saran Pendukung SPALD Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	0
212	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	0
213	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0
214	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0
215	1.03.000539	Jumlah Rumah Negara	Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi rumah negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0
216	1.03.000540	Jumlah Rumah Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi rumah negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0
217	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	0

218	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&	0
219	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0
220	1.03.000546	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	Sarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah	0
221	1.03.000548	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	Sarana pewadahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis sampah	0
222	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)	0
223	1.03.000551	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	SDM pelaksana penyelenggara sistem pengelolaan persampahan merupakan SDM pada lembaga sistem pengelola persampahan yang terdiri dari pemerintah daerah maupun operator pengelola persampahan	0
224	1.03.000554	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	Panjang seawall yang ditingkatkan	0

225	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan mengacu pada total keseluruhan sistem drainase yang ada di suatu wilayah perkotaan. Sistem drainase perkotaan sendiri adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan saluran dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir atau genangan akibat hujan, dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran-saluran tersebut.	0
226	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
227	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
228	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
229	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	SPA (Stasiun Peralihan Antara) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kab/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah	0
230	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
231	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli yang mencakup jenjang 7, 8, dan 9 di wilayah kewenangannya	2623
232	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	0
233	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	M^3/Hari	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0
234	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	M^3/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0
235	1.03.000585	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA untuk menampung dan mengelola sampah dengan satuan ton per hari	0

236	1.03.000587	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari	0
237	1.03.000589	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0
238	1.03.000591	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung	0
239	1.03.000593	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0
240	1.03.000595	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0
241	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0
242	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0

243	1.03.000598	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0
244	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0
245	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin/krib, atau revetment dari susunan batu	0
246	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	620.76
247	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0
248	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÂ³/Hari	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan MÂ³	0
249	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	0

250	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	0
251	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0
252	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14)	0
253	1.03.000618	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan regulasi tarif	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan regulasi tarif air limbah melalui Peraturan Daerah	0
254	1.03.000619	Jumlah Kab/Kota yang menyusun regulasi tata kelola air limbah domestik	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun regulasi tata kelola air limbah domestik melalui PERDA/ PERKADA	0

255	1.03.000620	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
256	1.03.000621	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
257	1.03.000622	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
258	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	1
259	1.03.000624	Jumlah Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU) Konversi sambungan rumah adalah 1SR= 4 jiwa	670
260	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
261	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0
262	1.03.000635	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya	kabupaten/ kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
263	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	0

264	1.03.000637	Pembangunan Bendungan	Bendungan	Merupakan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi yang berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Pembangunan bendungan meliputi tubuh bendungan, saluran dan bangunan pengelak (terowongan atau konduit), bangunan pelimpah (spillway), dan bangunan pelengkap lainnya seperti bangunan pengambilan dan peralatan hidromekanikal. Jumlah bendungan yang dibangun Kriteria bendungan: 1. bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari pondasi terdalam 2. bendungan dengan tinggi 10-15 meter diukur dari pondasi terdalam dengan ketentuan: a. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter b. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter atau c. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 m3/detik 3. bendungan yang mempunyai kesulitan	0
265	1.03.000638	Rehabilitasi Bendungan	Unit	Jumlah bendungan yang direhabilitasi, dapat berupa perbaikan sebagian ataupun menyeluruh satu kesatuan bangunan bendungan Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi bendungan untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Bagian yang direhabilitasi dapat hanya berupa perbaikan sebagian (tubuh bendungan saja atau bangunan pelengkap saja) ataupun perbaikan menyeluruh (tubuh bendungan beserta bangunan pelengkapnya). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan	0
266	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	0
267	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung	0
268	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dibangun. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka, seperti saluran tanah terbuka, atau saluran yang diperkuat (di-lining) dengan beton atau pasangan batu. Dapat juga berupa saluran tertutup (terowongan atau konduit).	0.25
269	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	0

270	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau/situ)	0
271	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang dibangun	0
272	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
273	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi	0
274	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi Jumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
275	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0
276	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
277	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0

278	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	0
279	1.03.000653	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0
280	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
281	1.03.000655	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
282	1.03.000656	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
283	1.03.000657	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	Jumlah sistem polder yang dibangun	0
284	1.03.000658	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang dibangun	0
285	1.03.000659	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	Jumlah polder yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
286	1.03.000660	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
287	1.03.000661	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang dibangun	0
288	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
289	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Jumlah check dam yang dibangun	0
290	1.03.000664	Panjang Pebangunan Seawall	Km	Panjang seawall yang dibangun	0.0265
291	1.03.000665	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	Panjang seawall yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
292	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
293	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0
294	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0
295	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	0
296	1.03.000670	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir yang ditingkatkan	0

297	1.03.000671	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	&Pekerjaan peningkatan kanal banjir dapat berupa: 1. peningkatan jenis konstruksi, seperti tanggul tanah menjadi tanggul beton 2. penambahan panjang kanal karena area yang akan dilindungi bertambah& Panjang kanal banjir yang ditingkatkan	0
298	1.03.000672	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan kapasitasnya	0
299	1.03.000673	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	jumlah polder yang ditingkatkan	0
300	1.03.000674	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang ditingkatkan	0
301	1.03.000675	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang ditingkatkan	0
302	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang ditingkatkan	0
303	1.03.000677	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang ditingkatkan	0
304	1.03.000678	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	0
305	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan	0
306	1.03.000680	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	Jumlah danau yang direvitalisasi	0
307	1.03.000681	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	Jumlah situ yang direvitalisasi	0
308	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	Jumlah tampungan air lainnya yang direvitalisasi	0
309	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	16,465
310	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	0
311	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	0
312	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	0
313	1.03.000688	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	Cekungan/tampungan air yang terbentuk secara alami. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai	0
314	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	0
315	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0

316	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0
317	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0
318	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0
319	1.03.000695	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0
320	1.03.000696	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0
321	1.03.000697	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	Jumlah polder yang dioperasikan dan dipelihara	0
322	1.03.000698	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	&Jumlah kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai.&	0
323	1.03.000699	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah bangunan sabo yang dipelihara	0
324	1.03.000700	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang dipelihara	0
325	1.03.000701	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang dipelihara	0
326	1.03.000702	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	Panjang seawall yang dipelihara	0
327	1.03.000703	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	0
328	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	0
329	1.03.000705	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0
330	1.03.000706	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun	0
331	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	0
332	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun	0
333	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0
334	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0
335	1.03.000711	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan	0

336	1.03.000712	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan	0
337	1.03.000713	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0
338	1.03.000714	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0
339	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
340	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
341	1.03.000717	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
342	1.03.000718	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
343	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
344	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
345	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0
346	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0
347	1.03.000723	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	0
348	1.03.000724	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	0
349	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0
350	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0
351	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	0
352	1.03.000728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	Jumlah alokasi air di Daerah irigasi yang diberikan	0
353	1.03.000729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0
354	1.03.000730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0

355	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
356	1.03.000732	Penyusunan Jumlah Dokumen Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0
357	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	0
358	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan	0
359	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	0
360	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	m^3/detik	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	0
361	1.03.000737	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0
362	1.03.000738	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	Jumlah Situ yang dioperasikan dan dipelihara	0
363	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	0
364	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	0
365	1.03.000742	Jumlah kawasan rawa	Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang akan dikoordinasikan, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa	0
366	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara	0
367	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	0
368	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0
369	1.03.000747	.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	0
370	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	0

371	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0
372	1.03.000750	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit SPAM	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
373	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia	0
374	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	0

375	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi : a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia	0
376	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia	0
377	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
378	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	0

379	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0
380	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0
381	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0
382	1.03.910114	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	0
383	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	24121
384	1.03.910118	Jumlah perjanjian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perjajian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota yang penyusunannya difasilitasi Pemerintah Provinsi	0
385	1.03.910119	Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	kabupaten/ kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dari pemerintah provinsi	0
386	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	0
387	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0

388	1.03.910124	Jumlah perjanjian kerja sama SPALD lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perjajian kerja sama SPALD lintas Kabupaten/Kota yang penyusunannya oleh Pemerintah Provinsi dan/atau penyusunannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi	0
389	1.03.910125	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pembinaan SPALD	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota Yang telah mendapatkan pembinaan pengembangan SPALD	0
390	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0
391	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	0
392	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.	0

393	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan b. meminta c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang d. memasuki tempat atau lokasi e. f. membuat rekaman audio g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana h. menghentikan pelanggaran dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.	0
394	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan adalah laporan yang disusun untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kawasan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengawasan dan penilaian dalam penyelenggaraan penataan ruang, memastikan bahwa pengembangan kawasan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.	1
395	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang adalah laporan yang disusun untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi standar pelayanan minimal (spm) yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang penataan ruang.	0
396	1.03.910133	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0
397	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	Rekomendasi atas fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi adalah saran atau arahan yang diberikan oleh forum penataan ruang di tingkat provinsi kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien. Forum penataan ruang sendiri merupakan wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	2

398	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang adalah situasi di mana terdapat dugaan atau tanda-tanda bahwa penggunaan ruang atau lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	0
399	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	Berita acara penyelesaian sengketa penataan ruang adalah dokumen resmi yang mencatat secara rinci proses dan hasil penyelesaian sengketa terkait penataan ruang antara pihak-pihak yang bersengketa.	0
400	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	Dokumen hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang (rtr) adalah laporan evaluatif yang disusun untuk menilai sejauh mana implementasi rtr telah tercapai dalam kurun waktu tertentu, biasanya lima tahun sejak rencana tersebut diimplementasikan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, memastikan bahwa pengembangan wilayah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	0
401	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Laporan resmi yang disusun oleh instansi terkait untuk menilai apakah suatu kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengawasan dalam penataan ruang, memastikan bahwa pemanfaatan lahan dan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan peraturan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.	0
402	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	Laporan penyebarluasan informasi rencana tata ruang adalah dokumen resmi yang mencatat kegiatan penyebaran informasi terkait rencana tata ruang kepada masyarakat.	0
403	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	Layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa rencana pemanfaatan ruang oleh individu atau entitas sesuai dengan rencana tata ruang (rtr) yang telah ditetapkan. Kkpr berfungsi sebagai persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang sebelumnya.	0

404	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	Layanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menilai dan memastikan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh individu atau entitas sesuai dengan rencana tata ruang (rtr) yang berlaku.	0
405	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyusunan rencana tata ruang (rtr) kepada kabupaten/kota adalah dokumen resmi yang mencatat pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh pemerintah provinsi atau pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan rtr.	1
406	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah (rtrw) dan rencana detail tata ruang (rdtr) kabupaten/kota adalah laporan resmi yang disusun oleh instansi terkait untuk memantau dan menilai proses penyusunan serta penetapan rtrw dan rdtr di tingkat kabupaten/kota.	1
407	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita acara pembahasan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten/kota adalah dokumen resmi yang mencatat hasil rapat koordinasi dan pembahasan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan berbagai pemangku kepentingan terkait mengenai rancangan rtrw.	1
408	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat hasil fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) rencana detail tata ruang (rdtr) kabupaten/kota adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh gubernur sebagai hasil dari proses fasilitasi terhadap ranperkada rdtr yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota.	1
409	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang (fpr) adalah dokumen resmi yang mencatat berbagai aktivitas dan peran yang telah dijalankan oleh fpr dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa fpr telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan.	0
410	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	Sistem informasi penataan ruang (sipr) adalah platform berbasis web yang dirancang untuk menampilkan informasi tata ruang melalui peta digital interaktif.	1

411	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang adalah dokumen resmi yang disusun oleh instansi pemerintah terkait, seperti kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), yang berisi pedoman, prosedur, dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang di indonesia.	1
412	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat adalah serangkaian upaya yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan penataan ruang.	0
413	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	Sumber daya manusia (sdm) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah individu-individu dalam suatu organisasi yang telah mengikuti program terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan.	0
414	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	Data shp (shapefile) peta dasar adalah format data vektor yang digunakan dalam sistem informasi geografis (sig) untuk menyimpan dan merepresentasikan fitur-fitur geografis dasar beserta atributnya.	1
415	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	Publikasi informasi penataan ruang adalah proses penyebaran data dan pengetahuan terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kepada masyarakat luas.	0
416	1.03.910154	Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen ini mencatat berbagai kegiatan pendampingan teknis yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan rtrw dan rdtr. Tujuan utama dari laporan ini adalah memastikan bahwa penyusunan rencana tata ruang di tingkat daerah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, serta terintegrasi dengan rencana tata ruang di tingkat provinsi dan nasional.	1
417	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi	0
418	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	...	0
419	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.	0

420	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	Total unit rumah yang memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti kementerian kesehatan republik indonesia. Rumah sehat adalah tempat tinggal yang dirancang dan dipelihara sedemikian rupa sehingga mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial penghuninya.	0
421	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	0
422	1.03.910173	Dokumen pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen Fasilitasi atas Penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kot	0
423	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0
424	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	2
425	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0
426	1.03.910182	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	0
427	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	0
428	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	0
429	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	0

430	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah	0
431	1.03.910187	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	Sarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	0
432	1.03.910188	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	Sarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindi	0
433	1.03.910189	Jumlah Masyarakat	Orang	Masyarakat adalah orang/individu/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0

434	1.03.910191	Jumlah dokumen legal yang disahkan	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RTBL yang disahkan sebagai Pergub/Perbub/Perwal menjadi dokumen rujukan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dan aturan pemanfaatan tata ruang. Kawasan Sistem Perkotaan berdasarkan kewenanagan Pemerintah Provinsi (Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Kegiatan Lokal) atau Pusat Kegiatan Wilayah yang diusulkan Provinsi serta kawasan strategis lainnya yang memegang peranan penting skala provinsi yang belum	0
435	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.	0
436	1.03.910193	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan di awasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten/ Kota	Berapa banyak Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi dalam pemngembangan dan pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS meliputi: a. bantuan teknis dan non teknis penyiapan regulasi dan kebijakan turunan (NSPK) b. bantuan teknis dan non teknis untuk penyiapan perencanaan c. koordinasi penyelenggaraan dalam pembinaan dan pengawasan persampahan d. diseminasi peraturan daerah dan turunannya di bidang penyelenggaran persampahan e. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota terkait pengelolaan persampahan f. pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan g. pendataan kinerja fasilitas pengolahan sampah baik dalam SIPSN maupun platform lainnya	0

437	1.03.910194	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	TPA	Berapa banyak TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi meliputi: a. Operasional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS b. Operator atau penyelenggara di setiap fasilitas pengelolaan persampahan	0
438	1.03.910195	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0
439	1.03.910196	Kapasitas TPA terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0
440	1.03.910197	Fasilitas penunjang TPA	Paket	Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA	0
441	1.03.910198	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0
442	1.03.910199	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0
443	1.03.910200	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0
444	1.03.910201	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0
445	1.03.910205	Jumlah TPA	Unit	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan	0
446	1.03.910207	Jumlah KK terlayani	KK	Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluarga	0
447	1.03.910208	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi infrastruktur pengelolaan sampah yaitu TPA, TPST, SPA, TPS-3R dan/atau TPS	0
448	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya	0
449	1.03.910210	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.	0

450	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	0
451	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	0
452	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	1
453	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0
454	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang	Ketersediaan pengelola teknis merujuk pada jumlah atau keberadaan tenaga teknis perangkat daerah yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan bangunan gedung negara (bgn).	0

455	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/ UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan	0
456	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)	1
457	1.03.910218	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya: pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya. (UU Nomor 11 Tahun 2010)	0

458	1.03.910219	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata. (UU Nomor 10 Tahun 2009)	0
459	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	0
460	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0
461	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0
462	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	0
463	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.â€‹	0
464	1.03.910232	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Dokumen	Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara	0

465	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/ UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan	0
466	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.	0
467	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan	0
468	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	0
469	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerinta h Daerah	M2	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	0

470	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya	0
471	1.03.910241	Dokumen RTBL di Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RTBL yang disahkan sebagai Pergub/Perbub/Perwal menjadi dokumen rujukan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dan aturan pemanfaatan tata ruang. Kawasan Sistem Perkotaan berdasarkan kewenanagan Pemerintah Provinsi (Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Kegiatan Lokal) atau Pusat Kegiatan Wilayah yang diusulkan Provinsi serta kawasan strategis lainnya yang memegang peranan penting skala provinsi yang belum	0
472	1.03.910242	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kabupaten/ Kota	Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota dan merekapitulasi Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan	0
473	1.03.910243	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan per Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dalam periode satu tahun	0
474	1.03.910252	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat berupa: 1. Anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398); atau 2. Aerob	0
475	1.03.910253	Kapasitas Intalasi Pengolahan Air Limbah Domestik(IPALD)/ sub-sistem pengolahan terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD/sub-sistem pengolahan terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPALD tiap harinya dalam satuan M3	0

476	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi	0
477	1.03.910255	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0
478	1.03.910256	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja	0
479	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Dokumen Penetapan Kawasa Strategis Provinsi	0
480	1.03.910267	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0
481	1.03.910269	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pembinaan SPALD	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota Yang telah mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD	7

Bidang Urusan: Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	-
2	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	-
3	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	-
4	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	-
5	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang berkomitmen menerima bantuan	0
6	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	0
7	1.04.000012	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0
8	1.04.000013	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	0
9	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana provinsi.	-
10	1.04.000017	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pemberian subsidi uang sewa korban bencana provinsi.	-
11	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana provinsi.	-
12	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana provinsi.	-
13	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	-
14	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
15	1.04.000031	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pre test dan post test peserta keluarga pada kegiatan Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.	0
16	1.04.000033	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	Dokumen yang menyatakan terjadinya Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan mitra untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan provinsi. Dokumen dapat berupa: MoU atau Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, surat pernyataan atau surat keterangan	-
17	1.04.000041	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	-

18	1.04.000043	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	-
19	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0
20	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	-
21	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	-
22	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit	0
23	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit	0
24	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit	0
25	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit	0
26	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit	0
27	1.04.000056	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang moda transportasi dan identifikasi melalui citra satelit	0

28	1.04.000057	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang aksesibilitas dan identifikasi melalui citra satelit	0
29	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit	0
30	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	0
31	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	0
32	1.04.000062	Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	0
33	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1
34	1.04.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	I. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kabupaten yang mengurusu perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun. III. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun IV. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah ke Pemerintah Pusat minimal 1 kali dalam 1 tahun	0
35	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan meliputi: a. hak keperdataan masyarakat terdampak, b. kondisi ekologis lokasi, dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.	0
36	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	-

37	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi.	-
38	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	0
39	1.04.000077	Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari	0
40	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	-
41	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0
42	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan: 1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan 2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan 3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	-
43	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani	-
44	1.04.000086	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	-
45	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	-
46	1.04.000091	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan: 1. Jumlah penerima bantuan 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Kesepakatan koordinasi	0

47	1.04.000093	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Laporan	(musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang memuat: 1. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 2. Identifikasi tingkat kerusakan rumah 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	-
48	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan	0
49	1.04.000096	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	2
50	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	-
51	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0
52	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. Penanganan kumuh dilakukan pada kawasan kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha baik yang berada di lintas kabupaten/kota ataupun dalam satu kabupaten/kota dan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (2) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), serta (3) Revitalisasi rumah susun, dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	5
53	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.	-
54	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-
55	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman, dengan penjelasan daftar lokasi permukiman tsb.	-

56	1.04.000117	Lokasi Rawan Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
57	1.04.000118	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik BUMD yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan	0
58	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal	0
59	1.04.000121	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan	0
60	1.04.000125	Luas Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Ha	Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
61	1.04.000127	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Ha	Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
62	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.	5
63	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	0
64	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana	0
65	1.04.000143	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	Perkiraan harga beli tanah adalah penilaian harga beli tanah berdasarkan nilai NJOP dan harga pasar yang melibatkan appraisal dalam prosesnya.	0
66	1.04.000144	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	Daftar jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	-
67	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	-
68	1.04.000148	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	-
69	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Permukiman	1
70	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	0
71	1.04.000159	Rumah Khusus	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	-

72	1.04.000161	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Korban Bencana Provinsi dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi	2
73	1.04.000163	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Provinsi dan dilaksanakan untuk relokasi yang berdampak masif, untukmemenuhi kekurangan rumah sewa eksisting (lebih dari 50 unit) dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi	-
74	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa total jumlah unit rumah yang akan ditangani	0
75	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang belum tertangani	0
76	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang sudah ditangani	0
77	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	0
78	1.04.000174	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana.	0
79	1.04.000176	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana.	0
80	1.04.000178	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.	0
81	1.04.000180	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan. OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah provinsi. Apabila aset rusun atau rusus milik pemerintah kab/kota maka pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk OP	-
82	1.04.000182	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	Data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau	-
83	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	-
84	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi	99

85	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi	99
86	1.04.000189	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana.	0
87	1.04.000192	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman	Unit Rumah	Jumlah rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU Permukiman.	-
88	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya	-
89	1.04.000197	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.	-
90	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	-
91	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana.	0
92	1.04.000202	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah di bawah 5%, tidak berdampak pada komponen struktural maupun non-struktural.	-
93	1.04.000205	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya.	1
94	1.04.000213	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	-
95	1.04.000214	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	-
96	1.04.000215	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	-
97	1.04.000220	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	-
98	1.04.000224	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi. Subsidi uang sewa diberikan untuk masyarakat yang tidak memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan serta tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak.	-
99	1.04.000226	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi dengan penggantian hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan hasil penilaian tim appraisal	-
100	1.04.000228	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk penanganan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi.	-

101	1.04.000230	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen	I. Gubernur menetapkan/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Kepala Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah V. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah VI. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanaan klarifikasi dan konfirmasi hasil Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah VII. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menyusun Berita acara hasil penilaian Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman serta melakukan registrasi dengan memberikan nomor registrasi pengembang perumahan VIII. Kepala Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menerbitkan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dan menyampaikan kepada Gubernur minimal 1 kali dalam 1 tahun IX. Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dan menyampaikan kepada Gubernur minimal 1 kali dalam 1 Tahun X. Gubernur menerima laporan kegiatan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dari Dinas Provinsi dan Kualifikasi kecil dari Bupati/Walikota XI. Gubernur melaporkan kegiatan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dan Kecil kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang membidangi Perumahan dan Permukiman).	-
102	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	-
103	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	-
104	1.04.000239	Jumlah kabupaten/kota pelaksana Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten /Kota	Jumlah kabupaten/kota yang membuat, mengembangkan, dan mengelola Sistem Informasi untuk Layanan Publik dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
105	1.04.000244	Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU	Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU	-
106	1.04.000247	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP	0
107	1.04.000252	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Daftar penerima penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi yang memuat data BNBA (SK penerima penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan)	0
108	1.04.000253	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima	Orang	Jumlah warga berpenghasilan rendah yang berhak (sesuai ketentuan Permen PUPR 29/2018) yang telah menerima bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh kewenangan provinsi	-
109	1.04.000255	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Orang	Jumlah orang berpenghasilan rendah yang berhak menerima bantuan penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh kewenangan provinsi.	-
110	1.04.000257	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Masyarakat terdampak Bencana Provinsi	Orang	Daftar penerima bantuan subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak bencana provinsi yang memuat data BNBA (SK Penerima bantuan subsidi uang sewa)	0

111	1.04.000260	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program	Orang	Daftar penerima bantuan subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak relokasi program provinsi yang memuat data BNBA (SK penerima bantuan subsidi uang sewa)	0
112	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh sesuai kewenangan	-
113	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	-
114	1.04.000266	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis prasarana antara lain: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), sistem penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran.	-
115	1.04.000267	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah prasarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis prasarana antara lain: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), sistem penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran.	-
116	1.04.000268	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman	Unit	Daftar PSU Permukiman yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.	-
117	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi	0
118	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer	0
119	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0
120	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	0
121	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer	0
122	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.	-
123	1.04.000283	Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangannya yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Pengadaan lahan termasuk pematangan lahan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (3) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta relokasi/pemukiman kembali, (4) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	-

124	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Peremajaan dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta peremajaan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, dan (3) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) dalam rangka Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	-
125	1.04.000287	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang direncanakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	-
126	1.04.000288	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	-
127	1.04.000291	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	-
128	1.04.000292	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	-
129	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	-
130	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	0
131	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	Laporan kegiatan sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat terdiri dari: 1. KAK/TOR kegiatan 2. RAB kegiatan 3. Hasil pelaksanaan kegiatan 4. Dokumentasi kegiatan	0
132	1.04.000299	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada perumahan yang telah tertangani atas dampak bencana provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan yang telah tertangani atas dampak bencana provinsi yang menjelaskan: 1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan 2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan 3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	-
133	1.04.000300	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman	Laporan	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	-
134	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pembagian Rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	-

135	1.04.000304	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi yang memuat: 1. Penjelasan program provinsi yang berdampak pada relokasi rumah 2. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 3. Identifikasi masyarakat terdampak yang memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang tidak memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan 4. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	-
136	1.04.000306	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru 3. Siteplan, DED, dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	0
137	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	-
138	1.04.000319	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	Jumlah rumah yang dibangun bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH	0
139	1.04.000321	Rumah pada Lokasi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah Rumah pada Lokasi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah provinsi. Apabila aset rusun atau rusus milik pemerintah kab/kota maka pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk OP	-
140	1.04.000322	Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Mengikuti kegiatan (sosialisasi/ seminar/ diskusi warga, dsb) untuk Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah sesuai kewenangan.	0
141	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah tanah dan/atau bangunan milik bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan merujuk pada total unit tanah dan/atau bangunan yang merupakan bagian bersama dari suatu rumah susun (rusun) yang dikelola untuk operasional serta pemeliharaan secara berkala atau berkelanjutan.	-
142	1.04.000329	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas (psu) pendukungnya yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan merujuk pada total unit rumah khusus yang telah dibangun dengan tujuan tertentu (seperti untuk masyarakat terdampak bencana, nelayan, atau pekerja di daerah terpencil) yang dikelola dalam hal operasional serta pemeliharaan, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas pendukungnya.	-
143	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen	Peta lokasi dan delineasi kawasan permukiman kumuh adalah representasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan lokasi serta batasan (delineasi) dari suatu wilayah yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh berdasarkan kriteria tertentu	-
144	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah data dan profil permukiman kumuh merujuk pada total jumlah informasi yang terdokumentasi mengenai kawasan permukiman kumuh dalam suatu wilayah, termasuk karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi dari kawasan tersebut	-

145	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh adalah data yang mencatat total unit rumah yang berada di wilayah permukiman kumuh serta kondisi fisiknya. Data ini mencakup kelayakan huni, kualitas bangunan, kepadatan hunian, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, jalan, dan drainase.	-
146	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki â€œLack of Accessâ€ terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang tidak memenuhi akses terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh sesuai indikator penilaian kumuh.	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.05.000002	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
2	1.05.000003	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
3	1.05.000004	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
4	1.05.000005	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0

5	1.05.000010	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan mitigasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	120
6	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	120
7	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara Bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana berpotensi menjadi urusan provinsi	1
8	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1
9	1.05.000020	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
10	1.05.000021	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0

11	1.05.000022	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
12	1.05.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
13	1.05.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
14	1.05.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
15	1.05.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1

16	1.05.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
17	1.05.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1
18	1.05.000037	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Kegiatan bersama untuk menyusun tehnik atau cara Pencegahan Kejahatan	1
19	1.05.000039	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
20	1.05.000040	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
21	1.05.000041	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1

22	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
23	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Data yang memuat pelaksanaan kerjasama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Data ini dapat disajikan dengan memuat jumlah pelaksanaan rapat pembahasan kerjasama, atau jumlah daerah/lembaga/mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama, atau jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0
24	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
25	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
26	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0

27	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
28	1.05.000049	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
29	1.05.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
30	1.05.000051	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	1
31	1.05.000055	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas layanan Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana berupa laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan dukungan untuk kabupaten/kota (misal: prosedur dukungan sistem peringatan dini tsunami kabupaten/kota) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis)	1

32	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas layanan Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana berupa laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan dukungan untuk kabupaten/kota (misal: prosedur dukungan sistem peringatan dini tsunami kabupaten/kota) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis)	1
33	1.05.000061	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran adalah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
34	1.05.000062	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran adalah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
35	1.05.000067	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda, melalui proses Yustisi yang dilakukan oleh PPNS, melalui wadah Sekretariat PPNS	0
36	1.05.000068	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, yang disidangkan melalui Sidang di Tempat	0
37	1.05.000069	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, baik Acara Pemeriksaan Cepat maupun Acara Pemeriksaan Singkat	0

38	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi melalui penyusunan dokumen JITU PASNA dan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	2
39	1.05.000073	Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun	Dokumen	Program kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang telah di susun di Wilayah Provinsi	-
40	1.05.000074	Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Ditetapkan	Dokumen	Dokumen Program kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang telah di tetapkan di Wilayah Provinsi	-
41	1.05.000078	Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
42	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Provinsi merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas provinsi dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan provinsi	0
43	1.05.000084	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD provinsi bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	0
44	1.05.000085	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Evakuasi secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Data yang memuat jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi yang sesuai standar atau tidak sesuai standar, berdasarkan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
45	1.05.000086	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Data yang memuat jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatanyang sesuai standar atau tidak sesuai standar, berdasarkan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0

46	1.05.000087	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal	0
47	1.05.000095	Dokumen yang Memuat Data Dampak Kebakaran yang terintegrasi dan Valid	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	-
48	1.05.000096	Dokumen yang Memuat Data Kejadian Kebakaran yang terintegrasi dan Valid	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	-
49	1.05.000097	Dokumen yang Memuat Data Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	-
50	1.05.000104	Dokumen yang Memuat Laporan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Dokumen	Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi di Provinsi	-
51	1.05.000105	Dokumen yang Memuat Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Dokumen	Laporan Pengaduan pelanggaran Qanun dari masyarakat yang telah ditangani yang Bersifat Nonyustisi	-
52	1.05.000106	Dokumen yang Memuat Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Dokumen	Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Qanun non Yustisi	-
53	1.05.000107	Informasi Kebencanaan	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersusun berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan provinsi	0
54	1.05.000109	Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) merupakan serangkaian kegiatan untuk merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan desa atau kelurahan untuk melaporkan, mengakses, dan memantau informasi terkait insiden kebakaran dan penyelamatan secara online dan tanpa penggunaan dokumen fisik (paperless). Sistem ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi, pemantauan real-time, dan manajemen informasi kebakaran dan penyelamatan di tingkat lokal	-
55	1.05.000128	Laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	-

56	1.05.000129	Laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	-
57	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	1
58	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	1
59	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	1
60	1.05.000134	Laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	Berisi laporan hasil koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	0
61	1.05.000135	Laporan Hasil Pelaksanaan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan	Instruksi ygdilaksanakan dan dilakukan Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	-
62	1.05.000136	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan	Konsultasi yang telah di laksanakan Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	-
63	1.05.000140	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakanPolisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	-
64	1.05.000142	Laporan Hasil Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	-
65	1.05.000143	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pengawasan Qanun Syariat Islam	-

66	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	1
67	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1
68	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	1
69	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Gubernur	1
70	1.05.000176	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mentaati Qanun Syariat Islam	-
71	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0
72	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0
73	1.05.000184	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Laporan	Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	-
74	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	sosialisasi perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1
75	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	sosialisasi Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1
76	1.05.000191	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Laporan	Pelaksanaan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	-
77	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0

78	1.05.000195	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0
79	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menajdi kewenangan provinsi meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di tingkat provinsi	1
80	1.05.000199	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	Data yang memuat jumlah pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran meliputi pelaksanaan mengukur pencapaian kinerja dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran	0
81	1.05.000200	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	Data yang memuat jumlah pengawasan penyelenggaraan pencegahan kebakaran meliputi pelaksanaan mengukur pencapaian kinerja dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pencegahan kebakaran	0
82	1.05.000201	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Data yang memuat jumlah pengawasan penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran meliputi pelaksanaan mengukur pencapaian kinerja dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0
83	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana skala provinsi sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	1
84	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi aparatur provinsi dan kabupaten/kota untuk jenis bencana prioritas provinsi	-
85	1.05.000209	Laporan Pelaksanaan Pencarian Korban Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan pencarian korban Bencana skala provinsi sebagai upaya untuk mencari dan menolong korban bencana dari lokasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	1
86	1.05.000210	Laporan Pelaksanaan Pertolongan Korban Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan pertolongan korban Bencana skala provinsi sebagai upaya untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana dari lokasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	1

87	1.05.000211	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah penyakit yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	0
88	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Berisikan laoran hasil pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	1
89	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah orang/aparatur/personil yang tersedia untuk melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) untuk mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan kabupaten/kota dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana lintas kabupaten/kota	0
90	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	Merupakan penyediaan alat pelindung diri bagi aparat dan petugas penanggulangan bencana tingkat provinsi	1
91	1.05.000222	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau antar kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0
92	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana antar kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0
93	1.05.000226	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Provinsi untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan provinsi	0
94	1.05.000228	Sarana dan Prasarana Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	Unit	Data yang memuat jumlah unit Sarana dan Prasarana Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	0
95	1.05.000230	Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	Unit	Data yang memuat jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatanyang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	0
96	1.05.000231	Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	Unit	Data yang memuat jumlah unit Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatanyang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	0

97	1.05.000234	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
98	1.05.000235	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
99	1.05.000238	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
100	1.05.000256	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	0
101	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0
102	1.05.000258	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Lembaga	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0
103	1.05.000260	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0

104	1.05.000261	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	0
105	1.05.000262	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan penyediaan dokumen sah dan legal yang menggambarkan kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat provinsi, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan	0
106	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0
107	1.05.000269	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	Kegiatan Diklat atau Bimtek dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	100
108	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	0
109	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan dokumen hasil kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang menjadikan Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1
110	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan dan dalam pelaksanaannya PPNS dapat meminta bantuan POL PP maupun Kepolisian	0
111	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	1
112	1.05.000281	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras yang pemanfaatannya untuk Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti Penegakkan Perda	0
113	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0

114	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0
115	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
116	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
117	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
118	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	0
119	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	100
120	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	0

121	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	1
122	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	0
123	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	1
124	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	Laporan pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah yang memuat : 1. Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas 2. Capaian pemenuhan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1
125	1.05.000295	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	0
126	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota	0
127	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	0
128	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
129	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
130	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	0

131	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
132	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
133	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0
134	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0
135	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0

136	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0
137	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten /Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP	0
138	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
139	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
140	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	1
141	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	1
142	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	-

143	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0
144	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).	0
145	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat	0
146	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	-
147	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	-

148	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	-
149	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
150	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	0
151	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0

152	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
153	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
154	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
155	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
156	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
157	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0

158	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
159	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	-
160	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0
161	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0
162	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0
163	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0

164	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
165	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	0
166	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0
167	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	1
168	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	0
169	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	1

170	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	1
171	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	0
172	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).	1
173	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	0

174	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0
175	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti	Orang	Alat bantu yang diterima oleh lanjut usia terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	4
2	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	Alat bantu yang diterima oleh penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	12
3	1.06.000004	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas.	0
4	1.06.000005	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	0
5	1.06.000006	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	0
6	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	2
7	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	2
8	1.06.000012	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan layanan pengasuhan berupa upaya pemenuhan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut	3
9	1.06.000013	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	2
10	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2
11	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	595
12	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti berupa wali yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak	5
13	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	595
14	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	310

15	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	Anak yang mendapatkan fasilitasi pengangkatan anak berupa perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat	3
16	1.06.000027	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal	Orang	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda	0
17	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan kendaraan panti sosial gelandangan dan pengemis.	1
18	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1
19	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	1
20	1.06.000035	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas Anak	0
21	1.06.000036	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	0
22	1.06.000037	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	0
23	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0
24	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	10
25	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	10
26	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	10
27	1.06.000049	Gelandangan dan pengemis yang tmendapat Fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Surat Nikah	0
28	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	10
29	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	Orang	Jumlah instruktur yang memberikan bimbingan keterampilan dasar	0

30	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8150
31	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	Jumlah keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	0
32	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	Fasilitasi pengentasan fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	8540
33	1.06.000060	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar	1
34	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	1
35	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	1
36	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis	1
37	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1
38	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1
39	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	0
40	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	100
41	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	100
42	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	100

43	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	100
44	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	0
45	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Lanjut usia telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	103
46	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1
47	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	1
48	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1
49	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	103
50	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	103
51	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	110
52	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Provinsi	0
53	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	390
54	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	2

55	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	2
56	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	24
57	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	&Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	2
58	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	2
59	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota	0
60	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	0
61	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial gelandangan dan pengemis	0
62	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	0
63	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	0
64	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	0

65	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	Pelaksanaan pemulasaraan sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar di dalam panti	2
66	1.06.000114	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	0
67	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	3
68	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	3
69	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	1
70	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1
71	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	65
72	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	65
73	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	65
74	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	0
75	1.06.000141	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	0
76	1.06.000142	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Akta Kelahiran	0

77	1.06.000143	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Kartu Identitas Anak	0
78	1.06.000144	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	0
79	1.06.000145	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0
80	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	&Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	0
81	1.06.000147	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDSyang mendapat fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Surat Nikah	0
82	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDSyang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS di dalam panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0
83	1.06.000149	PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0
84	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1
85	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial anak terlantar	1
86	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	1
87	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial lanjut usia terlantar	1
88	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	1

89	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1
90	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	0
91	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	0
92	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	0
93	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	0
94	1.06.000160	Standar sarana prasarana Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	0
95	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia	0
96	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	80
97	1.06.000163	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak berupa upaya pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak	0
98	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial anak terlantar	0
99	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	0
100	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial lanjut usia terlantar	0

101	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	0
102	1.06.000168	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	0
103	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	0
104	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	304
105	1.06.000171	Komunitas Adat Terpencil pada Daerah Otorita Baru	Komunitas	Jumlah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik	0
106	1.06.000172	Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL pada Daerah Otorita Baru	Orang	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	0
107	1.06.000173	Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk pada Daerah Otorita Baru	Instansi	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	0
108	1.06.000174	Dokumen Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP	Dokumen	Dokumen standar jaminan hidup layak bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.	0

109	1.06.000175	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.	0
110	1.06.000176	Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan yaitu rencana kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan khususnya di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).	0
111	1.06.000177	Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen	Penyusunan standar bantuan sosial (baik berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial) yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua OAP	0
112	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0
113	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	80

114	1.06.000180	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.	433
115	1.06.000182	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi	0
116	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.	0
117	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	0
118	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	0
119	1.06.000200	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat	390
120	1.06.000201	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.	0

121	1.06.000202	Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)	0
122	1.06.000203	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial.	0
123	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD Urusan	0
124	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin	0
125	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam	0
126	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	0
127	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	0

128	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik kebencanaan untuk lumbung sosial	0
129	1.06.000210	Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Orang	Bantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan/atau penguatan ekonomi bagi korban bencana. Penguatan ekonomi yang dimaksud agar korban bencana mampu bertahan hidup hingga pulih kembali secara sosial.	120
130	1.06.000211	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst.	0
131	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.	0
132	1.06.000213	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi berupa FGD/Rapat untuk mendapatkan informasi terkait dengan badan usaha-badan usaha yang ada di daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. serta untuk mewujudkan pemahaman yang sama dan sinergis antara pemerintah daerah dengan badan usaha serta untuk mengetahui partisipasi badan usaha-badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	0
133	1.06.000214	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi pengusulan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial daerah provinsi yang diusulkan mengikuti sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi.	0
134	1.06.000215	Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat Akreditasi	Lembaga	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi terkait pengusulan Lembaga Kesejahteraan Sosial daerah provinsi yang akan dilakukan akreditasi yaitu penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial	0

135	1.06.000216	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah	0
136	1.06.000217	Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	Kegiatan ini untuk mendorong dan memfasilitasi penumbuhan dan penguatan Puskesos Kabupaten/Kota sebagai layanan sosial satu pintu dan hub Program Graduasi di daerah. Program Graduasi adalah serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan sesuai karakteristik setempat dan difasilitasi melalui pendampingan langsung	0
137	1.06.000218	Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	Pemberian gelar adalah pemberian penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, damabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dan yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangda dan Negara Republik Indonesia.	0
138	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat	1250

139	1.06.000220	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	65
140	1.06.000221	Anak Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	595
141	1.06.000222	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	103
142	1.06.000223	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	10
143	1.06.000224	Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten /Kota	Kegiatan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial bersumberdaya masyarakat (Lembaga Kesejahteraan Sosial) bagi Penyandang Disabilitas serta pembinaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya	0
144	1.06.000225	Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga kepada gelandangan dan pengemis di dalam panti berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	10

145	1.06.000226	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran	Orang	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga kepadaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	0
146	1.06.000227	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga kepadaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	0
147	1.06.000228	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	0
148	1.06.000229	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan Disabilitas	0
149	1.06.000230	Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Orang	Ditujukan kepada unsur pemerintah daerah maupun masyarakat	0
150	1.06.000231	Pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	Pemberian pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan edukasi/ informasi tentang program bantuan serta dapat meberikan solusi dalam permasalahan terkait masih banyaknya KPM PKH yang belum menerima Program Bansos lain yaitu KIP, KIS, Rastra, BPNT, Subsidi Gas, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk dalam penyelesaian kemiskinan.	0
151	1.06.000232	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	Merupakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program keluarga harapan (PKH)	1

152	1.06.000233	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	Jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	1131690
2	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.	-
3	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	2306
4	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan	Kasus	Perusahaan yang disidik merupakan perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0
5	2.07.000009	Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3	Perusahaan	Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diuji berasal dari rekomendasi pengawas ketenagakerjaan	1360
6	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, jaminan sosial, perempuan, anak, penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pesawat uap, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, lingkungan kerja, kesehatan kerja, konstruksi bangunan, penyalur petir, listrik, hygiene perusahaan, instalasi pemadam kebakaran, kebebasan berserikat, kesejahteraan, hubungan kerja.	76
7	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.	7
8	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah	229
9	2.07.000024	Kapasitas Terpasang Pemerintah	Orang	Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja	1472
10	2.07.000029	Kecelakaan Kerja	Kasus	Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja	16091
11	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	304
12	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	1

13	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	46
14	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	6
15	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah	622
16	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	3794
17	2.07.000048	Mediator	Orang	PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	24
18	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
19	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki	-
20	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja	33675
21	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan	17763
22	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	33675
23	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	-
24	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	1654680
25	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	Orang	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	41

26	2.07.000070	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Proviinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73
27	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	45
28	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan	2253
29	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.	306
30	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	155
31	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	Jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya	1131690
32	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri	8
33	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih	2523
34	2.07.000086	Perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar	Perusahaan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di	59297
35	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	15459
36	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	59297

37	2.07.000089	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan	-
38	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3	Perusahaan	Penerapan Norma K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	76
39	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja (Sistem manajemen K3) SMK3	34
40	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3)	24530
41	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3*	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja wajib memenuhi Sistem Manajemen K3 (SMK3)	34
42	2.07.000094	Perusahaan yang diaudit SMK3	Perusahaan	Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dan telah di Audit oleh Lembaga Audit	27
43	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	Petugas antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antarkerja	0
44	2.07.000096	PMI Purna	Orang	Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	-
45	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	2306
46	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	5292473.24
47	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja	687
48	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	79
49	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1431963
50	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota	7
51	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi	1
52	2.07.000122	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja	73
53	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait	7

54	2.07.000126	Perusahaan Menengah	Perusahaan	Perusahaan yang memperoleh Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas oleh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi, dan bidang pelatihan dan produktivitas pada Dinas Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di perusahaan berdasarkan Kepdirjen Binalattas Nomor 2/268/HK.05/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1858
55	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	22
56	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya	17763
57	2.07.000129	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	8

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.08.000004	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi	Orang	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	13547
2	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat provinsi	1
3	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	1
4	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provinsi	-
5	2.08.000016	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat provinsi	1
6	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	5
7	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat provinsi	9
8	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan provinsi	6
9	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	77
10	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah provinsi.	1

11	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	0
12	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	0
13	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di provinsi sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	0
14	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	43
15	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan provinsi	4
16	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	89
17	2.08.000056	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat provinsi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	0
18	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	38

19	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi.	35
20	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	0
21	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	43
22	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	0
23	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	50
24	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)	1
2	2.09.000063	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Dokumen	Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan/atau sejalan dengan kebijakan pusat)	0
3	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	0
4	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	Direktori Konsumsi pangan berisi data/informasi konsumsi pangan dan skor PPH wilayah disajikan antar tahun/time series	-
5	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	1
6	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1
7	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	1
8	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)	1
9	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1
10	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1

11	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1
12	2.09.000091	Jenis promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	0
13	2.09.000092	Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan koordinasi yang dihadiri oleh gubernur/wakil gubernur dan atau DPRD/OPD dalam rangka sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1
14	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan rumah pangan B2SA, fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal, promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA serta kegiatan sejenisyang mendukung.	0
15	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi	-
16	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	1
17	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan	1
18	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023	1
19	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	1
20	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki	0
21	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	Jumlah izin edar PSAT PD untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	0
22	2.09.000111	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun	Dokumen	Jumlah izin rumah pengemasan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	0
23	2.09.000113	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat	-

24	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	0
25	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	1
26	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi	0
27	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	1
28	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	0
29	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi berisikan data terkait jumlah pengadaan, jumlah yang dikelola dan jumlah yang disalurkan berdasarkan hasil koordinasi	0
30	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	0
31	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)	0
32	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki	0
33	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan	0
34	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	1
35	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi	0
36	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi	0
37	2.09.000142	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penentuan harga minimum pangan pokok lokal	-

38	2.09.000143	Data harga minimum pangan pokok lokal	Dokumen	Informasi harga pangan pokok lokal yang diproduksi dan/atau dikonsumsi di wilayah setempat untuk dilakukan penentuan harga minimumnya	-
39	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	-
40	2.09.000146	Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada masyarakat umum	1
41	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (gubernur/wakil gubernur/DPRD/OPD) dan atau dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat	1
42	2.09.000148	Indeks Ketahanan Pangan Level Kecamatan	Dokumen	Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kecamatan) dan peringkat (ranking) relatif antara satu kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lainnya.	1
43	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana	0
44	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	0
45	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	Sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan segar berupa sertikasi prima, sertifikasi organik, dan sertifikasi produk sesuai SNI yang diterbitkan dalam 1 tahun	2
46	2.09.000156	Jumlah health certificate (HC) per tahun	Dokumen	Jumlah health certificate (HC) untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun	0
47	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	Dokumen	Jumlah SPPB-PSAT yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	0
48	2.09.000158	Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	0
49	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	0

50	2.09.000161	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	-
51	2.09.000162	Data Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	&Data hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a. analisis b. perkiraan ketersediaan c. perkiraan kebutuhan d. dinamika harga dan e. dampak Krisis Pangan.&	-
52	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah provinsi, yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	1
53	2.09.000164	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	-
54	2.09.000188	Data pelaku usaha pangan segar	Dokumen	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar	0
55	2.09.000210	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	-
56	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	0
57	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah	0
58	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	1.244
59	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu	0
60	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan	0
61	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah	23,5
62	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	0
63	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	0

64	2.09.000254	Data Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	Data hasil analisis: 1) Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a) analisis risiko, b) perkiraan ketersediaan Pangan, c) perkiraan kebutuhan Pangan, d) dinamika harga Pangan, dan e) dampak Krisis serta 2) Kajian Cepat Potensi Krisis Pangan yang memuat aspek: a) goegraphical, b) kondisi wilayah, c) dampak langsung dan d) dampak tidak langsung	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0
2	2.10.000005	Berita Acara koordinasi pemanfaatan tanah kosong	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pemanfaatan tanah kosong yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0
3	2.10.000010	Berita acara rapat koordinasi penataan akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penataan akses dalam rangka Reforma Agraria yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0
4	2.10.000011	Bidang tanah yang diredistribusi	Dokumen	Redistribusi tanah yang dilaksanakan melalui tahapan: 1. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan output notulensi 2. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah dengan output laporan 3. penetapan sebagai objek redistribusi tanah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah	0
5	2.10.000020	Data inventarisasi penggunaan tanah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	0
6	2.10.000025	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Dokumen	Data lokasi	0
7	2.10.000039	Dokumen fasilitasi penetapan zona nilai tanah	Dokumen	Laporan hasil failitasi penetapan zona nilai tanah	0
8	2.10.000048	Dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	Dokumen	Laporan hasil koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	0
9	2.10.000058	Dokumen pengembangan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Produk Layanan disampaikan melalui Domisili Elektronik	0
10	2.10.000061	Dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	Instruksi tidak jelas	0
11	2.10.000069	Doukumen kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Perda tentang RTRW Provinsi	Dokumen	Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.	0

12	2.10.000079	Penetapan Gubernur	Dokumen	Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 Hari sejak diterimanya DPPT. Pendelegasian dilakukan melalui penetapan gubernur	0
13	2.10.000087	SK Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria	Dokumen	Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur	1
14	2.10.000090	Surat persetujuan pemilik bidang tanah	Surat	Catatan resmi (rekomendasi) tentang persetujuan pemilik bidang tanah	0
15	2.10.000092	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0
16	2.10.000093	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	hasil rapat Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa dokumen data sengketa konflik dan perkara dalam 1 daerah provinsi	0
17	2.10.000094	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi berupa laporan pelaksanaan GTRA Provinsi	0
18	2.10.000095	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	hasil Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa berita acara pengusulan TORA	0
19	2.10.000096	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara	Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota berupa Berita Acara. Berita Acara merupakan dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi.	0
20	2.10.000097	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	0
21	2.10.000101	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara	Hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara koordinasi	0
22	2.10.000102	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa dokumen	0

23	2.10.000104	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	0
24	2.10.000107	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	0
25	2.10.000108	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa berita acara	0
26	2.10.000109	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	0
27	2.10.000110	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi berupa Dokumen	0
28	2.10.000111	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	hasil Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat berupa dokumen	0
29	2.10.000112	Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan	Hasil Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan berupa jumlah layanan bantuan hukum	0
30	2.10.000113	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	0
31	2.10.000114	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	hasil Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat berupa dokumen	0
32	2.10.000115	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	hasil Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik berupa laporan	0
33	2.10.000117	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	hasil Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat berupa dokumen	0

34	2.10.000119	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen	hasil Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir berupa dokumen	0
35	2.10.000121	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	hasil Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota berupa dokumen	0
36	2.10.000122	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provins	Dokumen	hasil Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi berupa dokumen	0
37	2.10.000123	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	0
38	2.10.000124	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen	hasil Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum berupa dokumen	0
39	2.10.000125	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen	0
40	2.10.000126	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan	hasil Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota berupa laporan	0

41	2.10.000127	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota berupa berita acara	0
42	2.10.000128	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan	hasil Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi berupa laporan	0
43	2.10.000129	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	hasil Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota berupa laporan	0
44	2.10.000130	Data tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan	hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua berupa laporan	
45	2.10.000131	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	hasil Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat berupa laporan	0
46	2.10.000132	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	hasil Pemeliharaan Dokumen Pertanahan berupa dokumen	0
47	2.10.000133	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Hasil Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten berupa dokumen	0
48	2.10.000134	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa berita acara	0
49	2.10.000135	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen	0
50	2.10.000136	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen	0
51	2.10.000137	umlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan	0
52	2.10.000138	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen	0
53	2.10.000139	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen	0

54	2.10.000140	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara	0
55	2.10.000141	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	0
56	2.10.000143	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen	0
57	2.10.000146	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara	0
58	2.10.000147	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	0
59	2.10.000151	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa unit	0
60	2.10.000176	Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	0
61	2.10.000177	Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	0
62	2.10.000178	Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Hasil dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen pemberitahuan	0
63	2.10.000181	Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen hasil koordinasi	0
64	2.10.000182	Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Mengumumkan Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum berupa surat pengumuman	0

65	2.10.000183	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	Hasil dari Kegiatan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Dokumen Daftar Sementara Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	0
66	2.10.000184	Data aset Tanah Pemerintah	Laporan	Hasil Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah berupa laporan data aset tanah pemerintah	0
67	2.10.000185	Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan	Hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Laporan Konsultasi Publik	0
68	2.10.000188	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	0
69	2.10.000190	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	Hasil Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda berupa dokumen	0
70	2.10.000191	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	0
71	2.10.000192	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB berupa Dokumen	0
72	2.10.000193	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Rencana Pengadaan Tanah	0
73	2.10.000194	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat berupa Dokumen hasil survei dan pengukuran.	0
74	2.10.000196	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	0

75	2.10.000197	Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	0
76	2.10.000200	Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN berupa Dokumen Kegiatan Koordinasi	0
77	2.10.000204	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	Hasil Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Penyelesaian	0
78	2.10.000205	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Koordinasi	0
79	2.10.000207	Laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan	Hasil Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2024
1	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0
2	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten /Kota	Tersedianya data daerah yang melakukan kerja sama dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional	0
3	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	1
4	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0
5	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0
6	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	1
7	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	1
8	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi/ lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya	0
9	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	1
10	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data terkait pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	1
11	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	0
12	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0
13	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	1
14	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	0
15	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup lintas kabupaten/kota yang mendukung pemenuhan RPPLH	0
16	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku.	26

17	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0
18	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	0
19	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	0
20	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan pelaporan pelaksanaan RPPLH Provinsi	0
21	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0
22	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0
23	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	24
24	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	8
25	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0
26	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	26
27	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	26
28	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0
29	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah provinsi	26
30	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	26
31	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	Ton	1. Data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. Data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	0

32	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0
33	2.11.000064	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
34	2.11.000065	Kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Unit	Data sarana prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1
35	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	30
36	2.11.000072	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
37	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan	0
38	2.11.000075	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0
39	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	0
40	2.11.000077	Kontribusi pembiayaan dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Rupiah	Data biaya operasional yang harus di tanggung APBD Provinsi untuk setiap TPA/TPST Regional	0
41	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	0
42	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0
43	2.11.000082	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0
44	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	0

45	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	0
46	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1
47	2.11.000089	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional	Dokumen	Data sarpras penanganan sampah regional di TPA/TPST Regional	0
48	2.11.000091	Laporan hasil koordinasi dengan perangka daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0
49	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	0
50	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	1
51	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.	0

52	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0
53	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0
54	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1
55	2.11.000101	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	0
56	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	0
57	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	0
58	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0
59	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
60	2.11.000109	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	0
61	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	2

62	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0
63	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0
64	2.11.000115	Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	Data lokasi proklim di provinsi	0
65	2.11.000117	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
66	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
67	2.11.000121	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
68	2.11.000123	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2. Tersedianya data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
69	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	0
70	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	0
71	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0
72	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0
73	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	77.72
74	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	85.91
75	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	77.62

76	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	75.75
77	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	76.2
78	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	0
79	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	8
80	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	0
81	2.11.000137	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data hasil verifikasi atas Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0
82	2.11.000138	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses	Dokumen	Data hasil verifikasi atas Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0
83	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	26
84	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	26
85	2.11.000145	Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data hasil verifikasi atas permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disetujui dan diterbitkan	0
86	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	7
87	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	7
88	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	7
89	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
90	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	0
91	2.11.000157	Sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional eksisting	Unit	1. Data biaya pemeliharaan Sarpras 2. Data biaya operasional Sarpras TPA/TPST regional (RP/tahun atau Rp/bulan)	1
92	2.11.000162	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0

93	2.11.000164	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0
94	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0
95	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Unit	1. Tersedianya data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Tersedianya Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. tersedianya data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	1
96	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	8
97	2.11.000169	Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir TPA/TPST Regional	Ton	Data jumlah residu sampah yang masuk di TPA/TPST Regional	6,087.50
98	2.11.000170	Volume sampah dari kerjasama penanganan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola dari kerja sama dalam penanganan sampah	76,781.77
99	2.11.000178	Volume timbulan sampah yang masuk ke TPA/TPST Regional	Ton	Data jumlah timbulan sampah yang diolah di TPA/TPST Regional	152,634.87
100	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota	0
101	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	0
102	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0
103	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0
104	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0
105	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	0
106	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. Data jumlah kebijakan yang disusun 3. Data jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	1

107	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0
108	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8
109	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	8
110	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	38
111	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	38
112	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	38
113	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	0
114	2.11.000206	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	0
115	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0
116	2.11.000212	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0
117	2.11.000214	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas remidiasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan	0
118	2.11.000216	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan	0

119	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	0
120	2.11.000219	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	0
121	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	0
122	2.11.000223	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0
123	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	0
124	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0
125	2.11.000227	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan	0
126	2.11.000228	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Lokasi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas remidiasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan	0
127	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1. tersedianya data jumlah daerah 2. tersedianya data potensi timbulan sampah daerah 3. tersedianya data jumlah/prosentase sampah tidak terkelola di setiap daerah (kabupaten/kota)	1
128	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	0

129	2.11.000233	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	0
130	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	0
131	2.11.000235	Jumlah Laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Dokumen	1. jumlah kegiatan pemantauan implementasi/pelakasanaan kebijakan 2. jumlah ritasi pelaksanaan pemantauan untuk setiap implementasi kebijakan per tahun 3. Tersedianya data seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah regional yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun dibuat secara tertulis/dalam bentuk laporan	1
132	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	0
133	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	0
134	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	0
135	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
136	2.11.000242	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Lokasi	Wilayah lintas kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah provinsi	0
137	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	2

138	2.11.000244	Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0
139	2.11.000245	Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0
140	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
141	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	8
142	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	7
143	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	7
144	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	7
145	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	7
146	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	0
147	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani adalah total volume atau berat sampah yang dihasilkan dalam situasi tertentu dan telah dikelola melalui proses pengangkutan, pemrosesan, atau pembuangan yang sesuai.	0
148	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	0
149	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional	0
150	2.11.000267	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	0
151	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0
152	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Tersedianya data: a. pembuatan KLHS meliputi SK Tim, Pengkajian TPB, Perumusan Skenario, Penjaminan Kualitas. b. pelaksanaan KLHS meliputi integrasi ke dalam RAD TPB dan dokumen perencanaan RPJMD	0
153	2.11.000272	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Wilayah lintas kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah provinsi	0

154	2.11.000274	Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0
155	2.11.000276	Luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Aktivitas remediasi pada wilayah lintas kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0
156	2.11.000278	Luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0
157	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	77.72, 76.20, 75.75, 85.91, 77.62
158	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	0
159	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0
160	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0
161	2.11.000284	Volume sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	1. data jumlah timbulan sampah yang di tangani dalam kondisi khusus yang kewenangan provinsi 2. data biaya penanganan sampah dalam kondisi khusus (Rp/ton atau Rp/event atau Rp/unit atau Rp/hari)	0
162	2.11.000285	Volume sampah regional yang dikelola	Ton	1. Data biaya penanganan sampah regional /ton 2. Data jumlah/volume sampah regional yang di kelola	0
163	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan RPPLH dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	0
164	2.11.000293	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang diawsi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi		Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi	0
165	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	0
166	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0

167	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	0
168	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	0
169	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0
170	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	0
171	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi pengintegrasian)	6
172	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
173	2.11.000309	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi pengintegrasian)	6
174	2.11.000312	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	0

175	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
176	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	0
177	2.11.000315	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi	0
178	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0
179	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	0
180	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0
181	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.	0
182	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0

183	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0
184	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0
185	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	0
186	2.11.000333	Laporan hasil telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan / Dokumen	Laporan yang berisi tentang telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota sebagai hasil dari pembinaan, penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh provinsi kepada Kabupaten/Kota	0
187	2.11.000334	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	0
188	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah	0
189	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0
190	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0

191	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
192	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
193	2.11.000340	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH	0
194	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0
195	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	0
196	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	0

197	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas LingkunganÂ yangÂ diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	7
198	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	7
199	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	0
200	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.	0
201	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.	0
202	2.11.000356	Data jumlah tonase sampah sungai/DAS provinsi yang ditangani	Ton	Data jumlah sampah sungai/DAS provinsi yang diangkut dan ditangani oleh provinsi	0
203	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	108,029 ton/hari
204	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	39.430,68 ton/tahun

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat prosedur baku sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, serta menyusun laporan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	0
2	2.12.000011	Dokumen hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	Dokumen resmi berisi hasil kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	0
3	2.12.000013	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	Dokumen	Dokumen berisi hasil kegiatan penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	1
4	2.12.000014	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	Dokumen berisi hasil kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk.	1
5	2.12.000015	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi berkala antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam lingkup kewenangan provinsi.	1
6	2.12.000016	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi berkala antara lembaga pemerintah dan non pemerintah lingkup provinsi terkait pencatatan sipil.	1
7	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas Peristiwa Penting	Dokumen	Dokumen ini merupakan laporan atau rekaman resmi yang menyajikan hasil pemanfaatan data terkait peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Peristiwa penting yang dimaksud mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, serta peristiwa lainnya yang berpengaruh terhadap status kependudukan seseorang.	0
8	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan adalah dokumen yang berisi rekaman penggunaan data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta kebijakan sosial dan ekonomi.	0
9	2.12.000021	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Dokumen	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan adalah dokumen yang mencatat penggunaan data terkait berbagai peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan elemen data kependudukan lainnya.	0
10	2.12.000022	Dokumen hasil penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	Dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi, perbaikan, dan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan pencatatan sipil di tingkat provinsi.	Buku Agregat Kependudukan Semester 1 tahun 2025
11	2.12.000029	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen berisi hasil penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan berupa data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi serta kabupaten/kota.	1
12	2.12.000030	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi adalah laporan resmi yang memuat hasil pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pendaftaran penduduk di tingkat provinsi.	0
13	2.12.000031	Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil ditetapkan	Dokumen	Dokumen kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan adalah dokumen resmi yang berisi pedoman, aturan, dan prosedur teknis terkait penyelenggaraan pencatatan sipil, yang telah disahkan oleh instansi berwenang.	0
14	2.12.000036	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Dokumen	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencatatan sipil adalah dokumen yang berisi materi sosialisasi, pedoman, atau laporan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai prosedur, manfaat, serta regulasi pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.	1
15	2.12.000038	Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	Dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi adalah dokumen yang memuat hasil pencatatan dan analisis terhadap penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap serta kelompok rentan administrasi kependudukan yang berpindah antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. Dokumen ini digunakan untuk perencanaan kebijakan kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif.	0

16	2.12.000041	Dokumen Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Dokumen	Dokumen ini berisi keputusan resmi mengenai kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran penduduk yang disusun berdasarkan kebijakan nasional. Dokumen ini menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam mengelola administrasi kependudukan, termasuk prosedur pendaftaran, pencatatan, dan pemutakhiran data penduduk secara akurat dan terstandarisasi.	0
17	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	Dokumen ini berisi data kependudukan di tingkat provinsi yang dikumpulkan, dikelola, dan disediakan untuk berbagai keperluan administrasi, perencanaan, serta pengambilan kebijakan. Data ini mencakup jumlah penduduk, demografi, mobilitas, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan instansi terkait.	2
18	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	Menyusun profil kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	0
19	2.12.000048	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi prosedur dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, serta penyusunan pelaporan administrasi kependudukan (adminduk) terkait pencatatan sipil, yang disusun sebagai acuan bagi instansi penyelenggara adminduk.	1
20	2.12.000049	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi prosedur dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, serta penyusunan pelaporan administrasi kependudukan (adminduk) terkait pendaftaran penduduk, yang disusun sebagai acuan bagi instansi penyelenggara adminduk.	1
21	2.12.000054	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan yang memuat hasil pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, termasuk evaluasi sistem, kepatuhan terhadap regulasi, serta rekomendasi perbaikan.	1
22	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan yang berisi hasil pelaksanaan bimbingan teknis mengenai prosedur, regulasi, dan peningkatan kapasitas dalam pendaftaran penduduk, termasuk evaluasi efektivitas dan rekomendasi perbaikan.	1
23	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan yang berisi hasil pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, mencakup dukungan, evaluasi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan.	1
24	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan yang memuat hasil fasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota, mencakup evaluasi, hambatan, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan.	1
25	2.12.000064	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan	Laporan yang berisi hasil konsultasi mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan pencatatan sipil dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.	0
26	2.12.000065	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan yang berisi hasil konsultasi mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.	0
27	2.12.000066	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan yang berisi hasil konsultasi terkait kebijakan, prosedur, dan implementasi dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pemanfaatan data kependudukan.	0
28	2.12.000070	Laporan hasil koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan berisi hasil koordinasi berkala antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah lingkup kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk.	1
29	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan yang memuat hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pendaftaran penduduk, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan.	1
30	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan yang berisi ringkasan kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran penduduk, mencakup tujuan, materi yang disampaikan, metode pelaksanaan, serta hasil dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat.	0
31	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan sosialisasi mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, mencakup tujuan, materi yang disampaikan, metode pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan.	0

32	2.12.000083	Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Laporan yang memuat hasil kegiatan sosialisasi mengenai pencatatan sipil, mencakup tujuan, materi yang disampaikan, metode pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan.	0
33	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan	Laporan yang berisi hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan sipil, mencakup evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas layanan pencatatan sipil.	0
34	2.12.000093	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	Sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan.	0
35	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	1
36	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota	0
37	2.12.000101	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan	Orang	Bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas lainnya bagi aparatur Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota)Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa	0
2	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.	1
3	2.13.000011	Desa yang melakukan pengembangan Inovasi	Desa	Kegiatan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, meliputi : I. Fasilitasi Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 1) Penyusunan Strategi Pengembangan Desa Brprestasi/Inovatif berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa 2) Pengembangan Kapasitas Evaluator pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 3) Penyusunan Juknis penjaringan Desa/Kelurahan Berprestasi 4) Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi (Lomba Desa) II. Fasilitasi Program Pasca Penjaringan Desa Berprestasi (Lomba Desa) 1) Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2) Labsite / Laboratorium Desa Percontohan 3) Peningkatan Kapasitas bagi Desa Kurang Berkembang 4) Evaluasi pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Desa 5) Publikasi Sucses Story Desa Berprestasi/Inovatif	1
4	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	1
5	2.13.000022	Dokumen hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	Dokumen berisi hasil penugasan urusan atau kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa.	0
6	2.13.000026	Dokumen penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen	Sistem Informasi Kampung atau Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.	0

7	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	Orang	Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.	-
8	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa	0
9	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya atau dukungan (pelaksanaan program/kegiatan, bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Penggerak PKK sebagai mitra Pemerintah di setiap jenjangnya dalam rangka menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui 10 Program Pokok PKK 2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.	1
10	2.13.000032	Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Laporan	Laporan berisi hasil evaluasi dan monitoring p3md, ppmd, serta penggunaan dana kampung.	0
11	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b. lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.	0
12	2.13.000036	Laporan hasil pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan keberhasilan & inovasi yg telah dilakukan oleh Pemda serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. kegiata pada pelaksanaan Pindeskel meliputi: 1. Penyusunan Juklak Pindeskel 2. Peningkatan kapasitas pemerintah Desa 3. Pelaksanaan pameran Inovasi Desa 4. Evaluasi Pindeskel	0
13	2.13.000037	Laporan hasil penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan berisi hasil penyelenggaraan lomba kampung/kelurahan di 29 kabupaten/kota.	0
14	2.13.000039	Laporan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan	Laporan berisi pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (bbgrm) tingkat provinsi dan nasional.	0
15	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b. lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.	0
16	2.13.000041	Laporan penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan	Laporan berisi hasil penyelenggaraan lomba kampung dan kelurahan tingkat provinsi.	1

17	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan adalah dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengawasan desa adalah untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu: a. kepala b. perangkat c. kelompok kerja Pendataan d. tim penyusun RPJM e. tim penyusunan RKP f. panitia pengadaan barang dan jasa di dan g. tim Pelaksana Kegiatan Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.	0
18	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa	0
19	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. Khusus perihal PADes dan ADD Subdit saat ini melalui aplikasi konsolidasi keuangan desa mewadahi tempat pelaporan keuangan desa smt 1 dan akhir th guna melihat data PADes serta ADD ini	1
20	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	0
21	2.13.000063	Penyelenggaraan musyawarh desa	Dokumen	Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	0
22	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	0
23	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	Dokumen	Prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	0
24	2.13.000068	Pranata hukum adat	Dokumen	Pendataan SK MHA	0

25	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	12755
26	2.13.000070	Sanggar PKK di Kampung	Unit	Wadah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (pkk) di tingkat kampung sebagai sarana pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.	0
27	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah	0
28	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.	1
29	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.	275
30	2.13.000076	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.14.000004	Daerah Penerima Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga kepada Kab/Kota	-
2	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	1
3	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	0
4	2.14.000007	Daerah yang telah menerima Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi iBangga kepada Kab/Kota	1
5	2.14.000008	Daerah yang telah menyediakan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Dokumen	Kebijakan Daerah yang dikembangkan untuk Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1
6	2.14.000009	Daerah yang telah Menyerasikan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (iBangga)	Dokumen	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0
7	2.14.000010	Daerah/Instansi/Stakeholder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja yang dilaksanakan oleh Daerah	1
8	2.14.000011	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sertifikat	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi fasilitasi kegiatan inovasi	0
9	2.14.000012	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan terkait Kespro	Sertifikat	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan	0
10	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	1
11	2.14.000016	Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi, Penyediaan, dan Pengelolaan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1
12	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	-
13	2.14.000020	Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	Kegiatan	Lintas sektor yang memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	0
14	2.14.000021	Dokumen Hasil Pemetaan KKBPK (Bangga Kencana)	Laporan	Melaksanakan Pemetaan Program Bangga Kencana	0
15	2.14.000023	Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Bangga Kencana yang telah diserasikan	Dokumen	Daerah menyerasikan kebijakan- kebijakan yang ada terhadap Bangga Kencana	0
16	2.14.000027	Dokumen Profil KKBPK (Bangga Kencana)	Dokumen	Menyusun Profil Bangga Kencana	0
17	2.14.000030	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab/Kota	4
18	2.14.000031	Generasi Berencana (Genre) yang telah menerima Sosialisasi dan Pembinaan	Sertifikat	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana yang dilakukan oleh Daerah	0
19	2.14.000032	Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Program Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	1
20	2.14.000033	IPBK (iBangga) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang telah dilaksanakan survey	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0

21	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	0
22	2.14.000039	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga	Kampung KB	Daerah Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	0
23	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	0
24	2.14.000041	Kebijakan Kependudukan OAP	Kegiatan	Tersusunnya dan Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang telah disusun	-
25	2.14.000043	Kebijakan yang telah disediakan daerah	Dokumen	Kebijakan Daerah yang dikembangkan untuk Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-
26	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	0
27	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	4
28	2.14.000046	Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Instansi	Daerah yang bekerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	-
29	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1
30	2.14.000055	Materi dan Sarana Promosi, KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang telah memiliki Materi Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1
31	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0
32	2.14.000060	Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0
33	2.14.000062	Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah menerima fasilitasi peningkatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4
34	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1

35	2.14.000076	Organisasi yang telah mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	1
36	2.14.000079	Organisasi yang telah Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	Daerah yang mengembangkan dan menguatkan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	1
37	2.14.000080	Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	Organisasi	Daerah yang mengembangkan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0
38	2.14.000082	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	-
39	2.14.000083	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Jalur Nonformal dan Informal (Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat)	-
40	2.14.000084	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada Pemangku Kepentingan	0
41	2.14.000085	Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Kegiatan	Daerah (Provinsi) Melaksanakan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Nonformal dan Informal	-
42	2.14.000088	Pelaksanaan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kegiatan	Melaksanakan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada Pemangku Kepentingan	-
43	2.14.000092	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan/Melaporkan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-
44	2.14.000093	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	0
45	2.14.000096	Penyediaan & Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	0
46	2.14.000097	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengmbangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	0
47	2.14.000098	Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	Sertifikat	Daerah Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	-
48	2.14.000099	Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga yang telah mendapat dukungan	Kegiatan	Daerah (Provinsi) Melakukan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (baik hasil pelayanan KB, pengendalian lapangan dan pendataan keluarga beserta pemutakhirannya)	0
49	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0

50	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya	1
51	2.14.000102	PIK-R yang telah menerima/mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kelompok di Kampung KB	Organisasi	Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB yang mendapat fasilitasi	0
52	2.14.000103	PIK-R yang telah mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana	Organisasi	Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pelatihan/Orientasi /Workshop	1
53	2.14.000106	Prototype Materi Pembangunan Keluarga yang telah dikembangkan Sesuai dengan Kearifan Lokal	Unit	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	-
54	2.14.000111	Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Laporan	Daerah Menyediakan Sarana Pengasuhan 1000 HPK	1
55	2.14.000114	Strategi Operasional Advokasi, Promosi yang telah Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah yang telah menetapkan Strategi Advokasi, Promosi dan KIE yang dikembangkan sesuai Kearifan Lokal	1
56	2.14.000115	Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kespro yang telah Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah mengembangkan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0
57	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GENTING, GATI, Sidaya)	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan	-
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	0
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.	0
4	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan	0
5	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.	0
6	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan	0
7	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	-
8	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	1
9	2.15.000011	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	Telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan	-
10	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal	-
11	2.15.000019	Daftar SDM dibidang teknispengoperasian pelabuhan yangmemiliki kualifikasi dankompetensi yang dibuktikandengan sertifikat.	Dokumen	Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	0
12	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 5 (lima) b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dan c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.	0
13	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	Unit	Fasilitas pokok antara lain berupa: a. b. gudang lini c. lapangan penumpukan lini d. Terminal e. Terminal peti f. Terminal curah g. Terminal curah h. Terminal ro- i. car j. Terminal k. fasilitas penampungan dan pengelolaan l. fasilitas m. fasilitas pemadam n. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu dan p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi Fasilitas penunjang berupa: a. kawasan b. fasilitas pos dan c. fasilitas pariwisata dan d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu kendaraan i. kawasan	0

14	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia	Unit	Fasilitas pokok meliputi: a. b. lapangan c. terminal d. fasilitas penampungan dan pengolahan e. fasilitas f. fasilitas pemadam dan g. fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3). Selain fasilitas pokok rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan: a. penimbangan kendaraan bermuatan untuk angkutan b. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way); c. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa Pelabuhan, termasuk fasilitas untuk kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan di d. instalasi air bersih, listrik, dan e. akses jalan dan/atau jalur kereta dan f. tempat tunggu atau lapangan parkir kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Fasilitas penunjang meliputi: a. b. fasilitas pos dan c. fasilitas d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu kendaraan i. kawasan dan j. kawasan industri. Selain fasilitas penunjang rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan: a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa b. tempat penampungan c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan Pelabuhan Sungai dan d. areal pengembangan dan e. fasilitas umum lainnya	0
15	2.15.000027	Data jalur	Jalur	Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.	0
16	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan: 1. tingkat penggunaan kendaraan dan 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.	0
17	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan: 1. tingkat penggunaan kendaraan dan 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.	0
18	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.	1
19	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
20	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	1

21	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	1
22	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	1
23	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C.	-
24	2.15.000048	Data auditor LLAJ Provinsi	Dokumen	(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan b. gubernur, untuk jalan dan c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.	-
25	2.15.000053	Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen		0
26	2.15.000058	Data dokumen perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh lzin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal (predredgesounding) dari lokasi yang akan 4. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari 6. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah 7. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang dan 8. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis. c. surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan d. rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.	0
27	2.15.000062	Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada: a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.	0
28	2.15.000063	Data fasilitas operasi	Unit	Pengelompokan kelas stasiun kereta api dilakukan berdasarkan kriteria: a. fasilitas operasi b. jumlah jalur c. fasilitas penunjang d. frekuensi/lalu lintas e. jumlah penumpang f. jumlah barang.	-
29	2.15.000064	Data fasilitas penunjang	Unit	Fasilitas penunjang adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api, yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api yang ada di stasiun.	-

30	2.15.000065	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe A	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	-
31	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0
32	2.15.000069	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe A	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	-
33	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	0
34	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	-
35	2.15.000073	Data frekuensi/lalu lintas	Kali	Frekuensi lalu lintas adalah banyaknya kereta api yang berangkat, berhenti dan melintas di suatu stasiun selama kurun waktu tertentu.	0
36	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	-
37	2.15.000076	Data Inspektor LLAJ provinsi	Dokumen	1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan b. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan c. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku d. kartu pengawasan yang masih berlaku 3. unsur teknis meliputi: a. unsur teknis utama b. unsur teknis penunjang 4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	-
38	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan: - antarkota - antarkota antarprovinsi - antarkota dalam dan - antarkota dalam kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - menghubungkan beberapa stasiun - tidak menyediakan layanan penumpang - melayani penumpang tidak - memiliki jarak dan atau waktu tempuh e. memiliki frekuensi keretaapi sedang atau dan f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota&	-
39	2.15.000079	Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat : - Melampaui 1 (satu) - Melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) dan - Berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - Menghubungkan beberapa stasiun di wilayah - Melayani banyak penumpang - Memiliki sifat perjalanan ulang alik/ - Melayani penumpang - Memiliki jarak dan/atau waktu tempuh dan - Melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.	-
40	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek.	0
41	2.15.000082	Data kapasitas, frekuensi, dan headway	Kali	a. Kapasitas lintas yang tersedia harus memperhatikan alokasi waktu perawatan prasarana perkeretaapian. b. Komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan meliputi pelayanan angkutan orang dan/atau barang yang bersifat komersial dan/atau penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan kondisi tersedianya jaringan pelayanan angkutan dengan moda kereta api dan/atau moda lain ke dan dari stasiun kereta api. d. Jarak waktu antara kereta api (headway) merupakan jarak kereta api yang satu dengan kereta api berikutnya dalam satuan waktu.	-

42	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk	-
43	2.15.000088	Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani Iintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit)	Unit	Jumlah trayek pelayanan kereta api	-
44	2.15.000091	Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	1
45	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	1
46	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan: a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam dan b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen b. dokumen c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab d. jenis e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan f. tanda identitas Perusahaan Angkutan dan g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor b. fisik Kendaraan Bermotor dan c. Standar Pelayanan Minimal.	0
47	2.15.000096	Data Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh lzin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal (predredgesounding) dari lokasi yang akan 4. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari 6. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah 7. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang dan 8. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis. c. surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan d. rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.	0
48	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	1
49	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi dilakukan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi	0
50	2.15.000104	Data Laporan perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban: a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian c. memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang e. melaporkankegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar dan f. melaksanakan kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.	0
51	2.15.000107	Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1

52	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan pelayanan	-
53	2.15.000112	Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan)	Laporan	Data nama argo pelayanan kereta api dengan rincian sifat dan jenis pelayanan & angkutan	-
54	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	0
55	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	0
56	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	0
57	2.15.000117	Data pelayanan angkutan barang	Unit	Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.	-
58	2.15.000118	Data pelayanan angkutan orang	Unit	a. Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian. b. Pelayanan angkutan orang dengan kereta api dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersil terdiri atas : - Angkutan pelayanan kelas non- dan - Angkutan pelayanan kelas ekonomi d. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan: - kewajiban pelayanan atau - angkutan perintis perkeretaapian.	-
59	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).	0
60	2.15.000121	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.	0
61	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	1
62	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	1
63	2.15.000148	Data persetujuan prinsip pembangunan	Dokumen	&Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum yang kegiatannya meliputi fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin dalam sistem pelayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik. Sebelum mendapat izin pembangunan, badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan prinsip pembangunan. Persetujuan prinsip pembangunan diberikan oleh: a. Menteri, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah b. gubernur, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dan c. bupati/walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi gubernur dan persetujuan Menteri.	-
64	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	Dokumen	Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja	1
65	2.15.000154	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	0
66	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	0
67	2.15.000157	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.	0
68	2.15.000159	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Provinsi	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0

69	2.15.000160	Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi	Unit	Data mengenai rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian di tingkat provinsi.	-
70	2.15.000162	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	Orang	Rencana kebutuhan sumber daya manusia meliputi: a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian dan e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian provinsi.	0
71	2.15.000164	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi	Dokumen	Hasil pemetaan lokasi dan kebutuhan simpul berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0
72	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0
73	2.15.000170	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe A	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	-
74	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	0
75	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0
76	2.15.000174	Data Terminal Penumpang Tipe A	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	-
77	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	0
78	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0
79	2.15.000178	Data UPPKB	Dokumen	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	0
80	2.15.000179	DIPA dan petunjuk operasional pengelolaan bandara	Dokumen	Dokumen yang memuat dipa dan petunjuk operasional terkait pengelolaan bandara.	-
81	2.15.000180	Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-Dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian umum pada jalur melintasi daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi. - Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga Online Single Submission (OSS).	-
82	2.15.000182	Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah di tetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
83	2.15.000184	Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	Untuk memperoleh izin operasi Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana c. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji d. tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, serta tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana f. menyediakan fasilitas perawatan Sarana g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan dan h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.	-
84	2.15.000185	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
85	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	0
86	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	1

87	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Unit	Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat.	0
88	2.15.000193	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Unit	Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).	0
89	2.15.000194	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk). fasilitas yang terpelihara untuk memastikan kualitas layanan	0
90	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan.	0
91	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas	0
92	2.15.000198	Izin Lingkungan sesuai denganketentuan perundang-undangan	Dokumen	Izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	-
93	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.	0
94	2.15.000200	Kajian rencana induk bandar udara	Dokumen	- Rencana Induk Bandar udara paling sedikit memuat : a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan b. kebutuhan c. tata letak d. tahapan pelaksanaan e. kebutuhan dan pemanfaatan f. daerah lingkungan g. daerah lingkungan h. kawasan keselamatan operasi dan i. batas kawasan kebisingan. (1) - Sertifikat Bandar udara diberikan setelah bandar udara memiliki buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) yang memenuhi persyaratan teknis tentang: a. personel b. fasilitas c. prosedur operasi bandar dan d. sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara. (2) - Sumber daya manusia terdiri atas sumber daya manusia di bidang: a. Pesawat udara b. angkutan udara c. kebandarudaraan d. navigasi penerbangan e. Keselamatan penerbangan dan f. keamanan penerbangan. (3) - Fasilitas Bandar udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan, Peralatan Bandar Udara, utilitas Bandar Udara dan Pelayanan Darurat Bandar Udara (4)	-
95	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	Kebutuhan angkutan (demand) meliputi: 1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau. 2. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan angkutan penumpang, angkutan kendaraan R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) di Pelabuhan Sungai dan Danau.	0
96	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta memiliki Trayek Tetap dan Teratur dan/atau Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sesuai PM 61 Tahun 2021.	0

97	2.15.000203	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana c. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemerikba prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana dan e. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.	-
98	2.15.000204	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum	-
99	2.15.000205	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi: a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan b. gambar c. data d. jadwal e. spesifikasi f. metode g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL- dan i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.	-
100	2.15.000206	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Laporan	Menurut Fungsinya Perkeretaapian terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapin khusus, perkeretaapian khusus hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.	-
101	2.15.000207	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian umum pada jalur melintasi daerah kabupatan/kota dan jalur dalam satu kab/kota, Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi	-
102	2.15.000209	Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Laporan	1. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian antarkota yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota. 2. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. 3. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian yang tersambung satu dengan yang lain dapat berupa: a. keterpaduan secara fisik baik berupa perpotongan atau persinggungan simpul yang berada pada jalur kereta dan/atau b. keterpaduan pelayanan angkutan kereta api.	-
103	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	0
104	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan	0
105	2.15.000217	Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya satu kapal yang memenuhi Persyaratan teknis /kelaikan dan rencana trayek yang dilayani	Dokumen	Pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan sanggup memiliki minimal satu kapal sesuai persyaratan teknis/kelaikan dan rencana trayek yang akan dilayani.	0
106	2.15.000220	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal	Dokumen	Pertimbangan atau rekomendasi teknis yang diberikan oleh direktur jenderal terkait suatu kegiatan, izin, atau kebijakan.	-
107	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	0
108	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	0
109	2.15.000226	Rancang Bangun	Dokumen	a. desain arsitektur meliputi eksterior dan b. desain struktur c. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing, d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan dan f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.	-
110	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan penunjang mobilitas penduduk di wilayah tersebut.	0
111	2.15.000229	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
112	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan yang ditetapkan dengan KP 432 Tahun 2017	1
113	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	0

114	2.15.000236	Rencana teknis bangunanpelabuhan yang paling sedikitmemuat:a) gambar yang memuat situasiatau rencana tapak, denah,tampak dan potongan;b) gambar rencana pondasitermasuk detailnya;c) gambar rencana kolom, balok,plat dan detailnya.d) Kondisi tanah(borlog/ stratigrafi).e) Rencana penempatan fasilitasSBNP.f) Koordinat geografis minimal 4(empat) titik yaitu 2 (dua) titikdi sisi dermaga/perairan dan 2(dua) titik di darat.	Dokumen	Dokumen rencana teknis bangunan pelabuhan yang memuat minimal: situasi atau tapak, denah, tampak dan potongan; pondasi dan detailnya; kolom, balok, plat dan detailnya; kondisi tanah (borlog/stratigrafi); rencana penempatan fasilitas sbnp; dan koordinat geografis minimal 4 titik (2 di dermaga/perairan, 2 di darat).	-
115	2.15.000240	Salinan dokumen Rencana IndukPelabuhan;	Dokumen	Salinan dokumen yang memuat rencana induk pelabuhan.	0
116	2.15.000241	Sistem dan prosedur pelayanankapal dan barang	Dokumen	Dokumen atau pedoman yang memuat sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.	0
117	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	0
118	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	0
119	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang	0
120	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.	0
121	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter.	0
122	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	RAK LLAJ Provinsi , memuat: a. sasaran Pemerintah b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian / c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah d. Rencana aksi dan target dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Provinsi , disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.	0
123	2.15.000251	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. kebutuhan kendaraan.	0
124	2.15.000252	Data Kelengkapan Pengajuan Usulan Rute	Dokumen	1. Surat pernyataan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara/Koordinator Wilayah terkait tentang kesiapan operasional bandar udara pada rute-rute yang diusulkan. 2. Kerangka Acuan Keija (Term of Referrence/ TOR) dan perhitungan rincian kebutuhan anggaran biaya dalam 1 (satu) periode pelaksanaan angkutan udara perintis / subsidi angkutan udara kargo. 3. Data dukung per penggal rute: A. Nama rute perintis/subsidi angkutan udara kargo B. Alasan ditetapkan sebagai rute perintis/subsidi angkutan udara kargo, uraikan (sesuai dengan fungsi keperintisan) C. Gambar peta rute perintis/subsidi angkutan udara kargo yang diusulkan. D. Ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara - Jenis moda - Tipe moda - Jarak - Waktu tempuh - Frekuensi / minggu - Kapasitas Tempat duduk - Tarif - Jumlah armada beroperasi	-
125	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	0
126	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), merupakan wilayah daratan dan / atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), terdiri atas: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas b. kawasan kemungkinan bahaya c. kawasan di bawah permukaan d. kawasan di bawah permukaan horizontal- e. kawasan di bawah permukaan dan f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar	-
127	2.15.000255	Trotoar	M2	Tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan hak pejalan kaki dalam berlalu lintas	0

128	2.15.000256	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas	Dokumen	Penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan lalu 2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu 3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. a. Skema Penanganan Lalu Lintas Skema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan. Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa: 1) penetapan prioritas angkutan 2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan 3) pemberian kemudahan bagi penyandang 4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu 5) pemaduan berbagai moda 6) pengendalian lalu lintas pada 7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau 8) perlindungan terhadap lingkungan. b. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas Pemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas dan/ atau persimpangan harus memperhatikan: 1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan 2) dampak terhadap kondisi lalu lintas 3) sinergitas dengan kebijakan lain dibidang lalu lintas dan angkutan Penentuan alternatif skema penanganan lalu lintas dapat dilakukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.	0
129	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.	-
130	2.15.000258	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien	0
131	2.15.000259	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	1
132	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional	0
133	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	0
134	2.15.000262	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan	Dokumen	Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan.	0
135	2.15.000263	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.	Dokumen	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Janngan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman meriuju sekolah	0
136	2.15.000264	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	Dokumen	Evaluasi pengendalian dilakukan melalui: a. Menginventarisasi kondisi jalan yang terdapat ZoSS b. Membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di jalan pada ZoSS yang ada dengan standar teknis, baik geometrik jalan, maupun perlengkapan jalan c. Menganialisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada dan d. Peninjauan kembali peraturan/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS	0
137	2.15.000265	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS	Dokumen	Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pentahapan Perencanaan evaluasi yang dimulai sejak awal program RASS. Tahapan penentuan program adalah: 1) penetapan sasaran 2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan pesepeda saat 3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.	0
138	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian paling sedikit: 1. Pengemudi ….orang. 2. Pengemudi cadangan …. orang. 3. Kondektur…. orang. 4. Pembantu pengemudi …. orang. 5. Mekanik….orang.	0
139	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	0

140	2.15.000268	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.	0
141	2.15.000269	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berisikan: 1. Pendahuluan 2. Dasar 3. Tujuan dan sasaran 4. Profil perusahaan 5. Struktur sistem manajemen keselamatan 6. Elemen dan ekspektasi 6.1. Komitmen dan kebijakan 6.2. Pengorganisasian 6.3. Manajemen bahay dan resiko 6.4. Fasilitas perbaikan dan perbaikan kendaraan bermotor 6.5. Dokumentasi dan data 6.6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan 6.7. Tanggap darurat 6.8. Pelaporan kecelakaan internal 6.9. Monitoring dan evaluasi 6.10. Pengukuran Kinerja LAMPIRAN	0
142	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun	0
143	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	0
144	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	0
145	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	-
146	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman	0
147	2.15.000275	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan e. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan f. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan g. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu h. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan i. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota meliputi: a. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan b. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan c. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan d. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan e. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu f. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan g. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.	0
148	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	0
149	2.15.000277	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	Ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria a. Tingkat permintaan angkutan b. Keterpaduan pelayanan angkutan c. Jumlah trayek d. Jenis pelayanan angkutan e. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal	0
150	2.15.000278	Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah	0
151	2.15.000279	Data sarana perkeretaapian	Unit	Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi terdiri atas: a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.	-
152	2.15.000280	Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum	-
153	2.15.000281	Data pelayanan angkutan orang	Laporan	a. Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian. b. Pelayanan angkutan orang dengan kereta api dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersil terdiri atas : - Angkutan pelayanan kelas non- dan - Angkutan pelayanan kelas ekonomi d. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan: - kewajiban pelayanan atau - angkutan perintis perkeretaapian.	-
154	2.15.000283	Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara	Dokumen	a) data aksesibilitas dengan ibu kota propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai keterhubungan secara ekonomi yang meliputi: 1) pelayanan dan ketersediaan moda transportasi lainnya meliputi: (a) jenis dan jumlah moda transportasi dan (b) kapasitas tiap moda transportasi. 2) waktu tempuh dengan moda transportasi 3) kondisi kesinambungan pelayanan moda transportasi lainnya.	0

155	2.15.000284	Perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus	Dokumen	Proses perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pemberian persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian b. pemberian izin pembangunan perkeretaapian dan c. pemberian izin operasi perkeretaapian khusus.	-
156	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan	-
157	2.15.000286	Data izin pembangunan	Dokumen	a. Izin pembangunan Perkeretaapian Khusus diterbitkan oleh: - Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk penyelenggaraan yang Jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur dan - Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Direktur Jenderal. b. Permohonan izin pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan: - Surat persetujuan prinsip - Rancang bangun yang dibuat berdasarkan - Gambar-gambar - Data - Jadwal - Spesifikasi - Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan - Metode - Izin mendirikan - Izin Jain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - Rekomendasi dari bupati/walikota yang wiJayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta dan - Melampirkan bukti pembebasan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.	-
158	2.15.000287	Data izin operasi	Dokumen	a. Izin operasi sebagaimana diterbitkan oleh: - Menteri, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari dan - Bupati/walikota, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri. b. Permohonan Izm operasi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: - Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat - Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian.	-
159	2.15.000288	Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Laporan	Menurut Fungsinya Perkeretaapian terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapin khusus, perkeretaapian khusus hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.	-
160	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	-
161	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	Jumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang.	-
162	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.	-
163	2.15.000292	Data jumlah jalur	Jalur	Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.	-
164	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4. dan 5. asal dan tujuan pelayanan trayek.	-
165	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	-
166	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri	-
167	2.15.000297	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat: a. Sistem Perangkat Lunak (Software) b. Sistem Perangkat Keras (Hardware) c. Sistem Perangkat Pikir (Brainware)	-
168	2.15.000298	dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara	Dokumen	Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara dapat disusun seluruh atau sebagian fasilitas Bandar Udara sesuai pentahapan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design), disusun dengan memperhatikan: a. standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas Bandar b. standar pelayanan pengguna jasa bandar dan c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai Aerodrome Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara, paling sedikit memuat: a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas Bandar Udara sesuai ruang lingkup c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); dan e. rencana anggaran biaya	-

169	2.15.000300	Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi	Dokumen	Komponen Perhitungan Tarif meliputi: - Biaya Langsung - Biaya Tidak Langsung - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 100% - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 70% Besaran tarif dasar sebagai berikut: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.159 (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut: a. Tarif Batas Atas: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.155 (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 172 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang Kilometer. b. Tarif Batas Bawah: 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp. 95 (sembilan puluh lima rupiah); 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 106 (seratus enam rupiah).	-
170	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	Persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
171	2.15.000302	Data Infrastruktur Penunjang	Unit	fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan Bandar Udara, antara lain fasilitas perbengkelan Pesawat Udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan	-
172	2.15.000304	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	-
173	2.15.000305	Grosse akta kapal	Dokumen	Grosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta	0
174	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	0
175	2.15.000307	Surat ukur kapal yang masih berlaku	Dokumen	Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran	0
176	2.15.000308	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku	Dokumen	Sertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian	0
177	2.15.000310	Data awak kapal	Dokumen	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya sesuai PM 12 Tahun 2021	0
178	2.15.000311	Data Komponen substantif	Dokumen	Komponen substantif merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagai berikut: a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat b. kapasitas pelayanan bandar c. rute d. koordinasi pelayanan operasional bandar dan e. personel penerbangan di bandar udara.	-
179	2.15.000312	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	1
180	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya	-
181	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	0
182	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	-
183	2.15.000323	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	1
184	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau	0
185	2.15.000325	Dokumen sertifikasi pengawakan	Dokumen	Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Masa berlaku adalah 1 tahun.	0
186	2.15.000326	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran	Orang	Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	0
187	2.15.000327	Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha	Dokumen	Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha. Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional	0
188	2.15.000328	Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.	0
189	2.15.000329	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.	0

190	2.15.000330	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.	0
191	2.15.000331	Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	0
192	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	0
193	2.15.000333	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Dokumen	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdiri dari: 1. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2. Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Perizinan Berusaha Pembangunan adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk memulai pembangunan TUKS. Perizinan Berusaha Pengoperasian adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk mengoperasikan TUKS.	0
194	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.	1
195	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya	0
196	2.15.000345	Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Regulasi	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1
197	2.15.000346	Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau	Unit	Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan sungai dan danau yan gbelum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau	3
198	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	1
199	2.15.000349	Data Fasilitas Pelabuhan	Dokumen	Fasilitas Pelabuhan terdiri Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya	0
200	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang	0
201	2.15.000351	Perjanjian konsesi pengusahaan	Dokumen	Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.	1
202	2.15.000352	Data badan usaha yang telah memperolah izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan dan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi. Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan. Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dapat mencakup kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut, penyewaan peralatan bongkar muat, penyewaan peralatan jasa pengurusan transportasi, penyewaan peralatan tallg mandiri, penyewaan peralatan depo peti kemas, dan/atau penyewaan peralatan perbaikan dan pemeliharaan Kapal Kegiatan usaha tally mandiri merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. Kegiatan usaha depo peti kemas meliputi penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas, kegiatan konsolidasi bongkar atau muat barang dari dan ke dalarn peti kemas yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (less than container load cargo), atau kegiatan lain sesuai dengan Pasal 30 PP No 31 Tahun 2021	1
203	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0

204	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
205	2.15.000358	Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan	Unit	Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau	3
206	2.15.000363	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan	Regulasi	penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1
207	2.15.000365	Data Komponen penunjang	Dokumen	Komponen penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut: a. Sumber daya manusia b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Anggaran Belanja d. Asset/Barang Milik Negara (BMN); dan e. Hirarki Bandar Udara.	-
208	2.15.000370	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pengumpan regional dan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Pelabuhan, serta Dokumen (P3D) administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.	0
209	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin	0
210	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keputusan penetapan trayek/lintas merupakan salah satu syarat adminitrasi permohonan pembangunan pelabuhan	0
211	2.15.000377	Data jumlah izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan	Unit	Fasilitas Pelabuhan terdiri Jenis, Jumlah dan Kondisi dari Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya	0
212	2.15.000378	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0
213	2.15.000379	Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	Pengawasan sebagaimana meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.	1
214	2.15.000381	tahapan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	Tahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan (demand) pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian analisis terhadap: a. rencana tata guna lahan hingga desain b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan c. rencana tata letak fasilitas bandar dan d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiaptiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (ultimate phase).	0
215	2.15.000393	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Jalan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap: 1. Pemenuhan persyaratan laik fungsi 2. Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan 3. Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan 4. Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu dan 5. Penanganan korban kecelakaan.	0
216	2.15.000394	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	RUNK LLAJ memuat: a. visi dan b. c. d. dan e. Program Nasional KLLAJ. Dan penyusunan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang b. rencana pembangunan jangka menengah c. perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun dan d. tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Deuelopment Goals/ SDG&s).	0
217	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun	0
218	2.15.000396	Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan c. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan Perkotaan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan e. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan f. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan g. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul moda transportasi lain sebagai Trayek pemadu h. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan i. mekanisme koordinasi dalam penyusunan dan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.	0

219	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara	-
220	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wialayah	Dokumen	Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antarpulau dan antarprovinsi, serta keterkaitan antarkawasan kabupaten / kota.	0
221	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. b. c. pengamatan (Surveillance); d. pemantauan (Monitoring); dan/atau e. pengujian (test).	-
222	2.15.000400	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen	Koordinasi dilakukan oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelayanan jasa kebandarudaraan Pelayanan jasa Kebandarudaran meliputi pelayanan jasa Pesawat Udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah dan d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.	-
223	2.15.000401	Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan	Dokumen	Pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dikenakan tarif jasa kebandarudaraan. Tarif pelayanaan jasa kebandaraudaraan terdiri dari : a. tarif jasa pendaratan pesawat b. tarif jasa penempatan pesawat c. tarif jasa penyimpanan pesawat d. tarif jasa penumpang pesawat udara (JP2U); e. tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U); f. tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check - in counter); dan g. tarif jasa pemakaian garbarata (aviobridge). ketentuan perhitungan tarif mengacu pada PM 36 Tahun 2014	-
224	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian	-
225	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	-
226	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	-
227	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	Alat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera mem perlam bat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.	-
228	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	Bangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.	-
229	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	-
230	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	-
231	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.	-
232	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	0
233	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	-
234	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	kepriprov.go.id [1 domain]
2	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	[nama sub domain].kepriprov.go.id [156 Subdomain]
3	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0
4	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0
5	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	0

6	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah	0
7	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.	0
8	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	800
9	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0
10	2.16.000077	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0
11	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	0

12	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.	0
13	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	1
14	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	1
15	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi - Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	35
16	2.16.000084	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/ kota	-Perhitungan Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah melalui tahapan : a.Pemerintah Daerah mengajukan pertimbangan kelaikan operasi kepada Menteri dan mengajukan pertimbangan kelaikan keamanan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan b.pengajuan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui portal resmi yang diselenggarakan oleh Menteri dengan melampirkan surat permohonan pertimbangan kelaikan operasi dan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala c.Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan evaluasi mandiri atas jaringan intra Pemerintah Daerah yang dikelolanya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh d.Menteri melakukan penilaian kelaikan operasi berdasarkan pendataan dan evaluasi mandiri Pemerintah Daerah e.Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber melakukan penilaian kelaikan keamanan berdasarkan pendataan dan evaluasi mandiri Pemerintah Daerah f.sesuai hasil	0
17	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1

18	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	1
19	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	1
20	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	2 GBps
21	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	36
22	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.	35
23	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021	3
24	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	12
25	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	0

26	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	6
27	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	28
28	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	9
29	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	16
30	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	1
31	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	8
32	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	,898%, Memory 5
33	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.	3
34	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)	178

35	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)	1
36	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output	0
37	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.	0
38	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	1
39	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	2
40	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	1
41	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	1
42	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	0
43	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	12458596
44	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	95
45	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	395
46	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	4

47	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]	12
48	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	0
49	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola - Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus	0
50	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional	0
51	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera	6430
52	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	818
53	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	1700
54	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka	954
55	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	0
56	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi	0
57	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	4
58	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	0
59	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain - Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	0
60	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	5

61	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	6
62	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka	12458596
63	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.	0
64	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda	0
65	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	0
66	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	1
67	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda	5
68	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	460
69	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	460
70	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	16
71	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	28
72	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	458
73	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.	0

74	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	126
75	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	0
76	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	0
77	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.	1
78	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	- Perhitungan Pengaturan relasi media - Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers,	0
79	2.16.000156	Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Unit	- Perhitungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah -Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	41
80	2.16.000157	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	kabupaten/kota	-Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan Sosialisasi program Provinsi Cerdas -Sosialisasi program Provinsi Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan provinsi cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah kota/kabupaten yang berada pada wilayah provinsi .	0
81	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen	60
82	2.16.000161	Jumlah Menara Telekomunikasi	Unit	Bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi	1750
83	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat. - pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T	22

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	0
2	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	0
3	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	0
4	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	0
5	2.17.000011	Koperasi usaha simpan pinjam	Unit Usaha	Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.	19
6	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	157
7	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	7

8	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	7
9	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	0
10	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	7
11	2.17.000017	Koperasi Yang Diberikan penilaian manajemen	Unit Usaha	Penilaian Manajemen adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	7
12	2.17.000018	Koperasi Yang Diberikan penilaian permodalan	Unit Usaha	Penilaian Permodalan adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	7
13	2.17.000019	Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	24
14	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7
15	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7
16	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0
17	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0
18	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0
19	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	0

20	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	395
21	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	0
22	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	395
23	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	0

24	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	0
25	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	0
26	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	0
27	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	0
28	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	0
29	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	0
30	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	0
31	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	43
2	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	6
3	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	2608
4	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1
5	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1
6	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	0
7	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	0

8	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	0
9	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	329
10	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	2608
11	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	0
12	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi	0
13	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	&Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal &	0
14	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0
15	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0
16	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	0
17	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	1
18	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1

19	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi .	Dokumen	Peta Potensi Investasi Provinsi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Provinsi yang mempunyai nilai ekonomi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	0
20	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	0
21	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	15
22	2.18.000033	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	0
23	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	430
24	2.18.000035	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	430
25	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	0
26	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	0
27	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	0

28	2.18.000039	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	0
29	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	430
30	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	0
31	2.18.000044	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri	1

Bidang Urusan: Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	0
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	35
3	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	Wirausaha muda usia 16-30 tahun yang memiliki Nomor Induk NIB untuk difasilitasi agar terafiliasi dengan dunia usaha	25
4	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	1
5	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	1
6	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	0
7	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	1
8	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	0
9	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	758
10	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	53
11	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	2
12	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	2
13	2.19.000079	kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga / Pekan olahraga Daerah pada berbagai cabang olahraga (PORDA)	1
14	2.19.000080	kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan paralimpik di tingkat provinsi (PERPARPROV)	1
15	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	0
16	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	53
17	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	0
18	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	5
19	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0

20	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1
21	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0
22	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0
23	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	7
24	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	6286
25	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	8

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	43
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	57
3	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	800
4	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.	5
5	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	100
6	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	57
7	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	6
8	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	0

9	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	100
10	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	4
11	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.	2
12	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	57
13	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	4
14	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	7.01
15	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	5
16	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	-
17	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	7.01

18	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	57
19	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	100
20	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	100
21	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	57
22	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	11
3	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1
4	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	7
5	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0
6	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Provinsi	2
7	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36
8	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	36

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.22.000172	pranata tradisional yang dibina	Kegiatan	Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat	0
2	2.22.000173	Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	Unit	Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	120
3	2.22.000174	Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	- Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	0
4	2.22.000175	Produk Hukum Desa Adat	Dokumen	- Produk : Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. - Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	0
5	2.22.000176	Produk Hukum Desa Adat yang tersedia	Dokumen	- Produk : Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.	0
6	2.22.000177	Sarana Pembinaan Sejarah	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	0

7	2.22.000181	Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	Unit	- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	1
8	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	1
9	2.22.000186	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	&- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pendidikan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	0
10	2.22.000187	Sarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.	1

11	2.22.000189	SDM Lembaga Adat yang dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.	15
12	2.22.000191	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	0
13	2.22.000193	Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	80
14	2.22.000194	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Sertifikasi	Sertifikat	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	2

15	2.22.000195	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. -Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	0
16	2.22.000198	Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.	0
17	2.22.000202	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Pranata Adat : Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.	80
18	2.22.000205	Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0
19	2.22.000206	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0

20	2.22.000207	Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra	Dokumen	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.	0
21	2.22.000208	Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Renja Perangkat Daerah : Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	0
22	2.22.000209	Insan Perfilman Daerah	Orang	Jumlah Insan Perfilman Daerah	0
23	2.22.000210	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang	Pelatihan peradilan adat adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan peradilan adat. Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan. Keputusan dari peradilan adat bersifat mengikat dan final. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	0
24	2.22.000214	Jumlah insan perfilman yang dibina	Orang	Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.	0

25	2.22.000215	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan	Promosi cagar budaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran, apresiasi, dan partisipasi masyarakat terhadap warisan budaya yang penting bagi sejarah dan identitas budaya. Kegiatan promosi cagar budaya bertujuan untuk menarik minat masyarakat lokal maupun internasional, serta mendukung pelestarian dan keberlanjutan warisan budaya promosi cagar budaya dapat dilakukan dengan cara: - Pameran atau even festival budaya - Wisata budaya dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah - Sosialisasi melalui berbagai media - Pengembangan Aplikasi dan Situs Web Interaktif atau virtual reality - Pendidikan dan pelatihan di sekolah, dengan memasukkan materi cagar budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan informal - Kerjasama dengan Komunitas Lokal - produksi Souvenir dan Cinderamata - Kampanye Digital dan Influencer - Program Sponsor yaitu membuat program dimana individu, kelompok atau perusahaan dapat mensponsori bagian tertentu dari cagar budaya yang bisa dilakukan dalam	0
26	2.22.000225	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Unit	Penyediaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu barang yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk, jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama, pemeliharaan dilakukan baik sehari-hari, berkala, darurat maupun preventif, terhadap sarana dan prasrana museum. hal yang biasa dilakukan antara lain untuk pemeliharaan terkait pemeliharan bangunan museum, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan lainnya. Untuk penyediaan terkait kebutuhan peralatan untuk museum AC, dehumifre, data logger, dll untuk mendukung kegiatan museum. Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk mmeberikan layanan museum bagi masyarakat /pengunjung, seperti : 1. revittalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain	0
27	2.22.000227	Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Penerima/Pengelola yaitu Lembaga Budaya	0

28	2.22.000228	Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan.	0
29	2.22.000230	Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan	0
30	2.22.000231	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan	Pemantauan adalah pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui ketentuan perundangan yang berlaku.	1
31	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab/Kota. Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. PPKD disusun dengan tahapan: 1. perencanaan 2. konsolidasi data 3. pengolahan data 4. analisis atas hasil pengolahan data 5. penyusunan naskah 6. penetapan PPKD	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi yang berada diwilayah provinsi	2
2	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain yang berada di wilayah provinsi	0
3	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	0
4	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	0
5	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan yang berada di wilayah Provinsi	189
6	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (pasal 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 20023 tentang Sisdiknas). Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan khusus yang berada diwilayah provinsi.	0
7	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Rata-Rata kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum per hari di wilayah provinsi baik secara onsite maupun online	43039
8	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Rata-rata kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	0
9	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) per hari di perpustakaan sekolah menengah (SMA/sederajat) di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	0
10	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) perhari di perpustakaan satuan pendidikan khusus baik secara online maupun secara onsite	0

11	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan umum yang berada di wilayah Provinsi	1900
12	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan khusus yang berada di wilayah Provinsi	0
13	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Sekolah Menengah (SMA/SMK sederajat) di wilayah Provinsi	0
14	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi	0
15	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan di wilayah provinsi	0
16	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/produsen	Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang berada di wilayah Propinsi	0
17	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	Kegiatan pengolahan meliputi verifikasi, entry data (deskripsi Bibliografis, nomor klasifikasi,subjek, abstrak), upload cover, memasang RFID, tagging dan label. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi hasil serah simpan KCKR di wilayah provinsi yang sudah diolah	0

18	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	Entry	Katalog Induk Daerah (KID) merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan daerah tertentu di wilayah Provinsi yang diinventarisasi dan didayagunakan sebagai alat silang layan melalui jaringan perpustakaan. Katalog Induk Daerah berfungsi untuk meningkatan jaringan kerjasama katalog antar perpustakaan yang ada di wilayah provinsi tersebut Literatur sekunder merupakan terbitan yang dapat membantu pemustaka untuk mengetahui informasi tentang koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan secara lebih mudah sehingga pemustaka dapat menemukan bahan perpustakaan yang diperlukan secara cepat. Literatur sekunder merupakan suatu alat temu kembali informasi bagi pemustaka. Kegiatannya mengumpulkan semua data bibliografis koleksi setiap perpustakaan dan diidentifikasi ketersediaan judul yang sama dengan memberikan kode lokasi perpustakaan. Melalui kode lokasi ini pemustaka dapat diarahkan di perpustakaan mana saja buku tersebut dapat diakses. Dengan adanya jejaring perpustakaan, akses temu kembali	0
19	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	naskah	Bibliografi Daerah berfungsi untuk menginventarisasi terbitan terbaru di suatu wilayah (Provinsi). Bibliografi Daerah juga sebagai alat pengawasan bibliografi. Data bibliografi terbitan dan publikasi di wilayah Provinsi meliputi terbitan Buku, media cetak terbitan berseri, bahan kartografi, rekaman suara analog, rekaman video analog, Buku elektronik, media terbitan berseri elektronik, bahan kartografi elektronik, hasil penelitian elektronik dengan periode terbit tahunan, musik digital, film digital, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di wilayah provinsi tersebut. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah terbitan bibliografi daerah pada kurun waktu periode satu tahun	0
20	2.23.000073	Pelestarian naskah kuno milik Provinsi	naskah	Naskah kuno semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah naskah kuno milik provinsi yang dilestarikan	1

21	2.23.000074	Koleksi khas daerah yang dimiliki provinsi	Eksemplar	Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh Provinsi (kab/kota)	0
22	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiiki	Eksemplar	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan	0
23	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegitan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi	0
24	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	0
25	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	0
26	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	0
27	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada diwilayah provinsi (tidak termasuk pustakawan)	0

28	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah provinsi	51
29	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	0
30	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	0
31	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan satuan pendidikan Khusus di wilayah provinsi	0
32	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah provinsi	17082
33	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah provinsi	0
34	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA /SMK/Sederajat) yang berada di wilayah provinsi	0
35	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi	0
36	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. Jumlah Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	0
37	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	0

38	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi (duta baca/bunda baca,dll.) diwilayah Provinsi	0
39	2.23.000093	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	0
40	2.23.000094	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan Jumlah perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	0
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	48
3	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	6
4	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	2
5	2.24.000007	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum	0
6	2.24.000011	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip	Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis maupun bimbingan konseling Adapun kegiatannya meliputi daftar arsip usul musnah, usul serah	0

7	2.24.000012	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip - penyerahan dan pemusnahan arsip	0
8	2.24.000014	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	Penyelamatan Arsip Penggabungan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip - penyerahan dan pemusnahan arsip	0
9	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia	0
10	2.24.000016	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0
11	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0
12	2.24.000018	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0
13	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0
14	2.24.000020	Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0
15	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	1
16	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.	49
17	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	3732

18	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	0
19	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI	0
20	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	0
21	2.24.000035	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip	0
22	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	55

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.	-
2	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	1
3	3.25.000062	Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dokumen yang disusun untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	0
4	3.25.000086	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Pemasaran oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38
5	3.25.000087	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60
6	3.25.000088	Izin Usaha Penunjang Operasional Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Penunjang Operasional Pemasaran oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32
7	3.25.000089	Izin Usaha Penunjang Operasional Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Penunjang Operasional Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11
8	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	-
9	3.25.000099	Kapal perikanan yang diawasi dalam Kegiatan penangkapan ikan	Unit	Data kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	3134
10	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	0
11	3.25.000108	Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penambahan ilmu dan pengetahuan melalui pendampingan, teknologi informasi dan penyelenggaraan pelatihan	0
12	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	7
13	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel	114
14	3.25.000128	Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang dicadangkan	1945730.92
15	3.25.000129	Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan	843609.3
16	3.25.000130	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi	Ha	Luasan Area Penggunaan Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	0

17	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	Jumlah masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil	0
18	3.25.000132	Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	Jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0
19	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.	0
20	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Orang	Jumlah pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	7
21	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Polisi Khusus Wilayah Pesisir Pulau - Pulau Kecil (Polsus PWP3K)	4
22	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.	1
23	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan.	318196.43
24	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (10 GT Sampai dengan 30 GT)	3
25	3.25.000196	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (Sampai dengan 10 GT)	3
26	3.25.000198	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	3
27	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sampai dengan 10 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	3
28	3.25.000203	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah banyaknya dokumen terkait prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis yang dikeluarkan untuk Izin melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang mencakup di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu	4
29	3.25.000226	Sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1
30	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan g. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik.	36
31	3.25.000230	Speedboat pengawas	Unit	Jumlah speedboat pengawasan yang dimiliki	6

32	3.25.000260	Wadah Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Wadah dan segala bentuk bangunan, jalan produksi, saluran irigasi, dan sejenisnya yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya berdasarkan potensi dan tercantum dalam RTRW: - data luas potensi lahan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas lahan existing pemanfaatan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas potensi lahan budidaya air tawar (ha)	-
33	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	Jumlah Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	35
34	3.25.000262	Unit penangkapan ikan	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	45834
35	3.25.000263	Kapal di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi	45834
36	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan Penumbuhan Pokmaswas dilakukan atas prakarsa masyarakat sendiri sedangkan pengembangan Pokmaswas dapat difasilitasi oleh Pemda. Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pusat	50
37	3.25.000269	Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	Unit	Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawsan Konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah	1
38	3.25.000270	Unit kapal yang aktif (Memiliki Izin yang masih berlaku)	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan yang memiliki izin yang masih aktif sesuai dengan kewenangan Provinsi	817
39	3.25.000271	Pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (*stakeholder*) yang memiliki kapal penangkap ikan yang masih aktif	16828
40	3.25.000272	Permohonan lokasi pengembangan pelabuhan perikanan yang disertai dengan Detail Engineering Designed (DED)	Dokumen	Jumlah surat permohonan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan	0
41	3.25.000273	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang ditolak	0
42	3.25.000274	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut	52
43	3.25.000275	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan	0
44	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton	Jumlah penggunaan pakan ikan untuk pembudidayaan ikan di laut	26
45	3.25.000277	Poduksi benih Ikan Laut	Ekor	Produksi benih ikan laut hasil budidaya	17283
46	3.25.000278	Jumlah produksi bibit rumput Laut	Ton	Jumlah produksi bibit rumput laut	15.6
47	3.25.000279	Alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Jumlah alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	19
48	3.25.000280	Lokasi rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Lokasi	Jumlah lokasi rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	35
49	3.25.000282	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
50	3.25.000283	permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
51	3.25.000284	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	0

52	3.25.000285	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
53	3.25.000286	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses	Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
54	3.25.000287	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	0
55	3.25.000288	Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
56	3.25.000289	Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
57	3.25.000290	Rekomendasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diterbitkan	0
58	3.25.000291	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
59	3.25.000292	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
60	3.25.000293	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	50
61	3.25.000296	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang ditolak	0
62	3.25.000297	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut	58
63	3.25.000298	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan	0
64	3.25.000299	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	817
65	3.25.000300	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	817
66	3.25.000301	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	817
67	3.25.000303	Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Perkara	Jumlah Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	4
68	3.25.000304	Peta rawan pelanggaran usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	Peta Rawan pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	1
69	3.25.000305	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan	Program/ Kegiatan	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui APBD	1
70	3.25.000306	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis perizinan berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	3
71	3.25.000310	Pelabuhan di Wilayah Perairan Darat	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi di wilayah perairan darat	-
72	3.25.000311	Jumlah dan jenis alat tangkap di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di wilayah perairan darat yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	-
73	3.25.000312	Kapal di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan di wilayah perairan darat yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi	-
74	3.25.000313	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap (Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT) yang menjadi kewenangan Provinsi	3

75	3.25.000318	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	3
76	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	Jumlah Lokasi Rehabilitasi Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	0
77	3.25.000321	Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Ha	Luasan Lahan Rehabilitasi pada Perairan Pesisir sesuai dengan alokasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	0
78	3.25.000322	Alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Unit	Jumlah alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	-
79	3.25.000323	Provinsi yang telah menyusun materi teknis muatan pesisir pada RTRW Provinsi/dokumen final RZWP-3-K	Dokumen	Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K merupakan dokumen tentang muatan tata ruang perairan pesisir dan pulau-pulau yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya akan diintegrasikan dalam RTRW Provinsi	1
80	3.25.000324	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kelompok	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-
81	3.25.000325	Data pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	10
82	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Kasus	Data pelanggaran kapal perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	10
83	3.25.000327	Peta rawan pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	Peta rawan pelanggaran perikanan tangkap sampai 12 mil	1
84	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Pengawas Perikanan	17
85	3.25.000329	Peta Rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Dokumen	Peta rawan pelanggaran ruang laut sampai 12 mil	1
86	3.25.000330	Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	3134
87	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kasus	Data kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10
88	3.25.000332	Peta Rawan pengawasan perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	Peta rawan pelanggaran pengawasan perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1
89	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaku Usaha	Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	7
90	3.25.000334	Kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	Data kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	0
91	3.25.000336	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0

92	3.25.000337	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui	Dokumen	Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	576
93	3.25.000338	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0
94	3.25.000339	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	121
95	3.25.000343	Saluran di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meter Lari	data saluran irigasi perikanan dan jalan produksi perikanan budidaya	-
96	3.25.000344	Sampel pengujian penyakit ikan di laut yang diuji	Sampel	Jumlah sampel pengujian penyakit ikan	1
97	3.25.000345	Sumber Daya Manusia Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	data SDM Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	1
98	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	Jumlah lahan pembudidayaan ikan dalam Hektar	364.69
99	3.25.000347	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	0
100	3.25.000348	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui	Dokumen	Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	241
101	3.25.000349	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT&	0
102	3.25.000350	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah penerbitan Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang merupakan kewenangan Provinsi	0
103	3.25.000351	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diusulkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diusulkan	0
104	3.25.000352	PermohonanÂ PenerbitanÂ RekomendasiÂ IzinÂ UsahaÂ PerikananÂ BidangÂ PembudidayaanÂ IkanÂ yangÂ UsahanyaÂ LintasÂ DaerahÂ Kabupaten/KotaÂ dalamÂ 1Â (Satu)Â DaerahÂ ProvinsiÂ yangÂ diproses	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diproses	0
105	3.25.000353	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diterbitkan	0
106	3.25.000354	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	&Jumlah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah penerbitan enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing&	0
107	3.25.000355	Rekomendasi teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diusulkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis perizinan berusaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diusulkan	0
108	3.25.000356	Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diproses	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diproses	0

109	3.25.000357	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis untuk penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) yang diterbitkan	0
110	3.25.000358	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0
111	3.25.000359	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diusulkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diusulkan	0
112	3.25.000360	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diproses	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diproses	0
113	3.25.000361	Rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	0
114	3.25.000362	Wadah Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Data wadah pembudidayaan di laut (KJA, Jaring Tancap, dan kebun bibit rumput laut)	6000
115	3.25.000363	Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	Jumlah Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	26
116	3.25.000364	Pupuk pembudidayaan ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	Jumlah pupuk pembudidayaan ikan di Air Payau dan Air Tawar	0
117	3.25.000365	Produksi Benih	Ekor	Produksi benih ikan air payau dan air tawar yang digunakan untuk usaha budidaya air payau dan air tawar	17283
118	3.25.000366	Produksi induk	Ekor	Jumlah produksi induk	120
119	3.25.000367	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1
120	3.25.000368	Laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	Dokumen	Jumlah laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	1
121	3.25.000371	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran sesuai Skala Usaha dan Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	98
122	3.25.000372	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	98
123	3.25.000373	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	0
124	3.25.000374	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	0
125	3.25.000375	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	0
126	3.25.000376	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitasi	0

127	3.25.000377	Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah hasil pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi merupakan jumlah dokumen hasil rekapitulasi pemetaan kebutuhan bahan baku usaha perikanan Setiap pemegang izin usaha Bidang Pengolahan Ikan wajib membuat laporan kegiatan Usaha yang memuat asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan dan wilayah pemasaran	0
128	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	98
129	3.25.000379	Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	98
130	3.25.000380	Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	98
131	3.25.000381	Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	98
132	3.25.000382	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0
133	3.25.000383	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0
134	3.25.000385	Sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
135	3.25.000386	Prasarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data prasarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
136	3.25.000387	Volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0

137	3.25.000388	Volume Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
138	3.25.000389	Sarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data sarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
139	3.25.000390	Prasarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data prasarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
140	3.25.000392	Hari Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas Kelautan dan perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	0
141	3.25.000393	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Dirawat	Unit	1) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan 2) Perawatan kapal pengawas Kelautan dan Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan. Perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas Kelautan dan perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) 3) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 4) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul), perbaikan setengah bagian mesin (in frame overhaul), perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul), kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi, pergantian plat kapal (replating), dan suku 5) Perawatan darurat meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar	6
142	3.25.000394	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)	Forum	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah merupakan Forum koordinasi antar aparat Penegakan Hukum pada tingkat Daerah Provinsi untuk mengkoordinasikan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di masing-masing wilayah kerjanya sehingga tercipta sinergisitas antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan TPKP di Daerah. Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur di mana seluruh Pemerintah Daerah Provinsi (34 provinsi) telah dibentuk. Forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah Provinsi tersebut berfungsi untuk: - Koordinasi kegiatan penyidikan TPKP tingkat - Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik TPKP pada tingkat - Penetapan jenis TPKP yang diprioritaskan untuk di proses secara - Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat - Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi TPKP secara - Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan - Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan - Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan - Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan TPKP secara berkelanjutan.	0
143	3.25.000395	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Pelaku Usaha	1) Pelaku Usaha Pemanfaatan SDK yaitu setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan yang terdiri dari: pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan pengangkatan benda muatan kapal ekstraksi pelaksanaan bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km2 (seratur kilometer persegi); dan/atau pipa dan/atau kabel bawah penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum (36001); penampungan dan penyaluran air baku (36002).	0

144	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	1) SDM Pengawasan SDKP terdiri dari Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelollan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (Polsus PWP3K) dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat dan c. sehat jasmani dan rohani 3) Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K meliputi: a. pegawai negeri sipil yang membidangi pengawasan PWP3K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya, dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b dengan pendidikan paling rendah setingkat dan b.telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 4) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum e. sehat jasmani dan rohani f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan	9
145	3.25.000397	Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.	10
146	3.25.000398	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Diadakan	Unit	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi/pemerintah daerah. Pengadaan kapal pengawas kelautan dan perikanan bagi Pemda Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan provinsi yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas IV (12-&25 meter) dan kelas V (&12 meter).	0
147	3.25.000399	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	1) Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya kelautan dan 3) Bangunan Operator adalah tempat tinggal untuk pengawas kelautan dan 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dan kelautan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selain benda sitaan 6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap 7) Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan 8) Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, dan kapal ikan illegal hasil tangkapan.	0

148	3.25.000400	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang per orang atau korporasi dengan ancaman hukuman pidana antara lain berupa kurungan badan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU bidang kelautan dan perikanan. 2) Sanksi pidana di bidang kelautan dan perikanan diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh orang per orang dan/atau korporasi yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 3) Penanganan perkara pidana bidang kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang yang menjadi kewenangannya atau KUHAP. 4) Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan dalam rangka pengangkatan Pejabat PPNS Perikanan, maka PPNS Perikanan Pusat memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia sedangkan PPNS Perikanan Provinsi memiliki wilayah kerja pada wilayah provinsi yang bersangkutan 5) Tahapan penanganan perkara pidana antara lain terdiri dari: a. Pemeriksaan b. Proses penyidikan c. Penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut d. penanganan barang bukti dan awak kapal/tersangk/non tersangka.	0
149	3.25.000412	Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	Dokumen Final RZWP-3-K yang memuat Peta Struktur Ruang Laut, Peta Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta KKPRL dan Matriks KKPRL	1
150	3.25.000413	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memuat dengan dokumen final pengaturan ruang darat dan pengaturan ruang laut.	0
151	3.25.000414	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen	Dokumen Hasil Rekomendasi dan Evaluasi dalam rangka peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir (RZWP-3-K)	0
152	3.25.000415	Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	0
153	3.25.000416	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	24558
154	3.25.000417	Data dan Informasi perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	Jumlah Perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan adalah banyaknya dokumen izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir dan laut yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.	1
155	3.25.000418	Volume Produksi Garam	Ton	Volume produksi garam lokal pada SEGAR merupakan Jumlah volume garam yang dihasilkan oleh rakyat maupun perusahaan yang berada di wilayah SEGAR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lainnya yang tidak berada pada wilayah SEGAR.	-
156	3.25.000419	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi	Lokasi	Data lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi sesuai kewenangan Provinsi	7
157	3.25.000420	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut yang diawasi sampai dengan 12 Mil	7632
158	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	Data pelanggaran bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan	0
159	3.25.000422	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	0
160	3.25.000428	Lahan Garam	Ha	Luas Lahan Garam, Luas area yang digunakan untuk produksi garam	-
161	3.25.000429	Petambak Garam	Orang	Petambak Garam, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi garam	-
162	3.25.000430	Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman	Dokumen	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan menjadi Dokumen Perencanaan dan paling sedikit memuat Detail Engineering Design Usaha Pergaraman dan/atau master plan kawasan.	-
163	3.25.000431	Gudang Garam	Unit	Gudang Garam adalah tempat penyimpanan garam di tempat yang aman dan tidak mengurangi kadar garam yang telah dihasilkan	-
164	3.25.000432	Sarana Usaha Pergaraman	Unit	Sarana Usaha Bagi Petambak Garam seperti : Mesin pemurnian Garam, Mesin Sealer Geomembran dan perlengkapannya, Generator, alat pembersih meja garam, mesin jahit karung	-

165	3.25.000433	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuh kembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit.	0
166	3.25.000434	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	Jumlah kelompok yang mengoperasikan dan memelihara prasarana tambak garam, secara khusus yaitu prasarana saluran irigasi dan kolam penampungan air muda. Untuk operasional serta pemeliharaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat.	-
167	3.25.000435	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru yang melakukan Perizinan Berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi dan juga Persetujuan penangkapan ikan dengan tujuan wisata yang menjadi kewenangan daerah dalam mendukung penangkapan ikan terukur	0
168	3.25.000436	Kegiatan Turnamen Memancing Di Wilayah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kegiatan	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan secara berkala di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	1
169	3.25.000437	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	0
170	3.25.000438	Luas kawasan ekosistem blue carbon Pada Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Ha	Luas kawasan ekosistem blue carbon (Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan) yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	0
171	3.25.000439	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang mengelola dan melestarikan ekosistem padang lamun dan mangrove di luar kawasan hutan yang mengalami peningkatan kapasitas meliputi: - pemahaman terkait pentingnya ekosistem blue carbon - melakukan pemantauan/monitoring, pengukuran dan verifikasi ekosistem blue carbon - melakukan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim blue carbon yang terintegrasi dengan Sistem MRV Blue Carbon	0
172	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Kewenangan Provinsi	98
173	3.25.000441	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi	Sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional yang terkoneksi dari hulu sampai hilir seperti produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.	0
174	3.25.004101	Rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	0
175	3.25.004106	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	1
176	3.25.004107	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	1
177	3.25.004108	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	98
178	3.25.004109	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	98
179	3.25.004110	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan	1
180	3.25.004111	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan	1

181	3.25.004112	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi		Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan	0
182	3.25.004113	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	357406.02
183	3.25.004114	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	40372.27
184	3.25.004124	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	817
185	3.25.004125	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	817
186	3.25.004126	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	817
187	3.25.004138	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	0
188	3.25.004140	Rekomendasi izin tanda daftar Kapal Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	0
189	3.25.004141	Permohonan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	0
190	3.25.004142	UPT Pengelola	Unit	SK KDH Penetapan UPT Pengelola	4
191	3.25.004143	Penyediaan Fasilitas pokok	Unit	Penyediaan Fasilitas pokok berdasarkan sumber dana/anggaran	18
192	3.25.004145	Penyedian fasilitas Penunjang	Unit	Penyediaan Fasilitas penunjang berdasarkan sumber dana/anggaran	25
193	3.25.004146	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan	1.0387E+13
194	3.25.004147	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	0
195	3.25.004148	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	0
196	3.25.004149	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	0
197	3.25.004150	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	0

198	3.25.004151	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis untuk kapal pengangkut hasil budidaya ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur+I61 Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis untuk kapal pengangkut hasil budidaya ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan	0
199	3.25.004152	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis untuk kapal pengangkut hasil budidaya ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur+I61 Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis untuk kapal pengangkut hasil budidaya ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang ditetapkan	0
200	3.25.004153	Izin Usaha Bidang Pembudidayaan yaitu izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pembudidayaan yaitu izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI	0
201	3.25.004154	SOP penerbitan perizinan berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha adalah jumlah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan perizinan berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	0
202	3.25.004155	Persyaratan penerbitan perizinan berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha adalah jumlah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan perizinan berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	0
203	3.25.004156	Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis Rekomendasi Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0
204	3.25.004157	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
205	3.25.004158	Data potensi lahan budidaya berdasarkan RZWP3K	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
206	3.25.004159	Data lahan existing yang sudah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya laut	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
207	3.25.004160	Data jenis ikan / komoditas yang dibudidayakan	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
208	3.25.004161	Data produksi benih dari unit pembenihan/hatchery	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
209	3.25.004162	Data hasil investasi usaha budidaya ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0
210	3.25.004163	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
211	3.25.004164	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota yang memiliki kartu KUSUKA	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
212	3.25.004169	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	1
213	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	0

214	3.25.004171	Sarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Laboratorium Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	3
215	3.25.004172	Prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	2
216	3.25.004173	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	0
217	3.25.004178	Kapal penangkapan ikan sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	Rekomendasi	- Surat rekomendasi Tanda Keterangan Andon yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan Provinsi - Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon. - Rekomendasi yang dikeluarkan berupa surat tanda keterangan andon (STKA)	0
218	3.25.004179	Kapal penangkapan ikan sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	Rekomendasi	Surat rekomendasi Tanda Penangkapan Ikan (STPI) Andon dan tanda daftar penangkapan ikan (TDPI) yang diterbitkan pada perairan yang menjadi kewenangan provinsi	0
219	3.25.004180	Izin penempatan dan pemanfaatan Rumpon	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi surat izin Penempatan Rumpon yang diterbitkan pada perairan yang menjadi kewenangan provinsi	0
220	3.25.004181	Pelabuhan Perikanan	Unit	jumlah prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur	35
221	3.25.004183	Peralatan dan mesin penunjang pendataan penangkapan ikan terukur	Unit	Jumlah sarana pendukung pendataan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	50
222	3.25.004184	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan	1.0387E+13
223	3.25.004185	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan	339331.01
224	3.25.004186	Unit penangkapan ikan	Unit	jumlah sarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	45834
225	3.25.004187	Kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	Kegiatan	Jumlah kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	12
226	3.25.004188	mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan	Unit	Jumlah mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan untuk pembudidaya ikan di air payau atau air tawar	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.26.000006	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola	0
2	3.26.000007	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi	0
3	3.26.000008	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi	0
4	3.26.000009	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Provinsi untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola stimulasi, identifikasi dan Profiling	0
5	3.26.000010	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARPROV melalui SK penetapan oleh Gubernur	0
6	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	0
7	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	Dokumen berisi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata di tingkat provinsi.	0
8	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi	0
9	3.26.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan provinsi)	0
10	3.26.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan provinsi)	0
11	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	0
12	3.26.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	0
13	3.26.000030	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan kajian terkait hasil dari sistem pemasaran yang sudah ada	0
14	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	4

15	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	4
16	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	4
17	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil layanan fasilitasi pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	0
18	3.26.000043	Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	0
19	3.26.000045	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	0
20	3.26.000047	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional serta terintegrasi dengan dokumen RTRW dan RDTR daerah	0
21	3.26.000050	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dokumen yang memuat rekomendasi untuk peningkatan pengembangan daya tarik wisata unggulan di tingkat provinsi.	0
22	3.26.000053	Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	Kawasan pariwisata strategis di tingkat provinsi yang sedang dikembangkan.	0
23	3.26.000055	Laporan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.	0
24	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Laporan berisi hasil dukungan fasilitasi bagi pelaku dunia usaha dalam menghadapi perkembangan teknologi.	0
25	3.26.000058	Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Bidang Pariwisata	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (lsp) p1 di bidang pariwisata.	0
26	3.26.000059	Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 Bidang Pariwisata	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (lsp) p3 di bidang pariwisata.	0
27	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	Laporan berisi hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan jaringan orang kreatif.	0
28	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	Laporan	Melakukan indentifikasi UMKM dan produk-produknya, dan mengklasifikasi produk serta UMKM yang dapat dipasarkan secara lebih luas	0
29	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)	0
30	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	Laporan berisi hasil pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata.	0
31	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang	Jumlah pengunjung yang mengunjungi objek daya tarik wisata di tingkat provinsi.	0

32	3.26.000118	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dokumen	Dokumen yang memuat rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata.	1
33	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah	Pendapatan dari retribusi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi.	0
34	3.26.000142	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi	Unit Usaha	Unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memperoleh sertifikasi resmi sesuai ketentuan.	0
35	3.26.000143	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi	Unit Usaha	Unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memperoleh standarisasi resmi sesuai ketentuan.	0
36	3.26.000148	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait akademisi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur akademisi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
37	3.26.000149	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
38	3.26.000150	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait komunitas penggiat bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur komunitas penggiat bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
39	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	0
40	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&	0
41	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	0
42	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Data	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0
43	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	0
44	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	28
45	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.	0
46	3.26.000170	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata	0
47	3.26.000173	Lokasi pembangunan peningkatan kualitas pada daya tarik wisata unggulan Provinsi yang berbasis alam/budaya/buatan manusia	Lokasi	Mengidentifikasi dan mendata daya tarik wisata unggulan Provinsi yang dilakukan pembangunan/pengembangan fisik dan non fisik	0

48	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	0
49	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	0
50	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan	0
51	3.26.000179	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	0
52	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	0
53	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0
54	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0
55	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0

56	3.26.000184	Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0
57	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata	0
58	3.26.000186	Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	Melakukan bimbimgan teknis/workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM Ekraf melalui program Fasilitasi/pendukungan yang dilakukan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.	0
59	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		Ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop	0
60	3.26.000194	Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	0
61	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.	0
62	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	1
63	3.26.000197	Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan	0

64	3.26.000198	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan	0
65	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0
66	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	0
67	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provins	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0
68	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0
69	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0
70	3.26.000207	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0
71	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati	0
72	3.26.000211	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
73	3.26.000213	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Data mengenai jumlah kegiatan yang telah dilakukan untuk peningkatan kompetensi sdm pengelola kawasan strategis pariwisata di tingkat provinsi.	0
74	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	0
75	3.26.000216	Data kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan	Laporan	Memberikan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	0

76	3.26.000219	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0
77	3.26.000220	Daya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0
78	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
79	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
80	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0
81	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0
82	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	50
83	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	50
84	3.26.000236	Data Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata yang difasilitasi pelatihan	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	0
85	3.26.000237	Data kegiatan pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	0
86	3.26.000238	Data ASN di daerah yang memahami tentang kepariwisataan setelah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	0
87	3.26.000239	Jumlah kegiatan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan yang telah dilaksanakan	Orang	Jumlah kegiatan diklat teknis kepariwisataan tingkat lanjutan yang telah dilaksanakan.	0
88	3.26.000243	Data Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	0
89	3.26.000244	Data Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang telah dilaksanakan	Orang	Data mengenai pelatihan perpanjangan lisensi asesor/recognition of current competencies (rcc) di bidang pariwisata yang telah dilaksanakan.	0
90	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	40
91	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	40

92	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0
93	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0
94	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	40
95	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	40
96	3.26.000257	Data Pelaku Usaha Ekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0
97	3.26.000258	Data ASN di daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	0
98	3.26.000270	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Lembaga	Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi kreatif daerah mencakup inisiasi, koordinasi, dan pendirian badan hukum lembaga/asosiasi/pelaku usaha	0
99	3.26.000271	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	6
100	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	Kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif dalam bentuk pemberian konsultasi kekayaan intelektual	0
101	3.26.000278	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	0
102	3.26.000279	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	0
103	3.26.000280	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	0
104	3.26.000281	Perencanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kab/Kota adalah Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan tingkat Kabupaten/Kota sebagai acuan pelaksanaan yang terdiri atas Penyusunan tahapan kerangka penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota serta formulasi rencana aksi tindak lanjut pengukuran Indeks	0
105	3.26.000282	Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota menggunakan kerangka penilaian berupa indikator yang disesuaikan dengan ketersediaan data setempat dengan menggunakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0
106	3.26.000284	Penetapan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota memperoleh ketetapan hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dari provinsi yang melakukan penilaian dan SK Gubernur tersebut dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri	0

107	3.26.000286	Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Dokumen	Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasia, keterpaduan baik perencanaan maupun pelasksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan	0
108	3.26.000287	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi	0
109	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	0
110	3.26.000289	Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk	Kegiatan Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki KI mendapatkan nilai tambah dari KI tersebut. Dengan demikian, jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memiliki sertifikat HKI akan mendapat manfaat dari komersialisasi KI. Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan untuk mendorong Inovasi dan Kreatifitas di kalangan pelaku industri ekonomi kreatif, Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan, Promosi Kreativitas Lokal, dan Penyediaan Akses Keuangan	0
111	3.26.000292	Produk yang Memperoleh Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Produk	Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya dan inovasi yang mereka ciptakan, seperti karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang dilindungi secara hukum.	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.27.000021	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Laporan	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	0
2	3.27.000026	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian oleh penyuluh pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	0
3	3.27.000052	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT (pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak) merupakan kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan HPT dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	0
4	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	Laporan	Laporan pengelolaan SDG hewan yang sesuai pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik (GBP/GFP) yang memuat informasi mengenai rumpun, populasi, dan struktur populasi. Penilaian pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala dinas yang rekomendasi penilaiannya akan dijadikan acuan dalam penerbitan sertifikasi.	-
5	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.	37
6	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	Sertifikat	Jumlah keterangan benih tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh institusi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu)	3
7	3.27.000224	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan	Sertifikat	Banyaknya Benih perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih	4677
8	3.27.000229	Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner	Unit	Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.Ã	2
9	3.27.000230	Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah varietas yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dapat digunakan sebagai bahan tanaman	-

10	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	0
11	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	0
12	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan di lapangan	0
13	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas.	0
14	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah	0
15	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	0
16	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	-
17	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan	-
18	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	-
19	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	2686
20	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	2686
21	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	2686
22	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	0
23	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	0
24	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	0
25	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Banyakanya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	0

26	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	0
27	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	0
28	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
29	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
30	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	0
31	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
32	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	0
33	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
34	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	2686
35	3.27.000264	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi	Ton	Banyaknya benih umbi/ rimpang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
36	3.27.000265	Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi	Anakan	Banyaknya benih anakan perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0

37	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
38	3.27.000267	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	Banyaknya benih perkebunan berbentuk biji yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
39	3.27.000268	Jumlah benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi	Mata	Banyaknya benih mata perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
40	3.27.000269	Jumlah benih perkebunan berbentuk setek yang diperbanyak/ diproduksi	Setek	Banyaknya benih perkebunan berbentuk setek yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
41	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	Jumlah Benih Ternak yang beredar	530
42	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	550
43	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi	2300
44	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu	570
45	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	Banyaknya benih ternak yang tersedia	2300
46	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	0
47	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	483
48	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	483
49	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	530
50	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	1005
51	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi	3505
52	3.27.000281	Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan	Ekor	Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu	2705
53	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang tersedia	2750
54	3.27.000283	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas	0
55	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas	0
56	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	0
57	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Tanaman Pakan Ternak yang berkualitas	0
58	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	0
59	3.27.000289	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi	Unit	Jumlah Dam parit yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0

60	3.27.000290	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	0
61	3.27.000291	Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam	Dokumen	Dokumen perencanaan penanganan hewan ternak yang diakibatkan oleh bencana alam	0
62	3.27.000292	Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Bahan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	0
63	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik	-
64	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Benih/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	0
65	3.27.000295	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	Jumlah eksisting dam parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan debit air minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m	0
66	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	3
67	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik	23
68	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	-
69	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	Jumlah Laboratoriium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik	6
70	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	6
71	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius	6
72	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota (UPTD/BIDANG/SEKSI)	21
73	3.27.000303	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelanggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi	-
74	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	-
75	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	0

76	3.27.000306	Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Kasus	kasus pelanggaran yang terjadi dan diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan	0
77	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	6
78	3.27.000308	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	-
79	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	-
80	3.27.000310	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik	-
81	3.27.000311	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik	-
82	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik	-
83	3.27.000313	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik	-
84	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik	1
85	3.27.000316	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan	0
86	3.27.000317	Jumlah Eksisting Sarana Pendukung	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang digunakan dalam kondisi baik. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian	23
87	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	0
88	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	0
89	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	0
90	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya	0
91	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit	0
92	3.27.000323	Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara	Unit	banyaknya embung yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan budidaya pertanian	0
93	3.27.000324	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0
94	3.27.000325	Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	Ketersediaan Laboratorium Benih atau Balai Benih yang melakukan peredaran Benih di Provinsi	0
95	3.27.000326	Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian	Unit	Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik	3
96	3.27.000327	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	1

97	3.27.000328	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	-
98	3.27.000329	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	-
99	3.27.000330	Jumlah galur yang dinilai	Galur	Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan	-
100	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	-
101	3.27.000332	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang dibangun atau dikembangkan	0
102	3.27.000333	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
103	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	1
104	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	1
105	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan	0
106	3.27.000338	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	0
107	3.27.000339	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan	Ton	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu	0
108	3.27.000340	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	Ketersediaan Jumlah Hijauan Pakan Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	0
109	3.27.000341	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang didatangkan dari daerah lain	-
110	3.27.000342	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia	0
111	3.27.000343	Jumlah HPT yang beredar	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang beredar	0
112	3.27.000344	Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Unit	Ketersediaan Infrastruktur Peternakan yang direhabilitasi	0
113	3.27.000345	Jumlah izin laboratorium yang diawasi	Laporan	Ketersediaan Laboratorium yang memiliki perijinan dserta dalam oprasionalnya berada dalam pengawasan otoritas veteriner berwenang setempat	-
114	3.27.000346	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memenuhi komitmen	Laporan	Ketersediaan izin yang beredar dakam rangka pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan aturan yang berwenang	0
115	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen	1
116	3.27.000348	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk penyediaan obat hewan yang memenuhi standar	1
117	3.27.000349	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi	0

118	3.27.000350	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi	0
119	3.27.000351	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	0
120	3.27.000352	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	banyaknya izin usaha obat hewan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0
121	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis	0
122	3.27.000354	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi	0
123	3.27.000355	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi	0
124	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha RPH yang diawasi	0
125	3.27.000357	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi	0
126	3.27.000358	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	Unit	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP	0
127	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	0
128	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	0
129	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
130	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	2
131	3.27.000363	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	Jumlah penangaan kasus Gangguan Usaha Perkebunan (misalnya:konflik usaha perkebunan, perizinan usaha)	0
132	3.27.000364	Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani	Kasus	Kasus pelanggaran yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan yang berhasil ditangani	0
133	3.27.000365	Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan	Kasus	Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan dan diberhentikan peredarannya oleh otoritas veteriner setempat	-
134	3.27.000367	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	Jumlah penyakit infeksius yang bersumber pada hewan sebagai dampak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif	0
135	3.27.000368	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	Jumlah kasus penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.	0
136	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	0
137	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain	0

138	3.27.000371	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan	0
139	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya	0
140	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer	0
141	3.27.000374	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan	0
142	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya	0
143	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis	0
144	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani	0
145	3.27.000378	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	0
146	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.	-
147	3.27.000380	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa	-
148	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan	-
149	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	-
150	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	-

151	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	25
152	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	33
153	3.27.000386	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain	0
154	3.27.000387	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain	0
155	3.27.000388	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik	0
156	3.27.000389	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak	0
157	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi	0
158	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0
159	3.27.000392	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer	0
160	3.27.000393	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer	0

161	3.27.000394	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik	0
162	3.27.000395	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak	0
163	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi	0
164	3.27.000397	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0
165	3.27.000398	Jumlah Ketersediaan Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersedia secara keseluruhan di masyarakat, baik pengadaan pribadi maupun bantuan pemerintah.	195
166	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi	140.55
167	3.27.000400	Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia dalam kondisi baik di daerah	33
168	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP	0
169	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)	0
170	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	0
171	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	0

172	3.27.000405	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1
173	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.	0
174	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	0
175	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	3
176	3.27.000409	Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun	Unit	Laboratorium Benih atau Balai Benih yang akan dibangun di Provinsi	0
177	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	0
178	3.27.000411	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun	Unit	Banyaknya laboratorium yang dibangun/dikembangkan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian	0
179	3.27.000413	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun	Unit	unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius yang akan terbangun pada suatu wilayah	0
180	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	Ketersediaan Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	0
181	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	0

182	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih/bibit ternak bersertifikat yang beredar	0
183	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner)	80
184	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0
185	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terdampak bencana alam	0
186	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0
187	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0
188	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0
189	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0
190	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	0
191	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	0
192	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	0
193	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	0
194	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim	4
195	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	0
196	3.27.000430	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang teridentifikasi dapat digunakan	-
197	3.27.000431	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang ditetapkan dapat dimanfaatkan/digunakan	-
198	3.27.000432	Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang dikelola pemanfaatannya dengan baik	-
199	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	28,8
200	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	28,8
201	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT	767
202	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	494

203	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	19,34
204	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	19,34
205	3.27.000439	Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Luasan area kebakaran hutan yang tertangani	0
206	3.27.000440	Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Luasan area yang berpotensi mengalami kebakaran lahandan dilakukan upaya pencegahannya	0
207	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis	0
208	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	0
209	3.27.000443	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	0
210	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	0
211	3.27.000445	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	0
212	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	0
213	3.27.000447	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tumbuhan dan organisme	0
214	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	1
215	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	1
216	3.27.000450	Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	0

217	3.27.000451	Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	Laporan	Banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawsan terhadpa lahan penggembalaan umum	0
218	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	0
219	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0
220	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0
221	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	0
222	3.27.000456	Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeeriksaan	0
223	3.27.000458	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan	0
224	3.27.000459	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	0
225	3.27.000460	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan	0
226	3.27.000461	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan	0
227	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0
228	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota	0
229	3.27.000464	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Dosis	Penyediaan Benih Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus benih ternak	0
230	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	0
231	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak	0
232	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit	0

233	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan	0
234	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0
235	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	0
236	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	0
237	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	0
238	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan	0
239	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	0
240	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota	0
241	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	0
242	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	0
243	3.27.000478	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik	0
244	3.27.000479	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak	0
245	3.27.000480	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan	0

246	3.27.000481	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik	0
247	3.27.000482	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak	0
248	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0
249	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	0
250	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0
251	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0
252	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	0
253	3.27.000488	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik	0
254	3.27.000489	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak	0
255	3.27.000490	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan	0
256	3.27.000491	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik	0
257	3.27.000492	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak	0
258	3.27.000493	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0
259	3.27.000494	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	0
260	3.27.000495	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	0
261	3.27.000496	Jumlah pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangungan dan alat pengolahan yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	0

262	3.27.000497	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota	-
263	3.27.000498	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi	0
264	3.27.000499	Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kasus	Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan oleh otoritas veteriner setempat	0
265	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi	0
266	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi	0
267	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	0
268	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah	0
269	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	0
270	3.27.000505	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	Setek	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	0
271	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	5
272	3.27.000507	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Bibit Ternak yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	0
273	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	0
274	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu	0
275	3.27.000510	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0

276	3.27.000511	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0
277	3.27.000513	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan	0
278	3.27.000514	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan	0
279	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	0
280	3.27.000516	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling	Unit	Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah	0
281	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	0
282	3.27.000518	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	0
283	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	0
284	3.27.000520	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan	0
285	3.27.000521	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
286	3.27.000522	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara	Unit		0
287	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hortikultura	0
288	3.27.000524	Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan	0
289	3.27.000525	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan	Unit	Ketersediaan prasarana pascapanen hasil peternakan yang sesuai dengan prosedur penanganan pascapanen	0
290	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	0
291	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura	0
292	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	banyaknya prasarana pendukung perkebunan	0
293	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan	0
294	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	0
295	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengolahan hortikultura	0
296	3.27.000532	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan	0
297	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil tanaman pangan	0

298	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	0
299	3.27.000535	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan	0
300	3.27.000536	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
301	3.27.000538	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan	0
302	3.27.000539	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
303	3.27.000541	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan	0
304	3.27.000542	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
305	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan	Produk	unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk emenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	0
306	3.27.000546	Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan	Ton	Banyaknya produksi bahan pakan/pakan ternak yang dihasilkan	0
307	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan	0
308	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan	0
309	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan	0
310	3.27.000550	Jumlah Puskeswan yang dibangun	Unit	Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan	0
311	3.27.000551	Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
312	3.27.000553	Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan rehabilitasi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	0
313	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	747
314	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	418
315	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura	0

316	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan perkebunan	0
317	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan	0
318	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan	0
319	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana hortikultura	0
320	3.27.000561	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana perkebunan	0
321	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan	0
322	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0
323	3.27.000567	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan	0
324	3.27.000568	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan	0
325	3.27.000569	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Rumpun	Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	-
326	3.27.000570	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	-
327	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.	-
328	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	-
329	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu	-
330	3.27.000574	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan	-
331	3.27.000575	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan	-
332	3.27.000576	Jumlah Sarana Pendukung dibangun	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang dibangun atau dikembangkan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian	0

333	3.27.000577	Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian	0
334	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	0
335	3.27.000580	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya	-
336	3.27.000581	Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	-
337	3.27.000582	Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	-
338	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	33
339	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.	195
340	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	1041.5
341	3.27.000586	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Unit	jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok/ petani, dalam kondisi baik	33
342	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.	-

343	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik	2
344	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	1165
345	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	1
346	3.27.000591	Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian	0
347	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	0
348	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu	0
349	3.27.000602	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	1
350	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	0
351	3.27.000604	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi	Unit	Wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner	0
352	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota	0
353	3.27.000606	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi	0
354	3.27.000607	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi	0
355	3.27.000608	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi	0
356	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	0

357	3.27.000610	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	0
358	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)	199.75
359	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	luas area kawasan perkebunan eksisting	0
360	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging.	0
361	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Luas area kawasan tanaman pangan	88
362	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota	0
363	3.27.000616	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi	0
364	3.27.000617	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan	0
365	3.27.000618	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan	0
366	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&	0

367	3.27.000620	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.	0
368	3.27.000624	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial	0
369	3.27.000625	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	-Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kp2B provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.	0
370	3.27.000626	Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian	0
371	3.27.000627	Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan	Unit Usaha	unit usaha produk hewan yang telah didampingi untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	0
372	3.27.000628	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	Ketersediaan unit usaha produk hewan yang telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan usaha produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersayaratkan	0
373	3.27.000637	Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik	Unit Usaha	Unit Usaha Pembibitan Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik	0
374	3.27.000649	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan/pengembangan dna pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan)	0
375	3.27.000651	Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	1041.5
376	3.27.000656	Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	33

377	3.27.000659	Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)	Ton	Jumlah benih hortikultura yang tersedia di tingkat provinsi baik berupa benih dasar, pokok, dan benih sebar	0
378	3.27.000660	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hasil peternakan yang dibutuhkan pokyan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pencuci, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dehidrator dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	0
379	3.27.000661	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik Sarana hasil pascapanen peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	0
380	3.27.000662	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	0
381	3.27.000663	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hasil peternakan yang dibutuhkan poktan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hasil peternakan sesuai komoditas seperti mesin pasteurisasi, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin spinner, mesin continous sealer, freezer, cultivator, mesin jahit karung dan sarana pendukung pengolahan hasil peternakan lain	0
382	3.27.000664	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan dalam kondisi baik	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hasil peternakan sesuai komoditas seperti mesin pasteurisasi, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin spinner, mesin continous sealer, freezer, cultivator, mesin jahit karung dan sarana pendukung pengolahan hasil peternakan lain	0
383	3.27.000668	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	0
384	3.27.000673	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan	Unit	Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil peternakan	0
385	3.27.000680	Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi	Unit Usaha	Pengawasan dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan	0
386	3.27.000681	Data Pekebun	Pekebun	Jumlah pekebun yang berusaha pada budidaya tanaman perkebunan dan memiliki STDB	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2024
1	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	0
2	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	Kasus	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dengan alat ukur Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar dengan satuan laporan	0
3	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	Ha	Luas Ekosistem yang dipulihkan melalui kegiatan penanaman bersama masyarakat, pemeliharaan tanaman, pengayaan, penanganan gulma, penanganan IAS (invasif Alien Species), pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam.	0
4	3.28.000004	Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Luas Kawasan Hutan yang telah ditargetkan untuk dilakukan Pengamanan Kawasan Hutan (Preventif dan Represif) terkait Perambahan Kawasan hutan dan pertambangan ilegal	0
5	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Luas Kawasan mangrove yang dilakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan dan kegiatan pendukungnya meliputi prakondisi, penyusunan rancangan teknis, pendampingan, pengawasan dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi	0
6	3.28.000006	Data Luas area Penerapan pengembangan Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Luas area yang digunakan dalam implementasi inovasi penerapan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	0
7	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih termasuk pemeliharaannya dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	0
8	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Melakukan kegiatan Patroli dan Operasi (Preventif dan Represif) Hasil Hutan Illegal (illegal logging, perburuan liar, dan lain-lainnya terkait dengan ekosistem)	0
9	3.28.000009	Data Luas hutan Kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan hutan kota di luar kawasan hutan negara termasuk kegiatan penanaman vegetatif, pemeliharaan serta kegiatan pendukungnya	0
10	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara termasuk kegiatan penanaman vegetatif, pemeliharaan serta kegiatan pendukungnya	0

11	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pedukung pembangunan sumber benih	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	0
12	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	Pelaksanaan prakondisi kawasan perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan) meliputi sosialisasi tingkat tapak, pencermatan PIAPS, fasilitasi usulan dan monitoring termasuk penyelesaian konflik tenurial dalam kerangka perhutanan sosial	0
13	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Kegiatan penanaman di luar kawasan hutan termasuk Proyek Strategis Nasional/PSN pada greenbelt atau sekitar danau untuk kegiatan penanaman di fasilitas sosial/umum selain di hutan rakyat dan hutan kota	0
14	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	0
15	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan layanan dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan satuan jumlah dokumen	0
16	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung yang memuat luas	0
17	3.28.000017	Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi yang memuat luas	0
18	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	0
19	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0
20	3.28.000021	Dokumen kegiatan pengawasan KHDTK	Dokumen	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	0

21	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	Pelaksamaan kegiatan rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.	0
22	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	Dokumen	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS termasuk pengelolaan danau	0
23	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	Pembuatan laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	0
24	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan DAS	Dokumen	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	0
25	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	Dokumen	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	0
26	3.28.000027	Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan seperti RPHJP	0
27	3.28.000028	Dokumen Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH, Unit KPH	Dokumen	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan seperti RPHJP	0
28	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit	Melakukan pemantauan pelaksanaan kewajiban pelaporan RKOPHH dan Laporan Kinerja Bulanan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenanganÂ Provinsi.	0
29	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	Dokumen	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah berikut pelaksanaan pengenaan sanksi administratif (jikaÂ diperlukan).	0

30	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap RKUPH dan RKTPH	0
31	3.28.000036	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap RKUPH dan RKTPH	0
32	3.28.000037	Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst	Kasus	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem dalam wilayah ekoregion yang dapat dijadikan masukan RTRW	0
33	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	Melakukan Perencanaan Pemulihan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	0
34	3.28.000039	Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	Melakukan fasilitasi terkait pengajuan dan rencana pengelolaan KHDTK, Pengelolaan KHDTK	0
35	3.28.000040	Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH	Dokumen	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan seperti RPHJP	0
36	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	0
37	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	Kasus	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kehutanan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terdahap rencana kehutanan	0
38	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	Kasus	Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung wilayah DAS	0
39	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan.	Permohonan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Tahura adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam tahura yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Wisata Alam, pemanfaatan air dan energi air, pemanfaatan Panas Bumi	0
40	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelakasana penanganan kerusakan lahan basah.	Kasus	Melakukan Pananganan Kerusakan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	0

41	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan hasil hutan (ilegal logging dan perburuan liar)	0
42	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	Kegiatan	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	0
43	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	Kasus	Melakukan intervensi manajemen pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam apendix cites meliputi inventarisasi, pemantauan, penyelamatan, pembinaan populasi, pembinaan habitat, serta penilitian dan pengembangan	0
44	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Kegiatan	Peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	0
45	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	Melakukan pengendalian konflik satwa liar dengan manusia, melalui penanaman tumbuhan pakan satwa, mitigasi konflik satwa dan manusia dengan membentuk pokja penanganan koflik, patroli terpadu	0
46	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	Kasus	Melakukan pengendalian kerusakan ekosistem karst melalui kajian kerusakan, kajian ekosistem referensi, mekanisme penanganan dan keterlibatan para pihak dilengkapi dengan peta kawasan.	0
47	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	Melaksanakan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan menuju KTH mandiri dan Kelompok Perhutanan Sosial melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	30
48	3.28.000056	Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Melaksanakan penyelenggaranan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	0
49	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	Kasus	Melakukan inventarisasi dan verifikasi area dengan keanekaragaman hayati tinggi meliputi kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa secara langsung di lapangan/ground check, analisis data sekunder, analisis data hasil ground check untuk dilakukan verifikasi	0
50	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	Fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH skala Kecil dan Menengah	0

51	3.28.000059	Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	Kasus	Pelaksanaan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan Menengah berikut pelaksanaan pengenaan sanksi administratif (jika ada)	0
52	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi kegiatan pencegahan , penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. (detil jenis-jenis kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan dapat merujuk pada PMK No.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi)	0
53	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	Melakukan Kegiatan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	0
54	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan dalam rangka penyelesaian Kasus Pidana (P-21) dan Perdata bidang Kehutanan	0
55	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	Kasus	Melaksanakan penyelenggaranan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	0
56	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	Kasus	Melakukan Pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (bernilai keanekaragaman hayati tinggi Kewenangan Daerah Provinsi	0
57	3.28.000066	Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit.	Kasus	Penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko berupa kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani melalui Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA)	0
58	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan (Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swasta, Polisi Kehutanan, Manggala Agni, MMP, MPA)	0
59	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl.	Laporan	Melakukan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk Lampiran Cites personil Polisi Kehutanan yang didukung dengan Sarana Prasarana yang memadai	0

60	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	Personil	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	0
61	3.28.000070	peta blok Pengelolaan dan Penataan wilayah kerja dari Tahura, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembentukan SDM Kehutanan (Polisi Kehutanan, Manggala Agni, dsb) yang didukung dengan Sarana Prasarana yang menunjang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengamanan Kawasan, pengendalian TAHURA bersama Masyarakat	0
62	3.28.000071	Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, Unit KPH	Dokumen	Menyusun Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pembentukan Unit KPH	0
63	3.28.000072	sarana prasarana operasionalisasi resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun, laporan operasional KPH, Unit KPH	Unit	Membangun dan mengelola resor yang mencakup perencanaan pembangunan resor, pembangunan sarana dan prasarana resor, dan operasionalisasi resor	0
64	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	Kasus	Sertifikat mutu benih adalah terlaksananya sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	0
65	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	Kasus	Sertifikat mutu bibit adalah terlaksananya sertifikasi mutu bibit dengan alat ukur jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Bibit dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	0
66	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	Kasus	Sertifikat sumber benih adalah pelaksanaan sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Sumber Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	0
67	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS	Lembaga	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	0
68	3.28.000077	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok, dan Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada Wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)	Unit	Menyusun Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP	0

69	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	0
70	3.28.000079	Unit managemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	Fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan Menengah untuk meperoleh pasokan bahan baku dan akses Pasar.	0
71	3.28.000080	Unit managemen PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Unit	Memfasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah kepada Pemerintah Pusat	0

Bidang Urusan: Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.29.000001	Data SOP Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	Jumlah dokumen berupa SOP Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN).	1
2	3.29.000002	Data Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Izin	Jumlah Izin operasi atau izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan.	20
3	3.29.000003	Data Jaringan yang Disewakan	Dokumen	Dokumen jumlah jaringan tenaga listrik yang disewakan kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh daerah provinsi.	0
4	3.29.000004	Data Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	0
5	3.29.000005	Data Penjualan Tenaga Listrik;	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan tenaga listrik.	0
6	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	Perusahaan	Jumlah perusahaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin.	1
7	3.29.000007	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri yang telah direkomendasikan.	9
8	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Unit	Jumlah cekungan air tanah dalam daerah provinsi.	0
9	3.29.000009	Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil)	Unit	Jumlah pembangkit listrik yang berbasis EBT dan fosil yang masih beroperasi.	102
10	3.29.000010	Data Harga Jual Tenaga Listrik;	Rupiah	Total biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.	0
11	3.29.000011	Data Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	3
12	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Km^2	Luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	1557
13	3.29.000013	Data Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Unit Usaha	Jumlah Perusahaan Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah dilakukan pembinaan.	0
14	3.29.000014	Data Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang telah ditetapkan.	0
15	3.29.000015	Data Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi.	1
16	3.29.000016	Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kasus	Jumlah kasus penetapan Nilai Perolehan Air Tanah atau nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah khususnya dalam daerah provinsi yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2

17	3.29.000018	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Kasus	Jumlah kasus Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi atau kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
18	3.29.000020	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kasus	Jumlah kasus Perizinan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
19	3.29.000021	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kasus	Jumlah kasus Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1
20	3.29.000022	Data Penyimpangan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Kasus	Jumlah kasus zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang implementasinya tidak dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
21	3.29.000023	Data Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri.	111
22	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Operasi atau izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang masih berlaku.	104
23	3.29.000025	Data Perusahaan yang Menetapkan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi yang Tidak Sesuai dengan NSPK	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menetapkan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi yang Tidak Sesuai dengan NSPK.	0
24	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen jumlah realisasi anggaran penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	1
25	3.29.000027	Data Realisasi Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	3

26	3.29.000029	Data Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Rekomendasi	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi atau kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan yang telah direkomendasikan.	0
27	3.29.000030	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah direkomendasikan.	0
28	3.29.000031	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang telah direkomendasikan.	1
29	3.29.000032	Data Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi.	0
30	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik.	1
31	3.29.000034	Data Rumah Tangga Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu.	1
32	3.29.000035	Data Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Dokumen	Dokumen Biaya sewa jaringan tenaga listrik.	0
33	3.29.000036	Data Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan	Titik	Jumlah Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan.	0
34	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	Dokuem rencana Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang akan dicapai.	0
35	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Wilayah yang Belum Teraliri Listrik.	1
36	3.29.000039	Data Zona Konservasi Air Tanah;	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya.	0
37	3.29.000040	Dokumen Prosedur dan Persyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi atau kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan.	0

38	3.29.000041	Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	0
39	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	Penghasil listrik yang bersumber dari Tenaga Sinar matahari (surya)	812
40	3.29.000141	Jumlah hasil verifikasi dan evaluasi izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah	Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah	0
41	3.29.000142	Jumlah izin pengusahaan air tanah atau persetujuan penggunaan air tanah	Dokumen Izin Pengusahaan Air tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pemegang izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah	14

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.30.000002	Angka Pengenal Importir yang telah dilaporkan untuk pembuatan Dokumen yang diterbitkan melalui OSS	API	Jumlah angka pengenal importir (api) yang telah dilaporkan untuk pembuatan dokumen melalui sistem oss.	0
2	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya	Bahan berbahaya yang telah dilakukan pengawasan, distribusi, pengemasan, dan pelabelan.	0
3	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang	Barang yang peredarannya diawasi sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kepatuhan.	65
4	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	16
5	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	16
6	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	16
7	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang	Barang yang telah melalui proses pengujian untuk menilai mutu, keamanan, atau kepatuhannya.	0
8	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Data dan informasi yang berkaitan dengan sistem dan jaringan informasi perdagangan.	3
9	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Distributor	Distributor yang telah memperoleh rekomendasi siup-mb melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss).	3
10	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen	Dokumen yang memuat laporan sarana dan prasarana pusat distribusi di tingkat provinsi.	0
11	3.30.000013	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi regional	Dokumen	Dokumen yang memuat laporan sarana dan prasarana pusat distribusi di tingkat regional.	0
12	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa	Jasa yang peredarannya atau pelaksanaannya diawasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan kepatuhan.	3
13	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi	Kalibrasi yang telah disertai dengan penerbitan sertifikat sebagai bukti pemenuhan standar.	0
14	3.30.000018	Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan	Kegiatan distribusi yang telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan.	0
15	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan	Kegiatan perdagangan yang diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perlindungan konsumen.	17
16	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan	Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat dan pelaku usaha.	10

17	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan	Laporan mengenai badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) yang aktif mencakup data operasional, jumlah kasus yang ditangani, penyelesaian sengketa, serta efektivitas layanan dalam melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.	2
18	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan	Laporan kasus yang ditangani berisi data mengenai jumlah, jenis, dan status penyelesaian kasus dalam suatu periode tertentu, termasuk analisis tren, pihak terkait, serta rekomendasi untuk peningkatan layanan atau kebijakan yang relevan.	20
19	3.30.000032	Laporan komoditi potensial yang dipantau	Laporan	Laporan komoditi potensial yang dipantau berisi data dan analisis mengenai komoditas yang memiliki prospek ekonomi tinggi, termasuk tren harga, produksi, distribusi, serta faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan permintaannya di pasar.	0
20	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan	Laporan lpksm yang aktif berisi data dan informasi mengenai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (lpksm) yang masih beroperasi, termasuk kegiatan yang dilakukan, jumlah kasus yang ditangani, serta efektivitas dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.	3
21	3.30.000034	Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Laporan	Laporan berisi data orang yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri.	0
22	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan	Laporan berisi data pelaku usaha ekspor yang telah mendapatkan pembinaan.	0
23	3.30.000036	Laporan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Laporan	Laporan berisi data pelaku usaha berorientasi ekspor yang mengikuti pameran dagang lokal.	0
24	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan	Laporan berisi data pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan.	0
25	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan	Laporan berisi data pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang.	0
26	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan	Laporan berisi data pengaduan konsumen yang telah ditangani.	20
27	3.30.000040	Laporan Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang telah berpartisipasi	Laporan	Laporan berisi data pengguna pasar lelang komoditas yang telah berpartisipasi.	0
28	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan	Laporan berisi data produk unggulan ekspor daerah yang disusun sebagai materi promosi.	0
29	3.30.000042	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Laporan	Laporan berisi data umkm yang melakukan pemasaran produk dalam negeri, terutama produk umkm, melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi.	0
30	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Laporan	Laporan berisi data umkm yang memasarkan produk dalam negeri, terutama produk umkm, melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri.	0

31	3.30.000050	Pedagang besar/distributor bahan berbahaya yang telah memenuhi Pemenuhan komitmen Pemeriksaan sarana distribusi berbahaya sebagai lampiran surat rekomendasi Perdagangan besar/distributor melalui OSS	Pedagang Besar/Distributor	Pedagang besar/distributor bahan berbahaya yang telah memenuhi komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya sebagai lampiran surat rekomendasi melalui oss.	0
32	3.30.000051	Pedagang besar/distributor bahan berbahaya yang telah mendapatkan surat rekomendasi Perdagangan melalui OSS	Pedagang Besar/Distributor	Pedagang besar/distributor yang telah diberikan surat rekomendasi pemenuhan komitmen perizinan sebagai pedagang besar/distributor terdaftar bahan berbahaya melalui oss.	0
33	3.30.000052	Pedagangan besar/distributor yang telah diberikan surat rekomendasi Pemenuhan komitmen Perizinan Pedagang besar/distributor terdaftar bahan berbahaya melalui OSS	Pedagang Besar/Distributor	Pedagang besar/distributor yang telah memperoleh surat rekomendasi pemenuhan komitmen perizinan sebagai pedagang besar/distributor terdaftar bahan berbahaya melalui oss.	0
34	3.30.000055	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida	Kegiatan	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengawasan pestisida.	0
35	3.30.000056	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Kegiatan	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengawasan pupuk bersubsidi.	0
36	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	Pelaksanaan operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan pokok yang berdampak pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.	9
37	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha	Pelaku usaha distribusi barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting pada distribusi lintas kabupaten/kota.	0
38	3.30.000072	Pelaku usaha yang telah terfasilitasi Perizinan berusaha secara elektronik	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitasi perizinan berusaha melalui sistem elektronik (oss).	0
39	3.30.000086	Pengawasan Pengadaan Pestisida di Tingkat Daerah Provinsi	Pestisida	Kegiatan pengawasan pengadaan pestisida di tingkat daerah provinsi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	0
40	3.30.000087	Pengawasan Pengadaan Pupuk di Tingkat Daerah Provinsi	Pupuk	Kegiatan pengawasan pengadaan pupuk di tingkat daerah provinsi untuk memastikan ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	0
41	3.30.000088	Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Kegiatan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dengan target realisasi minimal 90%.	0
42	3.30.000089	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Kegiatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dengan target realisasi minimal 90%.	0
43	3.30.000090	Pengecer terdaftar yang telah terfasilitasi Pemenuhan komitmen surat izin usaha Perdagangan bahan berbahaya melalui OSS	Pengecer terdaftar	Pengecer terdaftar yang telah difasilitasi dalam pemenuhan komitmen penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya melalui oss.	0
44	3.30.000093	Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	Produk	Kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat melalui keterlibatan stakeholder, tokoh masyarakat, atau influencer.	0
45	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk	Produk yang telah memperoleh sertifikasi resmi sesuai ketentuan standar dan regulasi yang berlaku.	0

46	3.30.000100	Pusat Distribusi Provinsi yang telah terlaksana	Unit	Pusat distribusi di tingkat provinsi yang telah terbentuk dan berfungsi sesuai ketentuan.	0
47	3.30.000101	Pusat Distribusi Regional yang telah terlaksana	Unit	Pusat distribusi regional yang telah terbentuk dan berfungsi sesuai ketentuan.	0
48	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA	Surat keterangan asal yang telah diajukan dan dilaporkan untuk diterbitkan sesuai ketentuan.	0
49	3.30.000106	Toko Bebas Bea yang telah mendapatkan SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	Toko bebas bea yang telah memperoleh siup-mb melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan	Dokumen berisi hasil pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (rpip) dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota (rpik).	1
2	3.31.000028	Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun	Dokumen	Kegiatan peninjauan kembali rencana pembangunan industri provinsi (rpip) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.	0
3	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen	Rekomendasi teknis atas draft rencana pembangunan industri kabupaten/kota (rpik) sebagai bahan penetapan kebijakan pembangunan industri daerah.	17
4	3.31.000039	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota	Data	Ketersediaan dan kelengkapan data pendukung terkait infrastruktur dasar, energi, air baku, air limbah, sarana sdm industri, kawasan industri, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.	1
5	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data	Ketersediaan dan kelengkapan data pendukung terkait infrastruktur transportasi, listrik dan energi, pengelolaan air baku, pengelolaan air limbah, sarana pengembangan sdm industri, kawasan industri, serta rencana tata ruang wilayah provinsi.	1
6	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data	Jumlah objek yang menjadi sasaran pengawasan jaminan produk halal di tingkat kabupaten/kota.	0
7	3.31.000042	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data	Jumlah objek yang menjadi sasaran pengawasan jaminan produk halal di tingkat provinsi.	0
8	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	Kumpulan data terkait pdrb industri, tenaga kerja industri, investasi industri, jumlah dan jenis perusahaan industri, kawasan industri, serta sentra ikm di tingkat kabupaten/kota.	0
9	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	Kumpulan data terkait pdrb industri, tenaga kerja industri, investasi industri, jumlah dan jenis perusahaan industri, kawasan industri, serta sentra ikm di tingkat provinsi.	0
10	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data	Kumpulan data perizinan berusaha yang dimiliki oleh perusahaan industri di tingkat provinsi.	1

11	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data	Kumpulan data persyaratan atau standar kegiatan usaha menurut bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di tingkat provinsi.	1
12	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang dikategorikan berdasarkan jumlah investasi.	0
13	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektor, beserta satuan perusahaan.	1
14	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, beserta satuan perusahaan.	0
15	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, beserta satuan perusahaan.	1
16	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang berada dalam tahap pembangunan.	0
17	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang telah menerima fasilitas dari pemerintah.	1
18	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang telah beroperasional.	1
19	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat provinsi yang dikategorikan berdasarkan jumlah investasi.	0
20	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat provinsi yang diklasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektor, beserta satuan perusahaan.	0
21	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	Data perusahaan industri di provinsi yang dikelompokkan berdasarkan skala usaha dengan satuan perusahaan.	0
22	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	Data perusahaan industri di provinsi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dengan satuan perusahaan.	1
23	3.31.000058	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data	Data perusahaan industri di provinsi yang masih dalam tahap pembangunan dengan satuan perusahaan.	0

24	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data	Data ini memuat jumlah perusahaan industri di suatu provinsi yang telah memperoleh fasilitas dari pemerintah, baik berupa insentif fiskal, pembebasan/pengurangan pajak, fasilitas kawasan industri, kemudahan perizinan, maupun bentuk dukungan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.	1
25	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data	Data ini memuat jumlah perusahaan industri di suatu provinsi yang telah menyelesaikan tahap pembangunan/persiapan dan saat ini sudah beroperasi secara resmi menghasilkan produk/jasa industri.	1
26	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data	Jumlah pengajuan dari pelaku usaha industri kepada instansi berwenang untuk dilakukan verifikasi teknis terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau standar kegiatan usaha di sektor perindustrian pada tingkat provinsi.	0
27	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data	Jumlah pengajuan dari pelaku usaha industri kepada dinas perindustrian kabupaten/kota atau instansi berwenang untuk dilakukan verifikasi teknis terhadap pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian.	0
28	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	Peraturan daerah yang mengatur tentang arah, kebijakan, strategi, dan program pembangunan industri di tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu , sesuai dengan amanat uu no. 3 tahun 2014 tentang perindustrian serta pp no. 14 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional (ripin).	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	3.32.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Kepala Keluarga	Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan.	-
2	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan.	1
3	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya.	-
4	3.32.000003	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan	-
5	3.32.000004	Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	-
6	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	-
7	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga)	-
8	3.32.000007	Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi	Dokumen	Dokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.	1
9	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.	-
10	3.32.000009	Data bangunan yang dimiliki	Unit	Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	-
11	3.32.000010	Data KK yg beradaptasi	Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi.	-
12	3.32.000011	Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina	Kepala Keluarga	Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.	-
13	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	Jumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.	-
14	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	-
15	3.32.000014	Data SP pemantapan dan SP penguatan	Satuan Permukiman (SP)	Provinsi: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.	-

16	3.32.000015	Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian	Dokumen	Penyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)	-
17	3.32.000016	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	Penyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)	-
18	3.32.000017	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi kabupaten yang berpotensi jadi calon Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain.	1
19	3.32.000018	Dokumen usulan pencadangan tanah	Dokumen	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasann transigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... Dokumen usulan pencadangan tanah dan lokasi yang diusulkan oleh kabupaten yang berpotensi menjadi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.	1
20	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.	-
21	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.	-
22	3.32.000021	Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria	Unit	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang belum dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	-
23	3.32.000022	Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria	Unit	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	-
24	3.32.000023	Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-
25	3.32.000024	Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi	Dokumen	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	1
26	3.32.000025	Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans	Kasus	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi	-
27	3.32.000026	Kasus yang tidak dapat diselesaikan	Kasus	Jumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi	-

28	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Naskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-
29	3.32.000028	Ketersedian sarpras di lokasi penempatan	Unit	Ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di lokasi kawasan transmigrasi tujuan atau di lokasi penempatan	-
30	3.32.000029	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	Kepala Keluarga	Dalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.	-
31	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	-
32	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Pemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	-
33	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)	-
34	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	-
35	3.32.000034	Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan.	Orang	Jumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihan	-
36	3.32.000035	Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri	-
37	3.32.000036	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataannya	0
38	3.32.000037	Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM	Kepala Keluarga	Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan	-
39	3.32.000038	Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri	-
40	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	-
41	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	-
42	3.32.000041	Lokasi yang diusulkan	Kawasan	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	1
43	3.32.000042	Lokasi kawasan yang memiliki potensi	Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-
44	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	-
45	3.32.000044	lokasi yang di usulkan	Lokasi	Penyediaan dokumen perwujudan kawasann transmigrasi aalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian.	1
46	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	-

47	3.32.000046	Luas tanah	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	-
48	3.32.000047	Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	-
49	3.32.000048	Luasan tanah utk pembangunan kawasan	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	-
50	3.32.000049	Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan	Kasus	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan adalah terlaksananya advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi dengan alat ukur jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan dengan satuan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	-
51	3.32.000050	Satuan Permukiman yang dikembangkan	SP	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapanan, dengan satuan Satuan Permukiman (SP)	-
52	3.32.000051	sertifikasi tanah	Sertifikat	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transigrasi denga alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	-
53	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi	-
54	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal	-
55	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal	-
56	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi	-
57	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.	-
58	3.32.000057	Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar	Paket	Jumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran	-
59	3.32.000058	transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi	-
60	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	-

Bidang Urusan: Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2024
1	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil evaluasi, analisis, serta keputusan terkait penataan kelembagaan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam menata struktur organisasi perangkat daerah (sopd) agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1
2	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pendampingan, arahan, dan fasilitasi dari pemerintah provinsi atau kementerian terkait dalam proses penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.	1
3	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil penyusunan, pengkajian, dan evaluasi terkait kebutuhan jabatan, beban kerja, serta penilaian kelas jabatan dalam suatu organisasi perangkat daerah atau instansi.	1
4	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen yang berisi laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup pencapaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.	1
5	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip), termasuk pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi.	1
6	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	Dokumen yang berisi hasil penilaian terhadap penerapan nilai-nilai budaya kerja di suatu instansi/organisasi, untuk mengetahui efektivitas, kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan.	1
7	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan.	1
8	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pendampingan atau dukungan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	1
9	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi terkait kebijakan pemerintahan.	1
10	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil koordinasi antar pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.	2
11	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi terkait proses penataan wilayah.	1
12	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi terkait administrasi kepala daerah dan dprd.	3

13	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil pengembangan otonomi daerah serta penataan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan.	1
14	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Laporan yang memuat hasil evaluasi serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	1
15	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	Kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerja sama antar pemerintah.	3
16	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	Kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerja sama dengan badan usaha atau pihak swasta.	1
17	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	Kegiatan penilaian atas pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan.	1
18	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	Fasilitas keagamaan dan kegiatan spiritual yang dikelola untuk mendukung kehidupan beribadah masyarakat.	1187
19	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga pembinaan kerohanian yang mendapat dukungan atau pendampingan dari pemerintah/instansi terkait.	4
20	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja dalam kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan.	1
21	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja dalam kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.	1
22	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja dalam kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang sosial.	1
23	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	Dokumen berisi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat dalam bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.	1
24	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen berisi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan kb, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, serta tenaga kerja.	1
25	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	Dokumen berisi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat pada bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan.	1
26	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum berupa peraturan yang telah disusun.	66
27	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum berupa penetapan yang telah disusun.	2250
28	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum yang terdokumentasi dan dikelola dalam sistem informasi hukum.	30

29	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dan evaluasi.	159
30	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	Kasus atau persoalan hukum yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai ketentuan.	8
31	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan ekonomi makro.	1
32	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan ekonomi mikro.	1
33	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan.	0
34	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.	0
35	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan air.	1
36	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd jasa keuangan dan aneka usaha.	1
37	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd air minum, limbah, dan sanitasi.	1
38	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan terkait pendirian bumd.	1
39	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan blud.	1
40	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	Dokumen berisi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan terkait pendirian blud.	1
41	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pengadaan barang dan jasa.	1
42	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.	1
43	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	1
44	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengelolaan dan pemantauan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.	1
45	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengembangan dan peningkatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa.	1
46	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengelolaan dan pendokumentasian informasi terkait pengadaan barang dan jasa.	1
47	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1

48	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengaturan, penataan, dan evaluasi kelembagaan pengadaan barang dan jasa.	1
49	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan pendampingan, konsultasi, atau bimbingan teknis terkait pengadaan barang dan jasa.	1
50	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai apbd.	1
51	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai apbn.	0
52	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah.	1
53	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.	0
54	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu daerah.	0
55	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi dalam perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.	1
56	4.01.000079	Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	Orang yang menerima beasiswa dan berstatus mahasiswa pada jenjang diploma atau strata.	1187
57	4.01.000082	Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	Orang yang menerima beasiswa prestasi pada jenjang diploma atau strata.	628
58	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Produk hukum daerah yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan peraturan di tingkat daerah.	2317
59	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari instansi terkait.	8
60	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Dokumentasi produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang telah disusun dan diterapkan.	30
61	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan blud.	1
62	4.01.000146	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian dan distribusi kegiatan perekonomian.	0
63	4.01.000147	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil perencanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi mikro dan kecil.	0
64	4.01.000148	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembentukan blud.	1
65	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi dalam penyusunan program pembangunan daerah.	1
66	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.	1
67	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	1
68	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa.	1

69	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil layanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.	1
70	4.01.000155	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan dan advokasi terkait pengadaan barang dan jasa.	1
71	4.01.000183	Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	&Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 UU 23/2014sebagai berikut: a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok & organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0
72	4.01.000184	Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	1. Evaluasi dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya terhadap pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah	0

Bidang Urusan: Sekretariat DPRD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan, keputusan, atau aktivitas dprd sebagai bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.	1
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah.	50
3	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen	Dokumen atau media yang memuat informasi terkait kegiatan, keputusan, dan fungsi dprd yang dipublikasikan kepada masyarakat.	1
4	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen	Dokumen rancangan peraturan daerah yang telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	2
5	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen	Sarana resmi dprd berupa situs web dan saluran publikasi lain yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.	1
6	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.	1
7	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.	5
8	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau peraturan daerah.	1
9	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik yang difasilitasi dalam rangka pembentukan peraturan daerah.	1
10	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi tata tertib dprd yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dprd.	1
11	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan bersama oleh dprd dan pemerintah daerah.	1
12	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas).	1
13	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas).	1
14	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	1
15	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	1
16	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan apbd setiap semester.	1
17	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	1
18	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan hukum.	2

19	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang infrastruktur.	1
20	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.	5
21	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang perekonomian.	12
22	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam.	1
23	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).	1
24	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengawasan terhadap penggunaan anggaran.	1
25	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang berisi rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah.	1
26	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyelenggaraan kegiatan orientasi dprd.	1
27	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan pendalaman tugas dprd.	1
28	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Jumlah orang yang tergabung dalam kelompok pakar dan tim ahli dprd.	31
29	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Jumlah tenaga ahli yang mendukung kerja fraksi di dprd.	7
30	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan dprd.	1
31	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen yang berisi rencana kerja dprd sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dprd.	1
32	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil publikasi dan dokumentasi kegiatan dprd.	1
33	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kunjungan kerja dprd.	4
34	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran dprd yang telah disusun sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.	1
35	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan reses anggota dprd.	1
36	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	Dokumen yang berisi kode etik dan tata beracara dprd sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dprd.	2
37	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dprd.	1
38	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	Dokumen yang berisi rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah.	1
39	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi bahan komunikasi dan publikasi yang telah disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.	1
40	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dprd.	1
41	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Laporan yang berisi kegiatan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja dprd yang telah disusun.	1

42	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah dprd.	25
43	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dprd.	1
44	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus dprd.	4
45	4.02.000047	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil dialog dan koordinasi dprp dengan pejabat pemerintah daerah serta tokoh masyarakat/tokoh agama.	1
46	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) dan rencana kerja yang telah disusun sebagai bagian dari perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.	1
47	4.02.000049	Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengawasan atas pelaksanaan otonomi khusus (otsus).	-
48	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan rancangan peraturan daerah.	5
49	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan.	1

Bidang Urusan: Perencanaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.01.000001	Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	0
2	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	32
3	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2
4	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	2
5	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	0
6	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	0
7	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	0
8	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	0
9	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	0
10	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1
11	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	0
12	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	3
13	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	0
14	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	5
15	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah	-
16	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0
17	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0

18	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1
19	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	-
20	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	-
21	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0
22	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	3
23	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	-
24	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	1
25	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	0
26	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	0
27	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	1
28	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	0
29	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	5
30	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1
31	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0
32	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1
33	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-
34	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0
35	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0

36	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	4
37	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0
38	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2
39	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
40	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	-
41	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	-
42	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	-
43	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	-
44	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0
45	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0
46	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	-
47	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	-
48	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	-
49	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	-
50	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	0

51	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	0
52	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	32
53	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	200
54	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-

Bidang Urusan: Keuangan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan apbd.	2
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan perubahan apbd.	2
3	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan kua, ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	43
4	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan, kondisi, dan kebijakan anggaran berjalan, kemudian diperiksa serta disesuaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar selaras dengan perubahan kua dan perubahan ppas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	43
5	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen perubahan daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan perubahan rka-skpd, kemudian diperiksa dan disesuaikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)/tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan kua, perubahan ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	43
6	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Produk hukum daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	2
7	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan apabila terdapat kondisi yang mengharuskan penyesuaian terhadap apbd berjalan.	2
8	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Kumpulan produk hukum, peraturan, keputusan, dan pedoman yang menjadi dasar hukum, arah, dan tata cara dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam siklus penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran.	1
9	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antar pemangku kepentingan (pemerintah daerah, dprd, serta instansi terkait) mengenai rencana penerimaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.	1

10	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, serta perangkat daerah terkait mengenai rencana alokasi belanja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.	1
11	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, dan perangkat daerah terkait mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.	1
12	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Individu dari perangkat daerah provinsi yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran daerah.	40
13	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan daerah, dan kebijakan fiskal nasional.	1
14	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, dan rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perubahan apbd beserta peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd kabupaten/kota, untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal daerah, serta kepentingan pembangunan.	1
15	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda dan peraturan kepala daerah tersebut, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pelaksanaan apbd kabupaten/kota.	1
16	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	Dokumen resmi milik perangkat daerah atau lembaga terkait yang telah melalui proses pendampingan, bimbingan, atau asistensi oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan.	1
17	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	Dokumen resmi yang memuat catatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan atau kebijakan di bidang keuangan, termasuk materi yang disampaikan, peserta yang hadir, serta rekomendasi tindak lanjut.	1
18	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga	Badan layanan umum daerah yang mendapatkan pendampingan atau asistensi dari instansi berwenang guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pelayanan, dan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	21

19	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses konsultasi, koordinasi, serta pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan dan evaluasi rancangan perda apbd dan rancangan perkada penjabaran apbd agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.	0
20	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan serta evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan perkada penjabaran perubahan apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.	0
21	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang berisi hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan serta evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan rancangan perkada penjabaran pertanggungjawaban apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.	0
22	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Individu dari perangkat daerah kabupaten/kota yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada bidang keuangan daerah.	43
23	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasi antara provinsi dan kabupaten/kota, termasuk penyajian data statistik keuangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
24	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, pengaturan, dan pengendalian arus kas pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.	1
25	5.02.000027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Dokumen resmi yang memuat informasi mengenai penggunaan, penatausahaan, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari pembiayaan apbd tahun berjalan.	0
26	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen final yang merupakan output dari proses pengendalian anggaran kas dan penerbitan surat penyediaan dana (spd) yang sah dan siap didistribusikan.	43
27	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	Dokumen resmi yang mencatat dan mengadministrasikan seluruh transaksi pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran) sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1

28	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Dokumen (seperti notulensi, laporan, atau rekomendasi) yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	1
29	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Dokumen (seperti mou, perjanjian kerja sama, atau laporan pemantauan) yang menjadi bukti terlaksananya koordinasi dan kerja sama dalam rangka transaksi non-tunai.	1
30	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	Laporan keuangan periodik yang menyajikan realisasi kas, aliran kas, dan pfk, yang telah disusun dan dikoordinasikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	1
31	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi terkait manajemen piutang, utang, analisis pembiayaan, serta strategi penempatan dana untuk optimalisasi kas daerah.	1
32	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Dokumen (seperti berita acara rekonsiliasi) yang membuktikan adanya proses pencocokan data transaksi kas dan sp2d antara pemerintah daerah dengan instansi terkait (misalnya bank).	1
33	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Dokumen petunjuk teknis (juknis) yang disusun dan diterbitkan sebagai panduan resmi dalam melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban di tingkat sub kegiatan.	0
34	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (seperti workshop, bimtek, atau sosialisasi) mengenai penatausahaan keuangan.	120
35	5.02.000037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Laporan yang merangkum hasil dari kegiatan koordinasi untuk memastikan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan.	1
36	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Dokumen (seperti berita acara) yang menjadi bukti telah dilaksanakannya proses pencocokan dan pemeriksaan kebenaran data atas seluruh unsur laporan keuangan.	1

37	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	Laporan pertanggungjawaban (lpj) pelaksanaan apbd yang disusun dan disajikan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran) sesuai jadwal yang ditentukan.	0
38	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Set laporan keuangan yang lengkap dari setiap skpd, blud, serta laporan keuangan gabungan (konsolidasi) pemerintah daerah yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (sap).	1
39	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya.	2
40	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Dokumen resmi yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti tindak lanjut dari pemerintah daerah atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk.	1
41	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi untuk menyelesaikan kasus tuntutan ganti rugi (tptgr) keuangan daerah.	0
42	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Dokumen kajian atau analisis mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban apbd untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan efisiensi anggaran.	0
43	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen formal (seperti peraturan kepala daerah, surat edaran) yang menetapkan kebijakan dan panduan teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah.	1
44	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen yang merinci alur kerja, tahapan, dan mekanisme (sop) dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	1
45	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (workshop, bimtek) di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.	129
46	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat provinsi yang menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi secara aktif dalam satu periode.	21
47	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana cadangan, seperti dokumen pembentukan, penempatan, dan pencairan dana cadangan.	0
48	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan yang menyajikan hasil kajian dan analisis kelayakan terhadap rencana investasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.	0
49	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan analisis yang mengevaluasi proses perencanaan hingga realisasi penerimaan pinjaman oleh pemerintah daerah.	0
50	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan analisis yang mengevaluasi ketepatan perencanaan dan realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman daerah.	0

51	5.02.000053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	Laporan analisis yang mengkaji efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.	0
52	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	Laporan analisis yang mengevaluasi realisasi dan tingkat pengembalian pinjaman yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah daerah.	0
53	5.02.000055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan proses perumusan kebijakan hingga penetapan alokasi dana subsidi kepada masyarakat atau badan usaha.	0
54	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Laporan analisis yang mengevaluasi efektivitas perencanaan dan ketepatan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada entitas lain.	1
55	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan pengelolaan dana yang dialokasikan untuk keperluan darurat dan mendesak.	1
56	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, penetapan alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari provinsi ke kabupaten/kota.	1
57	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data keuangan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan.	0
58	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen (seperti laporan implementasi, berita acara, log pemeliharaan) yang membuktikan pelaksanaan kegiatan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan.	0
59	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.	129
60	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Dokumen standar satuan harga (ssh) atau standar biaya yang telah selesai disusun, ditetapkan, dan siap digunakan sebagai acuan penganggaran.	1
61	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen yang menetapkan spesifikasi teknis barang (standar barang) dan maksimal kebutuhan barang (standar kebutuhan) untuk setiap unit kerja.	0
62	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (rkbmd) yang telah disusun oleh pengguna barang dan disetujui oleh pengelola barang.	1
63	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen formal (seperti perkada atau sk) yang berisi aturan, prinsip, dan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah (bmd).	1
64	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan periodik yang menyajikan informasi mengenai pencatatan, inventarisasi, dan kondisi seluruh barang milik daerah (bmd).	1
65	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan yang merangkum hasil kegiatan sensus atau inventarisasi fisik barang milik daerah (bmd) pada periode tertentu.	1
66	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengamankan bmd baik secara fisik, administrasi, maupun hukum.	1

67	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan yang berisi nilai wajar barang milik daerah (bmd) hasil dari proses penilaian yang dilakukan oleh penilai internal maupun eksternal.	1
68	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan yang menyajikan temuan dan rekomendasi dari kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap siklus pengelolaan bmd.	0
69	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen legal (seperti sk persetujuan) yang diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi bmd, mulai dari pemanfaatan hingga penghapusan.	1
70	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan (termasuk berita acara) yang membuktikan adanya proses pencocokan data bmd antara bagian aset dengan bagian akuntansi.	1
71	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Laporan akhir mengenai posisi dan kondisi barang milik daerah (bmd) yang menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd).	1
72	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan bmd.	0
73	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen perencanaan strategis (seperti rencana kerja, target penerimaan) yang disusun untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah.	1
74	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang berisi analisis, evaluasi, dan rekomendasi terkait pengembangan potensi serta perumusan kebijakan baru di bidang pajak daerah.	2
75	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai kebijakan dan peraturan pajak daerah.	1
76	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit sarana (misalnya kendaraan, komputer) dan prasarana (misalnya gedung layanan) yang tersedia dan berfungsi untuk mendukung operasional pengelolaan pajak daerah.	37
77	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran baru atau pemutakhiran data objek, subjek, dan wajib pajak daerah.	8
78	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan pengelolaan basis data perpajakan, termasuk validasi, pemeliharaan, dan penyajian data.	1
79	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Surat ketetapan pajak daerah (seperti skpd, skpdkb) yang diterbitkan secara resmi kepada wajib pajak.	0
80	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	Laporan yang menyajikan status penyelesaian atau tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pajak daerah.	2
81	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen (seperti surat pemberitahuan pajak daerah/sptpd) yang telah selesai melalui proses penelitian dan verifikasi kebenaran datanya.	2
82	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	Dokumen penagihan (seperti surat teguran, surat paksa) yang telah diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak (wp) yang menunggak pembayaran pajak.	0

83	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	Surat permohonan keberatan dari wajib pajak yang telah diproses dan diberikan keputusan (diterima, ditolak, atau diterima sebagian).	5
84	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pengawasan internal dan eksternal terhadap seluruh proses pengelolaan pajak daerah untuk memastikan kepatuhan.	8
85	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap skpd pemungut retribusi daerah.	1
86	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan periodik yang menyajikan data dan analisis mengenai kemajuan implementasi sistem transaksi keuangan secara elektronik (non-tunai) di lingkungan pemerintah daerah.	1
87	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dari setiap skpd yang telah selesai diperiksa, divalidasi, dan disahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd).	43
88	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan teknis mengenai penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah.	0
89	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) tingkat kabupaten/kota mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap diproses lebih lanjut.	0
90	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.	0
91	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat kabupaten/kota yang secara aktif menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi dalam satu periode.	0
92	5.02.000125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan yang menyajikan data statistik keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang telah diolah dan dikompilasi untuk berbagai keperluan analisis.	0
93	5.02.000126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana cadangan di tingkat kabupaten/kota.	0
94	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.	1
95	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan sistem informasi keuangan daerah.	0
96	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen kajian atau analisis yang berisi evaluasi potensi, usulan pengembangan, dan rekomendasi kebijakan baru di bidang pajak daerah.	2

97	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pemutakhiran data atau penambahan baru data objek, subjek, dan wajib pajak di tingkat kabupaten/kota.	8
98	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	Objek pajak (khususnya pbb-p2) yang nilai jual objek pajak (njop) nya telah diperbarui atau disesuaikan dalam satu periode penilaian.	0
99	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Interaksi layanan (baik tatap muka, telepon, maupun online) yang diberikan kepada wajib pajak terkait informasi atau konsultasi perpajakan daerah.	10
100	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen pelaporan dari wajib pajak (misalnya sptpd) yang telah selesai diverifikasi kebenarannya oleh petugas pajak.	12
101	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen yang diterbitkan dalam rangka penagihan aktif piutang pajak daerah, seperti surat teguran atau surat paksa.	1
102	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen (surat keputusan) yang diterbitkan sebagai hasil dari proses penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.	1
103	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen (seperti laporan hasil pemeriksaan) yang dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.	1

Bidang Urusan: Kepegawaian

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.	-
2	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen (seperti notulensi rapat, surat usulan formasi) yang menjadi bukti terlaksananya kegiatan koordinasi dalam proses pengadaan calon pns dan pppk.	3
3	5.03.000004	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Laporan yang berisi analisis dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proses pengadaan aparatur sipil negara (asn) pada periode sebelumnya.	-
4	5.03.000005	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	Dokumen (seperti naskah akademik, draf peraturan) yang disusun sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pemberhentian asn.	-
5	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya koordinasi dalam proses administrasi pemberhentian asn, misalnya usulan pemberhentian atau sk pensiun.	3
6	5.03.000007	Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	Laporan yang berisi analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberhentian asn.	-
7	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Organisasi atau lembaga profesi bagi asn (seperti korpri, asosiasi fungsional) yang mendapatkan dukungan atau fasilitasi dari pemerintah daerah.	1
8	5.03.000009	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	Dokumen (naskah akademik, draf) yang disusun dalam rangka merumuskan kebijakan baru terkait manajemen data dan sistem informasi kepegawaian.	-
9	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen atau laporan yang menunjukkan terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian (misalnya laporan pemeliharaan, log aktivitas).	3
10	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya kegiatan pengelolaan data kepegawaian, seperti berita acara pemutakhiran data atau laporan statistik kepegawaian.	0
11	5.03.000012	Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Laporan yang menyajikan analisis dan evaluasi terhadap kualitas data, kegunaan informasi, dan kinerja sistem informasi kepegawaian.	-
12	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Surat keputusan (sk) mutasi/perpindahan pegawai yang telah diterbitkan dan dilaksanakan, baik internal maupun antar daerah.	12
13	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan proses pengusulan, verifikasi, hingga penetapan kenaikan pangkat bagi asn yang memenuhi syarat.	3
14	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen (seperti hasil seleksi, sk promosi) yang terkait dengan proses pengelolaan promosi jabatan bagi asn.	12
15	5.03.000016	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang telah menyelesaikan program pengembangan kompetensi (misalnya diklat, sertifikasi) dan menunjukkan peningkatan kinerja atau kapasitas.	59
16	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan assessment center, seperti laporan hasil penilaian potensi dan kompetensi individu asn.	3
17	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Dokumen administrasi (seperti surat tugas, sertifikat) yang dikelola sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi asn.	-
18	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan asn yang mengikuti pendidikan lanjutan (tugas belajar/izin belajar), seperti sk atau laporan kemajuan studi.	3

19	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	Dokumen (seperti mou, perjanjian kerja sama) yang menjadi bukti adanya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan diklat.	-
20	5.03.000021	ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang telah berhasil mengikuti dan lulus ujian sertifikasi untuk jabatan tertentu.	-
21	5.03.000022	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	Laporan yang berisi analisis dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan program diklat dan sertifikasi jabatan.	-
22	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Asn pemangku jabatan fungsional yang telah mengikuti dan menyelesaikan program diklat atau sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya.	-
23	5.03.000025	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	Asn fungsional yang mendapatkan dukungan atau fasilitasi (misalnya biaya, informasi) dari instansi untuk mengikuti program sertifikasi.	-
24	5.03.000026	Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	Laporan evaluasi yang secara spesifik menganalisis penyelenggaraan diklat dan sertifikasi bagi para pejabat fungsional.	-
25	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi atau diseminasi informasi mengenai regulasi, peluang, dan pengembangan karir jabatan fungsional.	0
26	5.03.000028	Fungsional ASN yang Dibina	Orang	Asn pemangku jabatan fungsional yang secara aktif menerima program pembinaan karir, pendampingan, atau coaching dari instansi.	159
27	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya fasilitasi pengembangan karir bagi pejabat fungsional, seperti rekomendasi promosi atau usulan kenaikan jenjang jabatan.	0
28	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan evaluasi yang mengkaji efektivitas kebijakan dan program pengembangan jabatan fungsional secara keseluruhan.	-
29	5.03.000031	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen (seperti draf peraturan) yang disusun dalam rangka merumuskan atau memperbarui kebijakan terkait sistem penilaian kinerja aparatur.	-
30	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen sasaran kinerja pegawai (skp) atau dokumen penilaian kinerja lainnya yang telah selesai dinilai dan divalidasi.	3
31	5.03.000033	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	Laporan yang menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur secara agregat untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan area perbaikan.	-
32	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang secara resmi menerima penghargaan (misalnya satyalancana karya satya, pegawai teladan) atas prestasi atau dedikasinya.	238
33	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang menerima tanda jasa resmi dari negara sebagai bentuk pengakuan atas pengabdiannya.	-
34	5.03.000036	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Dokumen atau laporan yang mengevaluasi proses dan efektivitas program pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi asn.	-
35	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang diproses karena dugaan pelanggaran disiplin dan telah menerima pembinaan atau hukuman disiplin.	500
36	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan yang merangkum data dan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin asn dalam satu periode.	3
37	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Berkas permohonan izin perceraian dari asn yang telah diproses dan diterbitkan surat keputusan/rekomendasi.	-
38	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Laporan yang berisi analisis dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan asn secara umum serta efektivitas penegakan aturan disiplin.	0
39	5.03.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	Dokumen kajian atau laporan yang mengevaluasi pelaksanaan proses pemberhentian asn (baik karena pensiun, meninggal dunia, maupun sebab lain).	-
40	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang sedang aktif mengikuti program pendidikan lanjutan (tugas belajar atau izin belajar).	-
41	5.03.000061	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang menerima fasilitasi (misalnya pembiayaan, dispensasi) untuk mengikuti program sertifikasi jabatan.	-

42	5.03.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen (seperti mou, pks) yang menjadi bukti adanya kerja sama dengan lembaga lain khusus untuk penyelenggaraan diklat jabatan fungsional.	-
43	5.03.000065	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	Asn fungsional yang secara spesifik mendapatkan dukungan atau fasilitas dari instansi untuk mengikuti program sertifikasi keahliannya.	-
44	5.03.000066	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	Laporan yang secara khusus mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program diklat serta sertifikasi bagi pejabat fungsional.	-
45	5.03.000067	Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	Dokumen (seperti materi sosialisasi, laporan kegiatan) dari acara penyebaran informasi mengenai jabatan fungsional.	-
46	5.03.000068	ASN Fungsional yang Dibina	Orang	Asn pemangku jabatan fungsional yang menjadi target program pembinaan secara berkelanjutan dalam satu periode.	-
47	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Pejabat fungsional yang mendapatkan layanan spesifik untuk pengembangan karir, seperti coaching, mentoring, atau konseling karir.	-
48	5.03.000070	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	Dokumen kebijakan dan rencana strategis pengembangan kompetensi yang telah final dan ditetapkan untuk menjadi acuan.	0
2	5.04.000002	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	Set dokumen standar pembelajaran (seperti kurikulum, modul, silabus) yang telah selesai disusun dan disahkan.	0
3	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang berpartisipasi penuh dalam salah satu program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan.	9634
4	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	Dokumen (seperti laporan monitoring, notulensi koordinasi) yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pengelolaan program pengembangan kompetensi.	0
5	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	Dokumen kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan terkait sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi.	0
6	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan lembaga sertifikasi, seperti dokumen akreditasi, sop, atau skema sertifikasi.	0
7	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) dari lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil lulus dan memperoleh sertifikat kompetensi.	81
8	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	Laporan yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan institusi, sdm (widyaiswara/fasilitator), dan sumber daya pembelajaran.	2
9	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Dokumen formal (mou, pks) yang menandai terjalinnya kerja sama dengan lembaga lain dalam bidang pengembangan kompetensi.	0
10	5.04.000010	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	Set dokumen standar pembelajaran (kurikulum, modul) yang secara khusus dirancang untuk pimpinan dan pejabat tinggi/fungsional.	0
11	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	Peserta (asn dan pimpinan daerah) yang berpartisipasi penuh dalam program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk level kepemimpinan dan prajabatan.	7112

12	5.04.000012	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan manajerial program pengembangan kompetensi untuk level pimpinan (Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).	0
13	5.04.000013	ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang telah mengikuti dan lulus program sertifikasi untuk menjadi fasilitator atau pengajar (training of trainers).	0
14	5.04.000014	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang telah berhasil lulus program pengembangan kompetensi dan mendapatkan sertifikat kelulusan.	0
15	5.04.000015	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Asn dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil memperoleh sertifikat kompetensi di bidang pemerintahan dalam negeri.	0
16	5.04.000016	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi	Skor atau peringkat akreditasi yang diperoleh oleh lembaga penyelenggara diklat dari lembaga akreditasi yang berwenang.	Terakreditasi
17	5.04.000017	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan hasil koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan kompetensi di tingkat provinsi.	0
18	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	Dokumen yang menjadi output dari rangkaian kegiatan pengelolaan program pengembangan kompetensi teknis bagi jabatan administrasi.	0
19	5.04.000022	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	Dokumen kebijakan dan perencanaan komprehensif yang telah final dan mencakup seluruh aspek pengembangan kompetensi.	0
20	5.04.000023	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga	Lembaga sertifikasi di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi standar pengelolaan yang baik (misalnya terakreditasi, memiliki sop yang jelas).	0
21	5.04.000024	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil lulus dan memperoleh sertifikat kompetensi.	0

22	5.04.000027	Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	Set dokumen standar pembelajaran (modul, kurikulum) yang khusus dirancang untuk level pimpinan dan jabatan strategis, yang telah selesai disusun.	0
23	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Laporan pelaksanaan kegiatan diklat atau program pengembangan kompetensi yang telah diselenggarakan untuk kelompok sasaran pimpinan dan jabatan strategis.	1
24	5.04.000029	Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan manajerial untuk mendukung program pengembangan kompetensi.	0
25	5.04.000032	ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Aparatur sipil negara (asn) di lingkup kabupaten/kota yang telah berhasil memperoleh sertifikat kompetensi di bidang pemerintahan dalam negeri.	0
26	5.04.000034	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan kompetensi di tingkat kabupaten/kota.	0

Bidang Urusan: Penelitian dan Pengembangan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.05.000001	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang spesifik mengkaji isu otonomi daerah.	0
2	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pemerintahan umum.	0
3	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu kelembagaan dan tata laksana pemerintahan.	0
4	5.05.000004	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu aparatur dan reformasi birokrasi.	0
5	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu keuangan, aset, dan reformasi birokrasi.	1
6	5.05.000006	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu trantibumlinmas.	0
7	5.05.000007	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu kelembagaan desa.	0
8	5.05.000008	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu tata laksana pemerintahan desa.	0
9	5.05.000009	laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu aparatur pemerintahan desa.	0
10	5.05.000010	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pengelolaan keuangan dan aset desa.	0
11	5.05.000011	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan bumdes.	0
12	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	Dokumen atau basis data hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang dikelola dan tersedia untuk diakses.	0
13	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	Naskah rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil kajian atau evaluasi peraturan, yang disampaikan kepada pimpinan.	0
14	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan pengelolaan data dan pengkajian peraturan yang telah dilaksanakan.	0
15	5.05.000015	Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi	Surat rekomendasi yang dikeluarkan sebagai syarat bagi wna untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di wilayah daerah.	0
16	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Dokumen (laporan, makalah kebijakan) hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada isu-isu sosial.	0
17	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	0
18	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pendidikan dan kebudayaan.	0

19	5.05.000019	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kepemudaan dan olahraga.	0
20	5.05.000020	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan pariwisata.	0
21	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kesehatan masyarakat.	0
22	5.05.000022	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kependudukan dan keluarga berencana.	0
23	5.05.000023	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu administrasi kependudukan.	0
24	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu ketenagakerjaan.	0
25	5.05.000025	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji tingkat dan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	0
26	5.05.000026	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu transmigrasi.	0
27	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan kukm.	0
28	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu perindustrian dan perdagangan.	0
29	5.05.000029	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji kinerja dan pengembangan bumd.	0
30	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan.	0
31	5.05.000031	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor kelautan dan perikanan.	0
32	5.05.000032	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor energi dan sumber daya mineral (esdm).	0
33	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu lingkungan hidup.	0
34	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor kehutanan.	0
35	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor pekerjaan umum (infrastruktur).	0
36	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor perhubungan dan transportasi.	0
37	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor perumahan dan permukiman.	0
38	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu penataan ruang dan pertanahan.	0
39	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor komunikasi dan informatika.	0
40	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang menghasilkan inovasi atau teknologi baru/terapan.	0
41	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan proses uji coba hingga penerapan sebuah model inovasi atau teknologi di masyarakat atau pemerintahan.	0
42	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Laporan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1
43	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Laporan kegiatan sosialisasi untuk menyebarluaskan temuan dan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan.	0
44	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan fasilitasi (pendampingan, pendaftaran) bagi inovator untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI).	0
45	5.05.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang spesifik mengkaji isu otonomi daerah.	0
46	5.05.000050	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu kelembagaan dan tata laksana pemerintahan.	0

47	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu aparatur dan reformasi birokrasi.	1
48	5.05.000052	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu keuangan, aset, dan reformasi birokrasi.	0
49	5.05.000057	Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pengelolaan keuangan dan aset desa.	0
50	5.05.000059	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	Laporan atau bukti pengelolaan database kelitbangan dan peraturan yang terstruktur, mutakhir, dan mudah diakses.	0
51	5.05.000062	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan proses fasilitasi dan penerbitan rekomendasi penelitian bagi wna.	0
52	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan	0
53	5.05.000064	Publikasi Ilmiah	naskah	Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin	0
54	5.05.000065	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi	Lembaga	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.	0
55	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.	0
56	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian.	0
57	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.	0
58	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.	0
59	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi.	0
60	5.05.000071	Kebun Raya Daerah	Unit	Kebun Raya Daerah adalah kebun raya botani yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka pertunjukan atau sarana rekreasi bagi masyarakat umum.	-
61	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.	27.19573
62	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	0
63	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.	1
64	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.	0
65	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.	0
66	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	0

67	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	0
68	5.05.000079	Kodefikasi Teknologi Masyarakat	Unit	Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum.	0
69	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.	0
70	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah.	0
71	5.05.000082	Lokakarya	Dokumen	Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.	0
72	5.05.000083	Riset dan Seminar Internasional	Berita Acara	Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup mancanegara.	0
73	5.05.000084	Pakta Kerja Sama Internasional	naskah	Pakta Kerja Sama Internasional adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam lingkup mancanegara yang mana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.	0
74	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.	1
75	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.	1
76	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.	0
77	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.	0
78	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.	0
79	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.	0

Bidang Urusan: Pengelola Perbatasan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.06.000001	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen (risalah rapat, naskah kebijakan bersama) yang merupakan hasil dari proses penyelarasan kebijakan otonomi daerah antar tingkatan pemerintahan.	1
2	5.06.000002	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	Dokumen rencana aksi yang telah final dan berisi program/kegiatan prioritas untuk pembangunan kawasan perbatasan.	1
3	5.06.000003	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya penyelarasan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan antar lembaga/daerah.	1
4	5.06.000004	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya penyelarasan kebijakan dan program terkait pemanfaatan potensi di kawasan perbatasan.	1
5	5.06.000005	Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi yang mendukung penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara.	1
6	5.06.000006	Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	Dokumen yang berisi data hasil inventarisasi potensi sumber daya di kawasan perbatasan sebagai dasar pengusulan zona pengembangan.	1
7	5.06.000007	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	Dokumen (laporan monitoring, evaluasi) yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan.	1
8	5.06.000008	Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	Laporan komprehensif yang menyajikan kemajuan dan realisasi program pembangunan di kawasan perbatasan.	1
9	5.06.000009	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan yang berisi hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan pembangunan perbatasan oleh pemerintah kabupaten/kota.	1
10	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	7

Bidang Urusan: Pengelolaan Penghubung

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	Laporan yang menunjukkan peningkatan skor atau indeks kualitas pelayanan publik (misalnya dari hasil survei kepuasan masyarakat).	1
2	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan jenis dan volume layanan yang telah diberikan oleh unit kerja kepada aparatur dan masyarakat.	1
3	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	Laporan yang menunjukkan peningkatan eksposur atau partisipasi dalam kegiatan promosi produk unggulan dan pelestarian budaya.	1
4	5.07.000004	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan penyelenggaraan atau fasilitasi kegiatan pameran produk dan pagelaran seni budaya.	0
5	5.07.000005	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	Laporan yang berisi hasil koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pelayanan penghubung.	1

Bidang Urusan: Inspektorat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan (lhp) yang diterbitkan oleh apip terkait pengawasan atas aspek kinerja (ekonomis, efisien, efektif) pemerintah daerah.	34
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh apip terkait pengawasan atas aspek keuangan dan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan pemerintah daerah.	150
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Laporan hasil reviu yang diterbitkan oleh apip atas laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) skpd.	1
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan hasil reviu yang diterbitkan oleh apip atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) sebelum diserahkan kepada bpk.	1
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.	3
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Dokumen kesepakatan (piagam audit, mou) yang terjalin antara apip dengan pihak lain dalam rangka sinergi pengawasan internal.	1
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Dokumen (laporan, matriks) yang menyajikan status dan kemajuan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan bpk dan apip.	10
8	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Laporan yang berisi data kasus kerugian negara/daerah dan status penyelesaiannya melalui proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr).	4
9	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh apip dari hasil penugasan audit, reviu, atau evaluasi dengan tujuan spesifik di luar audit rutin.	45
10	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Naskah rekomendasi yang berisi usulan perbaikan kebijakan atau sistem pengendalian intern berdasarkan temuan hasil pengawasan.	4
11	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Naskah rekomendasi yang berisi usulan perbaikan dalam proses fasilitasi dan koordinasi pengawasan.	2
12	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat daerah (dinas/badan) yang menerima layanan pendampingan atau asistensi dari apip dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.	34
13	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Perangkat daerah yang menerima pendampingan dan dinilai dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (pmprb).	34
14	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan (rapat, verifikasi lapangan) yang dilaksanakan dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi (misalnya melalui mcp-kpk).	2
15	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	Perangkat daerah yang menerima pendampingan dan verifikasi dalam rangka pembangunan zona integritas (zi) menuju wbk/wbbm.	34
16	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh apip kabupaten/kota terkait pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa.	2

Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	33
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	33
3	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	0
4	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	0
5	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	0
6	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	4
7	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	0
8	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi	102
9	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	0
10	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	0
11	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	0
12	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	0
13	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	0
14	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	9
15	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	9
16	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	4
17	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	6
18	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka	29
19	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	4
20	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	0

21	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	0
22	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	0
23	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	0
24	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	0
25	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	62
26	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	33
27	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0
28	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila	0
29	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0
30	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0
31	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	35
32	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	22
33	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0
34	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	29
35	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0
36	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	0
37	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	3
38	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	3
39	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	0
40	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0
41	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	320

42	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000
43	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
44	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0
45	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	7
46	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0
47	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1
48	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1
49	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0
50	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	35
51	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0
52	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0
53	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600

54	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	71
55	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	1
56	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0
57	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	100
58	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0
59	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0
60	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)	300
61	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	100

62	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
63	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)	0
64	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)	0
65	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120
66	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150
67	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
68	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (SK Keanggotaan, laporan Kegiatan tahun sebelumnya)	1
69	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)	0

70	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)	0
71	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	320
72	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya	0
73	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0
74	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150
75	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
76	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)	0
77	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	1

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD